



UNIVERSITAS INDONESIA

PENJARINGAN : SEBUAH STUDI MENGENAI HISTORISITAS

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Riandi Habonaran

0706285695

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Program Studi Sarjana Reguler

Departemen Antropologi

Depok

Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Riandi Habonaran

NPM : 0706285695

Program Studi : Antropologi

Judul Skripsi : PENJARINGAN : SEBUAH STUDI MENGENAI
HISTORISITAS

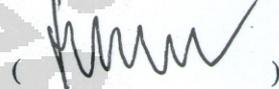
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Tony Rudyansjah, MA

()

Penguji : Dr. Jajang Gunawijaya, MA

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2011

**HALAMAN PERNYATAAN
JUDUL KARYA AKHIR UNTUK KEAKURATAN DATA**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riandi Habonaran
NPM : 0706285695
Program Studi : S1
Departemen : Antropologi
Jenis Karya Akhir : Skripsi

Demi keakuratan data informasi akademik Universitas Indonesia, dengan ini saya menyampaikan dan menyatakan judul karya akhir saya dalam 2 Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan *Hard Cover* terakhir yang diserahkan ke Program/Perpustakaan dan sudah selesai dengan data yang dimasukkan dalam SIA-NG sebagai berikut:

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Indonesia:

PENJARINGAN : SEBUAH STUDI MENGENAI HISTORISITAS

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Inggris:

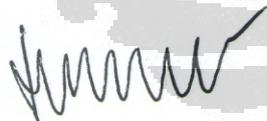
PENJARINGAN : A STUDY OF HISTORICITY

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Desember 2011

Mengetahui,
Ketua Program

Yang Menyatakan


(Dr. Jajang Gunawijaya, MA)


(Riandi Habonaran)

Pembimbing Penulisan Karya Akhir


(Dr. Tony Rudyansjah, MA)

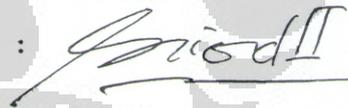
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Riandi Habonaran

NPM : 0706285695

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Desember 2011

KATA PENGANTAR

Dalam tulisan ini, saya sebenarnya mencoba melukiskan proses kehidupan satu wilayah yang erat kaitannya dengan sejarah panjang pembentukan Kota Jakarta yaitu wilayah Penjaringan. Historisitas atau kesadaran sejarah sebagai judul sebenarnya adalah temuan saya di lapangan dimana kajian mendalam tentang hal tersebut adalah isi dari tulisan ini. Secara pribadi saya kemudian merasa bahwa kajian mengenai historisitas ini sangat menarik untuk diangkat ditengah berbagai spekulasi yang seolah menyatakan masyarakat Jakarta hidup tanpa adanya kesadaran dalam diri sebagai individu. Layaknya zombie yang tidak sadar akan ruang dan waktu dalam kehidupan.

Berangkat dari perenungan tersebut, saya kemudian mencoba menuliskan skripsi ini dimana sebenarnya turut menjelma menjadi beban dan harapan dalam kehidupan pribadi saya. Hal tersebut terutama terjadi karena selama masa penulisan saya juga merasa banyak terlibat dalam pemahaman terhadap diri sendiri sebagai seorang manusia. Walaupun dalam penelitian ini saya tetap mengambil jarak dengan objek realita yang diteliti namun pada akhirnya tulisan ini tetap terlihat menjawab berbagai kegelisahan dalam kehidupan pribadi saya.

Subjektivitas sebagai peneliti memang kemudian membawa pemahaman saya untuk menyelami bagaimana proses kehidupan sosial terbentuk. Subyektivitas juga membuat penelitian ini lebih sebagai bentuk refleksi pemahaman saya sebagai peneliti terhadap objek penelitian. Ini merupakan suatu kelebihan dan bukan kekuarangan, karena tugas saya sebagai antropolog adalah menginterpretasikan manusia berdasarkan perannya sebagai individu dan masyarakat dalam nama kebudayaan.

Jakarta, 30 Desember 2010

UCAPAN TERIMAKASIH

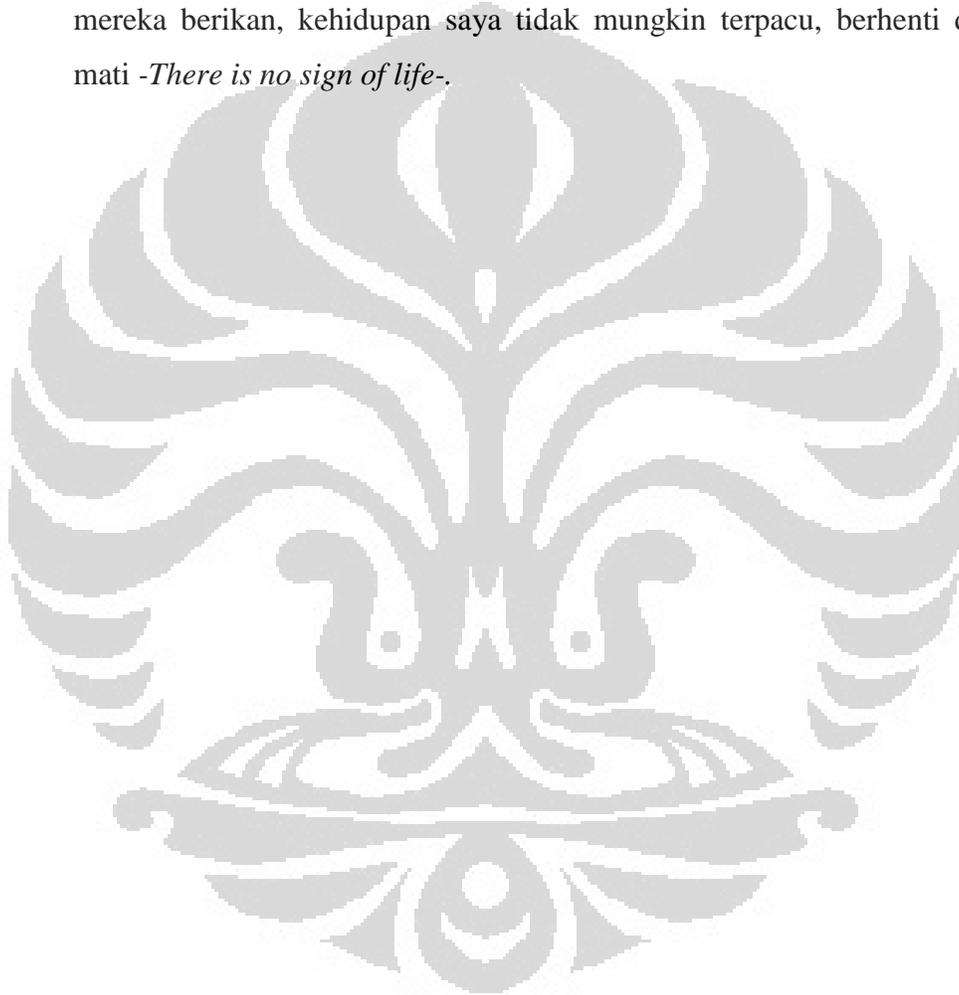
Saya memulai lembar ini dengan dorongan dan untuk itu saya berterimakasih kepada mereka :

1. Aroma dalam kehidupan yang selalu menemani proses penulisan skripsi saya ini. Kehadirannya sangat amat berarti dalam pembentukan paradigma teoritis dan pemahaman saya akan kehidupan.
2. Almarhum Geboy, sejenak kehadirannya sangat membekas di hati saya. Semoga arwahnya dapat tenang berlarian di surga.
3. Mikoyan Cengho, teman sejati yang selalu menemani saya selama masa kuliah di Antropologi UI.
4. Buffy, teman setia dan penjaga rumah yang selalu membangunkan tidur siang saya.
5. Julio Pernambucano, teman sepermainan bola dari negara Brazil yang sangat menyenangkan.
6. Randy Fajrian, teman menyelam dan kerja saya nanti di Filipina.
7. Dr. Tony Rudyansjah dan keluarga, bagi saya kehadirannya bukan sebagai api yang menerangi jalan kehidupan, tetapi lebih sebagai api yang membakar di dalam jiwa. Kehadirannya sangat membekas di kehidupan saya, terutama dalam mengajarkan apa itu kehidupan dan cara menginkorporasikannya.
8. Para kolega terhormat di ZENDAVEST 70, terutama basis GUY'S 610 *Chili*, dan Bulungan yang banyak membentuk dan menempa kehidupan remaja saya.
9. Ritual inisiasi yang mendewasakan diri saya di lingkungan Bulungan Boxing Club terutama dengan Kungkung dan Angkatan "Street Fighter".
10. Ibu Siti dan Bapak Sahari kedua orang tua saya yang telah lama pergi sehingga sempat menyebabkan saya kehilangan arah dalam kehidupan.
11. Andari Dwi Tisnawati, Via Fitriasari, dan Reynaldo Halomoan, ketiga personel trio Libels yang selalu menyanyikan lagu-lagu qasidahan di rumah

saya. Skripsi ini buat kalian untuk membayar kebebasan dalam kehidupan saya.

12. Eduardo Erlangga, seorang Janges (Jawa “nge-nges”) yang sepertinya akan selalu ada dalam kehidupan saya.
13. Seluruh Warga wilayah Penjaringan yang menerima saya dengan sangat pragmatis.
14. Faisal COMMANDO BAT, Pimpinan Pasukan Khusus Kelelawar yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan banyak mahasiswa UI. Kehadirannya banyak membuka pintu-pintu antropologis dalam pemikiran saya.
15. Rizky Fauzi dan Rijo “Ambon” Rivai, dua orang musuh yang bersahabat sangat baik kepada saya. Dari mereka, saya belajar tentang harga diri.
16. Ari sosio 2008, Walaupun suka meledak-ledak sisi primodialitas Minang-nya, kehadiran dirinya menyadarkan saya pertamakali untuk bangga terhadap jurusan Antropologi.
17. Teman-teman Antropologi UI yang menghargai kemampuan saya.
18. Siti Intan Syahayuwitri, Cinta terindah saya sampai saat ini dan merupakan orang yang membuat saya dapat memahami wanita. Skripsi ini ditulis untuk membuat dirinya mengerti bahwa kekasihnya sekarang adalah penjaga pintu air Manggarai.
19. Raisa Andriana, Kompleksitas kehidupan manusia pada kenyataannya menjadi sederhana dalam wujud paras dan suaranya. Saya sangat berterimakasih kepada kehadiran Raisa yang selalu membuai dalam kesadaran di masa depan. Kelak saya akan mengganti kebaikannya dengan membuat layar terbesar yang akan membuat dirinya jatuh bersama saya di dalamnya.
20. Kimberley, Lara Croft, Mang Ari dan semua penjual di takor yang saya hutangi. Kehadiran mereka sangat berperan vital bagi kelangsungan hidup saya yang beberapa saat menjelang akhir penyusunan skripsi ini mendadak miskin. Mereka sepertinya sangat mengerti kiasan “*the stomach can’t wait*” dari Sukarno, sehingga membiarkan saya berhutang banyak kepada mereka.

21. Para High Stoner Universitas Indonesia, Raga, Kemal, Baron, dll. *Yes weed's can.*
22. Amira Woworuntu, *My English Teacher.*
23. Terakhir dan yang terpenting dalam lembar ini adalah saya sangat ingin berterimakasih kepada serigala-serigala yang selalu memberi penderitaan di dalam kehidupan saya. Hal ini sangat perlu karena tanpa penderitaan yang mereka berikan, kehidupan saya tidak mungkin terpacu, berhenti dan pasti mati *-There is no sign of life-*.



ABSTRAK

Nama : Riandi Habonaran
Program studi : Sarjana Reguler
Judul : PENJARINGAN : SEBUAH STUDI MENGENAI
HISTORISITAS

Dalam tulisan ini, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana kehidupan sosial di wilayah Penjaringan dibentuk dalam satu proses panjang interaksi antar manusia. Interaksi manusia sebagai obyek dari penelitian kemudian ditelusuri kompleksitasnya, dan dicoba dilihat prosesnya di dalam ruang dan waktu agar dapat dimengerti bagaimana hubungan masa lalu dalam pemaknaannya di kehidupan masa kini.

Saya kemudian memperlakukan negosiasi kultural yang dikembangkan masyarakat Penjaringan dalam menanggapi kekuasaan dari luar sebagai bentuk kompleksitas kehidupan masyarakat Penjaringan itu. Logika kebudayaan masyarakat tersebut kemudian menjadi sangat historis sifatnya, karena dikembangkan masyarakat dengan berpedoman pada masa lalu mereka.

Temuan penelitian lapangan saya memperlihatkan bahwa kesadaran sejarah (historisitas) masyarakat Penjaringan mempengaruhi bagaimana interaksi mereka dengan kekuasaan yang datang dari luar menjadi sangat pragmatis sifatnya. Hal ini merupakan sebuah pilihan yang ditempuh masyarakat Penjaringan agar tetap dapat melangsungkan kehidupan mereka yang terkepung dalam kemiskinan.

Kata Kunci:

interaksi, kekuasaan, historisitas, pragmatisme

ABSTRACT

Name : Riandi Habonaran
Study Program : Undergraduate
TITLE : PENJARINGAN : STUDY OF HISTORICITY

For this research project, I am interested in knowing how social life began to form in a single elongated interaction process amongst the people in Penjaringan. Human interaction as the object of this research attempts to be further researched as a form of complexity in life and to be seen as a process on how the past relationships can be used to apprehend current ones.

I have placed cultural negotiation that has been developed by Penjaringan's society in facing power from the outside as a complexity in Penjaringan's social life. The cultural logic of the society then becomes quite historical because of the people who are developing it tend to base it on the past.

My fieldwork findings show that in reality, Penjaringan's sense of historicity affects how the people interact with power that comes from outside the society and becomes very pragmatic. This way of life has been chosen purely by the people of Penjaringan so that they may continue on living their lives trapped in poverty.

Keyword:

interaction, power, historicity, pragmatism

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN JUDUL	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Landasan Teori	8
1.5. Metodologi	13
1.6. Signifikansi Masalah	14
BAB II PENDAHULUAN	15
2.1. Masa Kini	15
2.2. Pembangunan dan Keterpurukan.....	16
2.3. Keberagaman yang Ternegosiasikan.....	21
2.4. Ruang, Waktu dan Pemaknaannya	28
BAB III PROSES PEMBENTUKAN WILAYAH PENJARINGAN	31
3.1. Masa- Masa Pembentukan.....	31
3.2. Awal Mula Jalan Penaklukan	33
3.3. Kedatangan Kolonial Eropa (Belanda dan Inggris).....	35
3.4. Kehidupan Kolonialisasi Belanda Awal VOC (1619-1808) ..	41
3.5. Manusia-manusia Dalama Masa Kolonialisasi Awal (1619-1808) 48	46
3.6. Kehidupan Kolonial Perancis (Daendels 1808-1811)	59
3.7. Kehidupan Kolonialisasi Inggris (Raffles 1811-1816).....	63
3.8. Kehidupan Kolonial Belanda Akhir (1816 -1942)	64
3.9. Kedatangan Jepang dan Masa Awal Kemerdekaan.....	72

BAB IV PERDAGANGAN DAN NEGOSIASI BUDAYA	81
4.1. Kemunculan Suharto	81
4.2. Pertumbuhan Ekonomi Masa Awal Orde Baru	82
4.3. Euforia dan Negosiasi Kebudayaan.....	90
4.4. Kesadaran Kultural Dalam Kompetisi Perdagangan.....	95
4.5. Kesepakatan Kultural Dalam Afiliasi Perdagangan	100
4.6. Orang Bugis dan Makasar	103
BAB V MASUKNYA SISTEM KAPITALISME DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PENJARINGAN	108
5.1. Kemunduran Dalam Pembangunan Orde Baru	108
5.5. Militer Dalam Kehidupan Orde Baru	112
BAB VI KEKANGAN STRUKTURAL	119
6.1. Detik-Detik Akhir Masa Orde Baru	119
6.2. Kebebasan Dalam Ketidakmampuan	124
6.3. Senjatanya orang-orang yang Pragmatis	129
BAB VII: KESIMPULAN	134
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

LATAR BELAKANG

Kehidupan sosial masyarakat dalam rentang waktu yang terus berjalan telah melukiskan berbagai bentuk dinamika dalam coraknya masing-masing. Corak kehidupan masyarakat tersebut begitu mendalam melekat sebagai ciri dalam kehidupan suatu kelompok sosial, terkesan seolah sebagai satu bagian dengan warna khas tertentu atau dengan kata lain sungguh berbeda antara satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya. Hal mengenai kehidupan sosial terjelaskan sedemikian rupa karena pada dasarnya terwujud dalam kompleksitas interaksi simbolik manusia didalamnya. Atau, dapat juga dikatakan bahwa manusia dalam merangkai kehidupan dengan atau tanpa disadarinya telah terbuai dan terjebak dalam pola yang merepresentasikan diri mereka tersebut.

“...that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, i take culture to be those webs and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in search of meaning.”(Geertz,1973, hlm.5)

Ilustrasi mengenai kompleksitas kehidupan dapat dilihat dengan bagaimana manusia menjalankan berbagai peran dalam kehidupan, membentuk interaksi yang sebenarnya kontras pemaknaannya antara satu peran dengan yang lainnya. Semisal seorang Ustadz yang pada kenyataannya gemar minum-minuman keras maka ia tidak mungkin menunjukkan kebiasaan buruk tersebut di depan umatnya. Ustadz tersebut tentu sadar bahwa status sosialnya sangat penting dalam keberlangsungan kehidupannya yang memang bergantung dalam posisi di kehidupan rohani masyarakat. Sebagai seorang pemuka agama mungkin ia dengan sadar merasa tindakan itu salah, namun dalam konteks jalan kehidupannya (*the way of life*) dia mungkin sulit menolaknya.

Berbagai penjelasan dan contoh yang saya pahami diatas kemudian membuat saya berpendapat bahwa suatu bentuk interpretasi kehidupan sosial tak sempurna dikala seorang peneliti melupakan arti peran manusia dalam bentangan sebuah realita. Menjadi demikian karena pada dasarnya peran manusia memang segalanya yang mempengaruhi kesadaran mereka dalam melakukan tindakan yang membentuk realita kehidupan. Manusia adalah aktor dalam drama sedangkan kehidupan adalah panggung pentas, tempat mereka-mereka yang merasa dirinya manusiawi memainkan peran membentuk sebuah plot yang dinamakan realita kehidupan.

“They may change their roles, their styles of acting, even the dramas in which they play; but- as shakespeare himself of course remarked- they are always performing”. (Geertz,1973,hlm.36)

Hal tersebut kemudian juga membawa saya dalam pemahaman yang menyatakan bahwa berbicara mengenai manusia dalam konteks peran mereka dalam kehidupan menurut saya berarti kita juga tengah mengkonstruksikan kehidupan sosial mereka yang sebenar-benarnya, dimana terfokus dalam alur konteks kehidupan.

Beberapa penulisan Antropologi yang kemudian setuju mengenai pandangan dapat dilihat dalam berbagai tulisan mengenai kehidupan sosial suatu masyarakat. Isu yang kemudian coba ditawarkan biasanya berkaitan erat dengan hubungan sosial antar kelompok etnis yang terfokus membahas perihal adaptasi, identitas, konflik, proses rekonsiliasi dan lain-lain. Salah satu contoh dari tulisan tersebut kemudian dapat kita lihat dalam penjabaran yang diberikan Parsudi Suparlan mengenai program ayam di Desa Mwapi, Irian Jaya. Dalam tulisan yang dibuatnya saat melakukan penelitian di Irian Jaya itu, beliau memberikan argumen yang kuat tentang bagaimana konsep primodial orang kamoro dari desa Mwapi yang tertuang dalam prinsip *ndaitita* menjadi pedoman utama mereka dalam bertingkah laku dalam arena kehidupan sosialnya.

“Prinsip lain yang mendasar yang ada dalam kebudayaan mereka, sebagai sesuatu yang teradatkan dan utama dalam kehidupan mereka ,

yang mereka namakan **ndaitata** atau pedoman bagi kehidupan yang ditentukan oleh dan diwarisi dari nenek moyangnya,”(Suparlan,1996,hlm.46-48)

“Prinsip utama dalam **ndaitata** adalah timbal balik atau reciprocity, yang mereka namakan **aopao**. Prinsip timbal balik ini terwujud di hampir keseluruhan aspek kehidupan mereka baik dalam hubungannya dengan dunia yang nyata maupun dunia gaib. Diantara prinsip timbal balik yang relevan dengan tulisan ini adalah yang dinamakan **nawarapoka** yang artinya pembayaran kembali atas segala sesuatu yang telah diterima dari pemberian pihak lainnya, yang menghasilkan adanya kegiatan balas membalas pemberian baik berupa materi maupun berupa jasa-jasa atau pujian. Di samping itu ada prinsip **paiti** yang arti harafiahnya adalah malu. Konsep **paiti** ini merupakan pendukung atau pendorong bagi dilaksanakannya **aopao** atau **nawarapoka** oleh para pelaku yang bersangkutan; karena, kalau hanya mau menerima pemberian saja itu maka hal itu sangat memalukan bagi si penerima di mata para pelaku lainnya.”(Suparlan,1996,hlm.46-48)

Argumennya tersebut kemudian dibalut dengan cerita mengenai kegagalan program peternakan ayam yang dijalankan pemerintah dikarenakan ketidaksadaran mereka (pemerintah) dalam memaknai sisi primordial orang kamoro (**prinsip ndaitata**) yang merupakan hal utama dalam konsepsi gerak sosial mereka. Dengan kata lain dalam tulisan tersebut apa yang dikemukakan Parsudi Suparlan seolah mengafirmasi berbagai argumen antropolog-antropolog pendahulu yang memiliki ketertarikan dalam hal identitas seperti Frederik Barth(1969), Bruner(1974),dll tentang bagaimana sebenarnya bentuk primordial menjadi hal utama dalam bentuk pedoman tindakan dan rasa identitas etnis manusia dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari.

Penjelasan ini memang tidak salah, namun bukan berarti pemahaman tulisan Parsudi Suparlan dan yang berbicara dengan argumen sejenis menjadi pemahaman yang tak terbantahkan, terlebih dengan melihat kondisinya pada masa kini. Dalam kesadaran, saya lebih beranggapan bahwanya keterikatan primordialisme dalam interaksi etnis bukanlah satu indikator utama dalam artikulasi (tindakan) identitas seseorang dalam kehidupan. Dengan kata lain masih banyak hal yang lebih kompleks dan perlu dijelaskan daripada cuma berbicara mengenai primordialisme. Selain itu,

kondisi sosial masa kini juga memperlihatkan secara gamblang bagaimana kesadaran dalam pemahaman identitas etnis seseorang tidak lagi hanya dipengaruhi dengan masalah asal-usul (origin structure) -seperti kasus orang kamoro dari desa Mwapi-saja, melainkan sudah terpengaruh oleh berbagai konteks kepentingan dalam kehidupan.

Pengamatan dan pembelajaran saya sebagai antropolog pada kenyataannya kemudian memang mengarahkan saya pada hal yang agak lain dari yang sudah diargumenkan oleh Pak Parsudi dan tulisan –tulisan sejenisnya. Pada kesimpulannya saya berpendapat bahwa apa yang kurang diakomodir dalam penulisan mereka menurut saya dapat dilihat dalam penjelasan mengenai kompleksitas interaksi dalam hubungan sosial antar masyarakat yang masih kurang dieksplorasi lebih mendalam. Masyarakat sebagai subyek dalam kehidupan juga seharusnya dilihat dalam konteks keterikatan sejarah dalam pembentukannya, hal ini menjadi penting karena dalam pendapat saya peran dan status manusia sifatnya cair dalam kehidupan dan pada kenyataannya dibentuk dan terbentuk dari masa ke masa.

Saya memang bukan yang pertama dalam berpendapat sedemikian rupa karena hal ini jauh-jauh hari sudah diperdebatkan oleh para peneliti lain seperti Geertz(1989) (Negara: *The Theatre State in Nineteenth Century Bali*), Stuart Hall(1996)('Introduction : Who Needs Identity ?', *Questions of Cultural Identity*¹). Namun, menurut hemat saya apa yang mereka tuliskan kurang dilihat dalam konteks kehidupan sosial perkotaan yang kompleks dan sangat merepresentasikan identitas satu bangsa, seperti Jakarta.

Geertz boleh terkenal dengan menjelaskan manusia Indonesia di Mojokuto tapi menurut saya melihat manusia Indonesia dalam kehidupan Jakarta adalah satu hal yang lebih spesial. Di Jakarta dari masa ke masa identitas ke-Indonesia-an dibentuk

¹ Walaupun keduanya pada akhirnya juga memiliki tekanan juga dalam penjelasannya.

melalui berbagai interaksi sosial masyarakat. Lance Castle bahkan dengan berani mengajukan argumen bahwa “Di Jakarta, Tuhan sedang membuat orang Indonesia”. Saya sepenuhnya setuju dengan hal ini. Menurut saya, Jakarta memang berperan besar dalam membentuk kehidupan Bangsa Indonesia. Entahlah itu dengan peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan, pertandingan timnas di Gelora Bung Karno, demonstrasi, bahkan interaksi perdagangan di pasar kecil sekalipun. Masing-masing masyarakat dari berbagai etnis dan ras membentuk simbol kehidupan yang nantinya direpresentasikan sebagai Indonesia.

Walaupun Kota Jakarta memiliki sejarah yang berliku dan panjang dalam pembentukan Bangsa Indonesia tapi seolah selalu lupa dimaknai oleh masyarakat kotanya, apalagi semua Bangsa Indonesia. Kota ini malah di -cap sebagai biang keladi masalah korupsi dan krisis kepentingan, seolah tidak disadari perannya yang vital dalam pembentukan jati diri orang Indonesia. Benarkah seperti itu atau tidak adalah pertanyaannya yang berusaha saya jawab nantinya sebagai penulis dengan melihat corak kehidupan sosial dalam satu sudut perkotaan Jakarta, bernama wilayah Penjaringan. Wilayah Penjaringan dipilih sebagai obyek penelitian karena memiliki peran penting dalam sejarah panjang pembentukan Kota Jakarta, bahkan sebelum Bangsa Indonesia ada. Hal ini jelas dapat dilihat dengan keberadaan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai titik awal sementara dimulainya kehidupan di wilayah Penjaringan. Kehadiran Pelabuhan Sunda Kelapa sampai sekarang di wilayah ini memang membuktikan bagaimana kehidupan terus meruang dan mewaktu disini dalam membentuk kehidupan kota Jakarta. Hal ini juga kemudian membuat setidaknya sah-sah saja saya menyebut wilayah Penjaringan merupakan romantisme sejarah tersendiri bagi kehidupan Jakarta, kota yang akhirnya nanti direpresentasikan sebagai kehidupan Bangsa Indonesia.

Tujuan utama saya dalam menyusun tulisan ini adalah menginterpretasikan kehidupan sosial wilayah Penjaringan. Sedangkan sifat aktual dalam objek penelitian merupakan kekuatan utama mengapa kajian ini perlu dikaji dan kemudian

dipergunjingkan pada kesempatan berikutnya. Perdebatan teoritis yang saya tawarkan mengenai kebudayaan, kesadaran sejarah dan lain-lain juga menjadi bagian yang menarik untuk dilihat, karena merupakan cara baru dalam menjelaskan kompleksitas kehidupan Jakarta.

1.2. Rumusan Penelitian

Daerah pinggiran kota yang memiliki penggambaran khas aktivitas kesibukan pelabuhan adalah suasana utama yang saya tangkap saat pertamakali datang ke wilayah bernama Penjaringan. Wilayah yang tercatat masuk dalam Kecamatan Penjaringan dan bernama secara administratif Kelurahan Penjaringan ini, berbatasan langsung dengan laut yang, mana kemudian diyakini membuat mata pencaharian utama warganya berhubungan dengan laut seperti mencari ikan, pelelangan ikan, pembuatan kapal, dan lain-lain.

Luas Kelurahan Penjaringan sendiri menurut data terakhir adalah 3.9543km² dengan pembagian wilayahnya adalah 17 RW dan 238RT. Penduduk yang mendiami daerah ini didominasi oleh beberapa etnis pendatang seperti Suku Bugis, Suku Sunda (Serang/Banten), Suku Jawa, sementara etnis minoritas yang mendiami Kelurahan Penjaringan terdiri dari Madura, Cina, dan lain-lain. Suku Bugis memiliki kebiasaan hidup mengelompok dan terpusat di daerah- daerah sekitar laut, sementara Suku Sunda(Serang/Banten), Suku Jawa dan suku minoritas lainnya(Cina, Madura, dan lain-lain) tinggal menyebar di wilayah Kelurahan Penjaringan. Masyarakat lokal yaitu Suku Betawi dapat dikatakan hidup terpinggirkan dalam ranah kehidupan sosial daerah ini, mereka menjadi kaum minoritas dan seakan hilang eksistensinya dalam kehidupan sosial.

Dapat dibilang dalam pengamatan awal tidak ada bentuk kebudayaan dominan yang berasal dari Etnis asal yaitu Suku Betawi, kehidupan sosial di wilayah Penjaringan terbentuk secara *melting pot* (semua etnis pendatang membentuk corak dan kontur kebudayaan baru di satu tempat). Corak masyarakatnya terlihat sepintas

dapat dikatakan heterogen dikarenakan masyarakatnya kebanyakan pendatang dan tidak memiliki keterikatan batiniah² dengan tanah tempat tinggalnya (Penjaringan).

Mewujudnya wilayah Penjaringan dalam kehidupan pada kenyataannya sangat merepresentasikan banyak hal dalam kehidupan sosial Jakarta. Disini, sedari dulu masih terbentuk sebagai daratan Pelabuhan Sunda Kelapa sampai pada masa sekarang, kehidupan berjalan dalam alur yang selalu bertentangan namun pada kenyataannya dapat berjalan berdampingan. Dalam realita kehidupan wilayah Penjaringan, dari masa ke masa memang memperlihatkan wilayah ini sangat terkesan miskin. Pemukiman pribumi tertuanya yaitu Kampung Luar Batang juga merupakan perkampungan budak dari era kolonialisme. Walaupun begitu terjelaskan dengan kemiskinannya, wilayah ini selalu menjadi daerah penaklukan bagi penguasa. Selalu dianggap potensial sebagai pendukung satu bentuk kekuasaan. Dengan perbedaan pemaknaan tersebut kehidupan wilayah Penjaringan berjalan dan menemukan kontinuitasnya. Terlihat tidak mungkin namun begitulah realitanya, disini suatu bentuk kestabilan dibentuk oleh jalan kehidupan yang bersifat *chaotic*.

Berkaitan dengan hal ini saya berpendapat bahwa penjelasan mengenai kekompleksitasan kehidupan wilayah Penjaringan merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini penting untuk memahami dan menjelaskan teka-teki besar mengenai proses pembentukan corak kehidupan wilayah Kelurahan Penjaringan, dimana tidak men tidak menutup kemungkinan tergambarkan suatu warna kehidupan yang baru. Corak kebudayaan yang menunjukkan gejala dalam kehidupan Jakarta representasi Bangsa Indonesia yang belum selesai dimaknai dan sering salah diinterpretasikan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanan proses terbentuknya kehidupan sosial di wilayah Penjaringan

² Suparlan, Parsudi. *Suku Bangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*. YPKIK., 2004 (hal 18-22) (hal 267-268)

2. Bagaimana proses pemaknaan masyarakat terbentuk dari masa ke masa dalam interaksi di kehidupan
3. Apa definisi yang tepat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan corak kehidupan sosial di wilayah Penjaringan

1.4. Landasan Teori

1. Definisi Kebudayaan dan Kaitannya Dengan Pemaknaan Manusia Terhadap Kehidupan.

Kebudayaan bukanlah satu bentuk yang nyata dalam ideasional semata atau malah terbentuk sebagai entitas yang secara ontologis ada. kebudayaan adalah publik yang artinya mewujudkan dalam kesepakatan interaksi simbolik dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kebudayaan mendapat nyawanya dalam pemaknaan antar manusia yang terjadi dalam ruang dan waktu. Geertz mendefinisikan hal ini sebagai berikut:

“Culture, this acted document, thus is public, like a burlesqued wink or a mock sheep raid. Though ideational, it does not exist in someone’s head; though unphysical it is not an occult entity.” (Geertz, 1973, hlm. 10)

Karena bentuk kebudayaan yang publik, dapat dikatakan dalam realita kehidupan yang berjalan terjadi terus menerus proses dialog antar umat manusia dalam memaknai pemahamannya dan membentuk kesepakatan-kesepakatan tentang berbagai hal dalam kehidupan. Dalam penelitian ini, saya memberlakukan pemahaman mengenai pemaknaan akan kehidupan sebagai satu bentuk yang dimaknai dan dinegosiasikan kesepakatannya secara dialogik dalam kehidupan (terus menerus). Bentuk transformatif dari dialog yang dilakukan manusia dengan berbagai hal di luar dirinya yaitu lingkungan, kebudayaan, orang lain, dan lain-lain menyebabkan berbagai bentuk pemaknaan dalam kehidupannya terus-menerus berkembang dan tidak terselesaikan pendefinisian seperti dialog itu sendiri yang terus berjalan dalam putaran roda dunia. Penjelasan diatas tak dapat dipungkiri

dilhami oleh argumen yang diajukan oleh Bakhtin yaitu mengenai “dialogic narration”, sebagaimana dikutip oleh Tony Rudyansjah dalam bukunya *Kekuasaan, Sejarah & Tindakan* (2009, hlm. 42)

“An event, the event of being responsible for (and to) the particular situation existence assumes as it unfolds in the unique(and constantly changing) places s/he occupies in it.”

Dalam argumennya tersebut Bakhtin menegaskan bahwa manusia dalam memahami kehidupannya selalu bersifat dialogis atau dalam artian sederhananya adalah tidak pernah bersifat tunggal (monologik) melainkan selalu bersifat *polysemic* (banyak sudut pandang) dan *polyphonic* (multiwacana). Berdasarkan hal ini saya memberlakukan bentuk pemahaman terhadap kehidupan wilayah Penjaringan terus menerus berada dalam proses dialog yang mewujud, dimana kemudian saya dapat mengatakan bahwa pemahaman masyarakat tersebut terkonstruksi dalam konteks sosial masyarakat wilayah Penjaringan dan bentuk pemaknaannya menjadi beragam.

Impilikasi dari pemahaman tersebut kemudian membawa saya dalam penelitian untuk mencoba menjelaskan isu ini secara tebal (*thick description*) untuk mendapatkan “makna terdalam” dari interaksi realita kehidupan sosial wilayah Kelurahan Penjaringan. Karena dalam tingkat tindakan (*action*) simbol atau dalam konteks ini kehidupan memperoleh pemaknaan dan terwujud secara konkret. Geertz juga berbicara demikian, namun ia lebih memilih menjelaskannya dengan kata “Role they play” atau peran yang dijalankan manusia ketimbang “identitas”

“Behaviour must be attended to, and with some exactness, because it is through the flow of behaviour -or, more precisely, social action- that cultural form find articulation. They find it as weel, off course; but these draw their meaning from the role they play (Wittgenstein would say their “use”) in an ongoing pattern of life, not from any intrinsic relationship they bear to one another.”(Geertz, 1973, hlm. 17)

Bentuk interpretasi makna simbolik dalam obyek penelitian saya di wilayah Kelurahan Penjaringan dapat terwujud dan diakomodir dengan cara menginterpretasikan “social discourse” dalam kehidupan warga penjaringan, melihatnya terwujud sebagai pemahaman pada masing-masing kelompok etnis yang mewakili peran manusia sebagai aktor sementara kehidupan wilayah Penjaringan adalah plot jalan ceritanya. Dan faktor terakhirnya yaitu adalah mencari sifat “microscopic” dalam kehidupan sosial di wilayah penjaringan yang merupakan perpanjangan bagi suatu isu yang besar atau dalam artian lain temuan dalam ranah lokal yang memiliki peran relevansi bagi isu global (besar). Hal semacam ini mengacu pada paradigma deskripsi etnografi yang bersifat simbolik interpretatif yang diajukan oleh Geertz:

“So, there are three characteristic of ethnographic description: it is interpretative; what it is interpretative of is the flow of social discourse; and the interpreting involved consistin trying to rescue the “said” of such discourse from its perishing occasions and fix it in perusable terms.”(Geertz,1973,hlm.20)

... “But there is, in addition, a fourth characteristic of such description, at least as I practice it: it is microscopic. This is not to say that there are no large-scale anthropological interpretations of whole societies, civilizations, world event, and so on. Inded, it is such extension of our analyses to wider context that, along with their theoretical implications, recommends them to general attention and justifies our constructing them.”(Geertz 1973:21)

2. Struktur Sebagai Skema Klasifatoris yang Berisi Pengetahuan, Kategori, dan Gagasan, dimana terdapat oposisi biner di dalamnya.

Kehidupan sebagai suatu bentuk negosiasi yang menghasilkan kesepakatan pada akhirnya akan melahirkan suatu struktur masyarakat. Dalam perhentian teoritis ini nampaknya kita harus mengutip sumbangan dari Durkheim dan M.Mauss mengenai hal ini. Durkheim dan muridnya M. Mauss pada akhirnya berpendapat bahwa suatu bentuk struktur akan mengembangkan prosedur manusia menggolongkan segala hal ke dalam kategori dan logika tertentu. Mereka merunut penelitian ini dari alur

kehidupan manusia yang menurut mereka paling “primitif” dan memahaminya secara evolusionis, sehingga pada akhirnya mereka berpendapat sekalipun prosedur manusia menggolongkan segala hal ini terlihat primitif, namun itu ditunjukkan selayaknya ilmu pengetahuan modern yaitu untuk menguasai kehidupan. Semua prosedur penggolongan manusia ditujukan sebagai cara menaklukkan alam dan menentukan arah tindakan. Bila ada suatu penaklukan dalam kehidupan, dengan begitu juga menunjukkan bagaimana manusia memaknai kehidupan secara oposisi yang biner. Suatu kompleksitas kehidupan yang mana menjadi pembicaraan utama dalam penelitian ini. Menarik untuk membahas hal ini kemudian dimulai dari pendapat Levi- Strauss mengenai manusia dalam memaknai kehidupan.

Strauss dan pengikutnya adalah pemuka antropologi strukturalis yang bekerja dengan mengontraskan bentuk kehidupan yang menurut mereka saling beroposisi secara biner. Mereka juga menjelaskan ini dengan mengajukan pemahaman bahwa manusia dalam pikirannya selalu membagi kehidupan dalam dua ranah yaitu ranah alam (*nature*) dan ranah kebudayaan (*culture*). Di ranah alam (*nature*) ada berbagai bentuk tantangan namun disitulah keuntungan dalam kehidupan yang belum dijamah hadir. Sementara ranah kebudayaan (*culture*) adalah segala hal yang dekat dan kita rasa sebagai kenyamanan dalam kehidupan. Manusia harus terus mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam (*nature*) agar dapat meneruskan eksistensinya. Hal ini dikarenakan disanalah sebenarnya letak dari kehidupan. Surga yang masih liar.

Pada akhirnya mereka kemudian berpendapat bahwa dalam prinsip (oposisi biner) tersebut ada suatu bentuk yang mereka sebut sebagai *the universal grammar of culture*, dimana didalamnya aturan dan wacana kebudayaan (struktur) dibentuk berdasarkan prinsip oposisi itu sendiri. Pernyataan ini sangat berkorelasi dengan Durkheim dan M.Maus yang berpendapat bahwa sistem klasifatoris yang berisi pengetahuan, kategori, dan gagasan sangat berguna untuk menguasai kehidupan. Sehingga pada akhirnya membentuk suatu pemahaman bahwa di dalam struktur

kehidupan manusia membentuk suatu sistem klasifikasi dalam formasi yang oposisi biner.

3. Kesadaran Sejarah, Tindakan, dan Kekuasaan

Apa yang mau saya jabarkan adalah suatu bentuk kehidupanyang dilihat dalam bentuk ruang dan waktu. Menginterpretasikan transformasi dan kontinuitas dalam kehidupan wilayah Penjaringan. Oleh karena itu saya kemudian mengkonstruksikan pendekatan sejarah dalam tulisan saya ini untuk mencoba mencapai maksud awal tersebut.

Disini metodologi sejarah yang saya lakukan tidak seperti yang dipakai ahli sejarah karena bukan terfokus pada bukti pada satu peristiwa, melainkan sejarah sebagai satu kesejarahan. Dengan kata lain apa yang dikaji dan menjadi fokus para antropologi di dalam konteks ‘penyejarahan antropologi’ adalah soal historisitas (kesejarahan), yang berarti cara-cara serta bentuk-bentuk yang sudah terpolakan secara kultural dimana satu masyarakat mengalami dan memahami sejarahnya (Rudyansjah,2009,hlm.282). Kita sebagai antropolog yakin bahwa sejarah adalah hasil rekonstruksi masyarakat pada masa kini dan bukan sejarah yang mewujud sebagai cerita si pemenang saja. Seperti hadir nyata kesadaran dirinya tentang jalan cerita sejarah walaupun terkadang tentu bertentangan dengan mayoritas suara. Singkatnya sejarah tidak dimaknai sebagai *“History is what the ruler inscribes”* yang sangat terkesan menakutkan bagi mereka yang beoposisi atau memang terlupakan.

Kesadaran sejarah adalah simbol yang sebenarnya dijadikan acuan manusia untuk bertindak. Sementara waktu lebih diartikan sebagai bentuk pilihan-pilihan yang mungkin dilakukan dan bukan sebagai durasi. Artinya, kesadaran akan masa lampau mewujud sebagai pilihan dalam bertindak pada masa kini dan bukan sebagai satu aturan yang harus dijiplak untuk di wujudkan pada masa sekarang. Hal ini kemudian menjelaskan bagaimana sebenarnya kekuasaan yang berusaha mengkontraskan pemahaman struktur dalam kehidupan. Atau mereka yang menganggap itu sebagai

sejarah yang menang pada kenyataannya tidak dipahami sedemikian rupa. Pada kenyataannya didalam interaksi, manusia juga terkadang melakukan resistensi terhadap kekuasaan. Mereka mengembangkan berbagai pilihan inkorporasi yang sangat kultural dalam kesadaran mereka untuk memahami kekuasaan di luar dirinya.

1.5. Metodologi

Kehidupan wilayah penjarangan sebagai tema besar dari tulisan ini, kembali kemudian saya tekankan adalah suatu bentuk yang memiliki sisi kekompleksitasan dalam problematikanya yang tak dapat dijelaskan serta merta secara sederhana. Sehingga membutuhkan sumbangan penjelasan dalam rentang waktu kehidupan yang panjang.

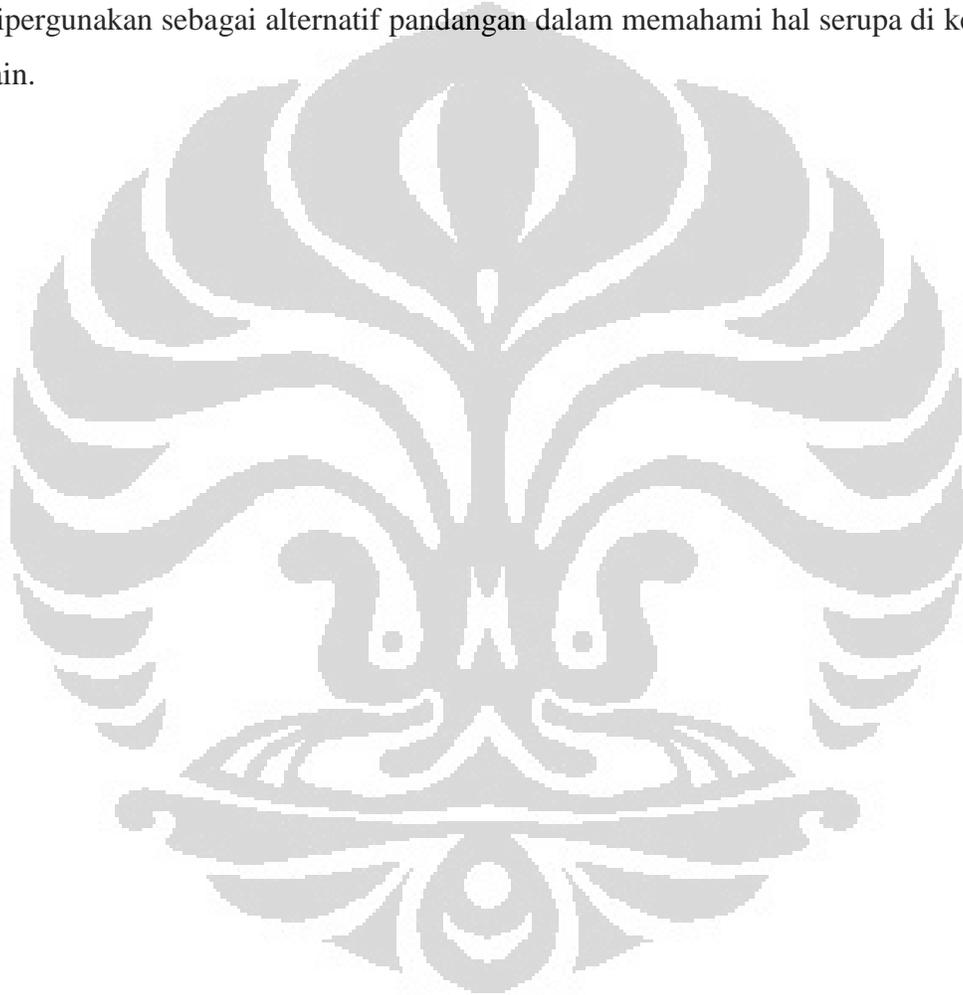
Tulisan ini saya harapkan dapat disusun dan dijelaskan pembacanya dalam sisi yang menembus ruang dan waktu (abstrak). Untuk mencapai hal itu saya tidak mencoba menampilkan penjelasan yang esensial dalam tulisan saya, melainkan menggeser pendekatan antropologi dari yang tadinya kondisional dan deskriptif menjadi dalam perspektif subjektifitas saya sebagai peneliti yang bersifat reflektif (lahir dari konstruksi perenungan peneliti)/*subjunctive* dan dengan bentuk penyajian gambaran penelitian kebudayaan yang *konstitutif* (gambaran kebudayaannya tidak pernah rampung atau selalu berada dalam proses menjadi)³.

Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode observasi partisipasi. Selain itu juga agar mendapatkan kesan yang lebih mendalam melalui proses *immerse dan resosialitation* untuk membantu saya dalam melihat dan merasakan kehidupan sosial obyek yang akan saya teliti. Bentuk ini saya lakukan untuk mendapatkan pengalaman secara *experience near concept* dan *experience distance concept* ,sehingga diharapkan etnografi yang saya buat akan menjelaskan dengan baik kolaborasi pengetahuan dari sisi obyek penelitian dan saya sebagai peneliti.

³ Rudyansjah, Tony. *Kekuasaan Sejarah dan Tindakan*. Rajawali Pers, 2009 (hal 18-19)

1.6. Signifikansi Masalah

Tulisan ini diangkat dengan maksud memberi pertimbangan antropologis dalam menjelaskan soal kekuasaan dalam kesadaran manusia. Bentuk keuntungan yang diharapkan didapat dalam penjelasan masalah ini tak lain adalah menemukan gejala (*symptoms*) sosial yang terkandung didalam masyarakat, untuk kemudian dapat dipergunakan sebagai alternatif pandangan dalam memahami hal serupa di kehidupan lain.



BAB II

PENDAHULUAN

2.1. Masa Kini

Bagi banyak orang di Jakarta, wilayah Penjaringan pada masa kini biasanya hanya dimaknai sebagai kawasan perkotaan yang kumuh atau malah terlupakan sebagai bagian dari Jakarta itu sendiri. Daerah pinggiran Ibukota Indonesia ini terkesan sangat miskin dengan segala kesulitan hidup masyarakatnya. Terlihat begitu terpuruk sebagai daerah tertinggal yang seolah tak tersentuh dalam gerak pembangunan Jakarta.

Gambaran umum khalayak ramai tentang Penjaringan tersebut memang kemudian jelas membekas saat pertamakali saya memasuki kehidupan sosial wilayah ini. Dalam pemahaman awal saya, keseharian masyarakat wilayah Penjaringan memang terfokus dengan pergulatannya akan kemiskinan. Pabrik-pabrik industri, pelabuhan ikan, dan sentra ekonomi lainnya berdiri banyak di wilayah ini namun tidak pernah cukup menjamin kesejahteraan masyarakat yang kebanyakan adalah pekerja kasar. Mereka kebanyakan tersiksa melayani industri besar itu namun tetap saja miskin dalam kehidupan. Dengan segala kemelaratannya, masyarakat terbiasa memakai kemiskinan sebagai alasan untuk bertahan dalam kehidupan. Satu hal yang memang kemudian membuat suasana wilayah ini menjadi sangat semerawut, karena berbagai lahan umumnya –jalan raya, kolong tol, dan fasilitas umum lain- dijadikan tempat usaha, rumah, tempat prostitusi, dan segala hal lain sesuai dengan keuntungan pribadi masing-masing.

Terpuruknya wilayah Penjaringan dalam kehidupan semakin jelas terlihat dengan keadaan mereka yang tinggal berserakan di gang-gang sempit dengan bangunan rumah dibangun begitu berdempetan dan sangat menyesak. Di wilayah

ini tikus hidup makmur tumbuh hampir sebesar kucing yang selalu menunggu datangnya malam untuk keluar mengganggu para pejalan kaki. Karena begitu padatnya pemukiman di wilayah ini, membuat pekarangan rumah nyaris tidak ada sehingga jalan raya menjadi altar sosial mereka satu-satunya dalam berinteraksi di keseharian. Isu penggusuran tanah yang kebanyakan memang tidak bersertifikat sah telah menjadi kawan lama yang terus mengancam. Namun semakin hari enggan digubris warga di wilayah ini. Kriminalitas sempat menjadi “primadona” dalam keseharian, mewujudkan sebagai kegiatan tetap sebagian masyarakat yang butuh pelampiasan akan kegetiran hidup.

Suatu keadaan yang jauh berbeda apabila kemudian kita membandingkan suasana ini dengan wilayah sekitar Penjaringan yaitu Kelurahan Pluit dan Kelurahan Kapuk Muara yang merupakan kawasan elite perumahan. Di daerah elite ini rumah dibangun diatas bebatuan megah, berderet rapi dengan fasilitas publik melengkapi dalam kehidupan. Suasana lalu lalang parade kendaraan mewah masyarakatnya hadir selalu seharian penuh. Mayoritas Golongan Cina Peranakan tinggal disini walau tetap ada segelintir etnis pribumi yang ikut menetap. Kebanyakan dari mereka memang orang kelas ekonomi atas dengan penghasilan yang tinggi, beberapa malah pemilik modal yang usahanya dibangun di Wilayah Penjaringan. Bagi para pemilik modal ini, wilayah Penjaringan memang hanya sekedar tempat kumuh yang tak pantas ditinggali namun tentu strategis dalam bidang usaha.

2.2. Pembangunan dan Keterpurukan

Berkembangnya wilayah Penjaringan pada masa sekarang seolah berjalan dalam logika “kematian yang perlahan”. Berbagai kepentingan besar dibangun dan dijalankan namun pada akhirnya malah menyengsarakan masyarakat. Gambaran ini dengan jelas kemudian dapat dilihat dalam bentuk transformasi yang terjadi di sentra ekonomi wilayah ini, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Suatu transformasi yang sangat menunjukkan bentuk kontras karena terjadi dalam penurunan kualitas seperti yang akan saya jelaskan di bawah ini.

Di masa kejayaannya, Pelabuhan Sunda Kelapa sangat gemilang dengan kegiatan perdagangan yang mendunia. Faktor ini kemudian menarik berbagai manusia berbondong-bondong datang -dari berbagai etnis/ras- untuk mengais rejeki dan keuntungan yang ditawarkan pelabuhan ini. Banyak dari mereka kemudian memutuskan untuk mulai menetap di sekitar daratan pelabuhan, membentuk pemukiman dengan menjalankan aktivitas tertuju pada Pelabuhan Sunda Kelapa. Kehidupan mereka ini kemudian terus berkembang pada masa selanjutnya, saling berbaur dalam suasana keberagaman manusia yang terus menerus ada dikarenakan ketertarikannya terhadap pelabuhan ini. Dari masa ke masa kesatuan kehidupan itu kemudian terus berkembang dengan lebih besar, menjadi satu kawasan yang luas dan kita maknai sebagai wilayah Penjaringan pada masa kini. Kehadiran pelabuhan ini pada kenyataannya memang begitu penting bagi wilayah Penjaringan karena kemudian dapat dikatakan merupakan cikal bakal kehidupan wilayah Penjaringan.

Begitu pentingnya Pelabuhan Sunda Kelapa bagi wilayah Penjaringan seolah hilang ditelan asa seiring dengan berjalannya waktu. Semuanya menjadi demikian seiring dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang nampaknya memang tidak lagi bisa menjamin kehidupan masyarakat. Kemerosotan ini timbul dikarenakan perkembangan perekonomian yang menyebabkan masuknya modal besar kemudian malah melangengkan bentuk monopoli dan konglomerasi dagang. Kedua hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat Penjaringan yang sebelumnya dengan tenang menjalankan kegiatan usaha harus tersiksa karena jelas kalah bersaing dalam hal modal. Mereka juga tidak dapat menikmati lagi kesempatan yang luas dalam perekonomian karena terus dibatasi ruang geraknya oleh para penguasa monopoli dan konglomerasi dagang tersebut. Kebanyakan dari mereka yang dulunya maju dalam wirausaha angkut berat dengan menggunakan kapal akhirnya harus merelakan usahanya bangkrut. Banyak dari mereka kemudian harus menjual kapal yang dulu merupakan kebanggaan mereka dan berhenti melakukan wirausaha. Mereka kemudian memilih bekerja upahan atau berdagang dengan keuntungan kecil. Pemerintah

dengan berbagai kebijakannya semakin hari juga malah menyulitkan kegiatan perekonomian di pelabuhan ini, dimana itu terlihat dalam kebijakan pemerintah yang kemudian lebih memfokuskan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan angkut berat (kargo) menggantikan Pelabuhan Sunda Kelapa.

“ For instance, in 1977 the Jakarta Export Processing Zone was occupied near Tanjung Priok, intended to be the first of several in Indonesia. Like such zones elsewhere in Asia, it contains factories producing garment and electronic goods exclusively for export by firms owned by foreign investor with some local equity. It introduced the new phenomenon of modern manufacturing jobs almost entirely for young women, although total employment is low (less the 8,000 in 1982). Much smaller than its competitors overseas, the Jakarta Zone has the disadvantage of being a latercomer at a time when world trade is shrinking.”(Abeyasekere,1989,hlm.242-243)

Perubahan fungsi Pelabuhan Sunda Kelapa ini dilakukan seiring mendangkalnya lautan sekitar Sunda Kelapa dan untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kawasan ekspor pertama di Indonesia tahun 1977. Akibat dari hal ini kehidupan perekonomian masyarakat yang sudah luluh lantah dalam monopoli dagang kemudian semakin terpinggirkan dengan kebijakan pemerintah yang sangat tidak melihat konsekuensi pembangunan terhadap masyarakat sekitar. Terakhir tentu yang paling menyikasa adalah diperketatnya larangan perdagangan kayu (*Illegal Logging*) yang pada dasarnya merupakan pemasukan utama dari pelabuhan ini pada sekitaran tahun 2000. Para buruh angkut dan unsur pendukung lain seperti anak buah kapal akhirnya banyak dirumahkan karena perdagangan yang setiap hari semakin sepi. Mereka kemudian pada akhirnya harus mencari pekerjaan lain yang sudah tentu sangat berbeda dengan pekerjaan awalnya dan belum tentu menguntungkan. Akibat dari ini semua pada akhirnya adalah Pelabuhan Sunda Kelapa yang menjelma sebagai kenangan yang terkesan menyedihkan dalam kehidupan. Pelabuhan Sunda Kelapa dimaknai sebagai kegemilangan yang telah meredup sinarnya, hanya berdiri sebagai bangunan tua yang rapuh.

Cerita bagaimana pembangunan di wilayah Penjaringan adalah keterpurukan bagi masyarakatnya kemudian berlanjut dalam episode lain kehidupan. Salah satu atau malah satu-satunya hal yang mencerminkan situasi ini dapat dilihat dengan dibangunnya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman pada tahun 1980-an yang diklaim terbesar se-Asia. Dahulu kala bersebrangan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa memang sudah ada pasar ikan yang megah dimasanya. Distribusi peredaran ikan di seluruh Jakarta dan Jawa pada umumnya dipenuhi oleh kehadirannya namun dengan seiring perkembangan zaman dan untuk mengakomodir kepentingan ekspor-import maka direncanakanlah pembangunan pelabuhan ikan modern ini. Kehadiran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman yang kemudian diharapkan memberikan kemakmuran sangat berbanding terbalik dengan kenyataannya. Kepentingan besar yang dijalankan pelabuhan ini bukan memberikan keuntungan ekonomis namun malah sangat menyengsarakan warga. Hal ini terjadi sekali lagi karena adanya monopoli dagang, dimana keuntungan dibagikan secara tidak merata dan walaupun dirasakan hanya berupa sisa-sisa yang sangat tidak bernilai. Masyarakat yang tadinya tidak dapat berharap dengan adanya Pelabuhan Sunda Kelapa kini juga dipaksa kecewa dengan kehadiran Pelabuhan ikan ini. Ibarat keluar dari mulut buaya kini mereka harus masuk ke dalam mulut harimau.

Berkembangnya wilayah Penjaringan yang berproses menjadi kawasan industrial besar dengan kehadiran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman pada kenyataannya malah makin menyengsarakan masyarakatnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, maka sangatlah nyata monopoli terhadap kegiatan ekonomi pelabuhan membuat masyarakat yang berkepentingan semakin merana kehidupannya. Pedagang ikan yang menjamur di pelelangan pelabuhan banyak yang gulung tikar karena ikan yang tidak kunjung datang sebab terlebih dahulu dibeli perusahaan besar. Kuli dan berbagai pekerjaan kasar kebanyakan menganggur karena perdagangan yang sepi. Para nelayan tradisional makin terpinggirkan oleh sistem yang dijalankan pelabuhan juga akhirnya harus mengalah dengan teknologi kapal ikan besar yang mulai bersandar. Kebanyakan warga yang menjadi buruh pabrik di

sekitar pelabuhan, digaji dengan semena-mena sangat tidak mencukupi keseharian mereka. Keuntungan mereka seolah sudah ditanggihkan diatur sesuai dengan penilaian tidak obyektif terhadap kepentingan dan kontribusinya masing-masing. Dihalangi kemajuannya seolah tidak diperbolehkan menjadi lebih makmur.

Melihat bagaimana kondisi transformasi struktural wilayah Penjaringan yang seharusnya dapat memakmurkan masyarakat dengan hadirnya sentra ekonomi besar di dalamnya, seakan menegaskan bagaimana bentuk pembangunan pada kenyataannya bukan saja tidak memihak namun juga menyakitkan bagi kebanyakan golongan miskin di wilayah ini. Keadaan ini juga seolah berbicara tentang penyiksaan dan pemerasan. Satu keadaan yang mengharuskan masyarakat Penjaringan merana dalam kesulitan, untuk keuntungan yang lebih baik bagi sebagian kelas lain dalam kehidupan masyarakat disekitarnya. Wilayah ini dapat dikatakan mewujud dalam rentang perjalanan kehidupan yang panjang dan sangat menyakitkan.

Dengan segala kegagalan dan kekisruhan yang ditimbulkan pembangunan maka semuanya kemudian harus dilihat dari subyek dan bukan gejalanya. Suatu pertanyaan yang harus diajukan dengan diawali kalimat “Siapa yang punya kuasa untuk bertanggung jawab atas semua ini?”. Menjadi demikian karena kekuasaan pada dasarnya menyebabkan Wilayah Penjaringan bertransformasi, terus bergerak dari masa ke masa sampai pada detik ini. Kekuasaan berperan membawa Pelabuhan Sunda Kelapa dalam masa kejayaannya, kekuasaan pula kemudian membuatnya bertransformasi menjadi setumpuk pasir tak berguna yang pada akhirnya digantikan kemegahan semu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam. Dengan adanya pembangunan Pelabuhan ini warga memang tersalur dalam sektor formal maupun informal perekonomiannya. Namun jelas perkembangan mereka sengaja tidak direncanakan secara baik, terabaikan atau malah sangat tereksplorasi. Berbagai hal coba ditengahkan sebagai penyebab namun kesemuanya merujuk pada persoalan klasik yang menunjukkan bagaimana bentuk transformasi struktural pada

kenyataannya tidak pernah melihat keterikatannya dengan konteks sosial dan sejarah dalam pengembangannya, sehingga terlaksana dalam logika menyengsarakan tanpa adanya kepentingan untuk mensejahterakan manusia. Sesuatu hal yang tak mungkin akhirnya terjadi kalau tidak direstui satu bentuk kekuasaan.

Kehidupan di wilayah Penjaringan terlingkupi oleh kemiskinan yang dipasung oleh satu bentuk kekuasaan yang juga memangkas harga diri dalam titik terendahnya. Apa yang mereka nikmati hanyalah sisa dan mereka dipaksa hidup berebutan di dalamnya. Bagi manusia ada lebih baiknya memang kita menempatkan harga diri diatas segalanya, karena dari situlah manusia menjadi seutuhnya. Namun di satu hal kehidupan tentu terus berjalan dan manusia harus hidup dengan perut terisi sehingga terkadang melupakan harga dirinya, keadaan inilah yang sangat mencerminkan kesengsaraan wilayah Penjaringan. Kekuasaan melegitimasi kesengsaraan ini, terus mencoba membuatnya berjalan sebagai keseharian manusia yang dilingkupinya. Wilayah Penjaringan dengan kemiskinannya seakan disembunyikan rapat-rapat, dibungkam dalam kepasrahannya untuk kemiskinan yang seolah sudah ditakdirkan.

2.3. Keberagaman Yang Ternegosiasikan

Kehidupan sosial di Wilayah Penjaringan pada masa kini selain tergambarkan dengan kesengsaraan dalam kemiskinan, juga pada dasarnya berada dalam satu nuansa keberagaman masyarakat. Hal ini terlihat jelas dengan berkumpulnya dalam keseharian manusia-manusia dari berbagai kelompok etnis/ras, dalam interaksi kehidupan sosial wilayah ini. Cermin dari keberagaman interaksi dalam kehidupan terlihat dalam hadirnya kelompok etnis yang terdiri dari Etnis Banten dan Etnis Bugis/Makasar sebagai kelompok masyarakat yang menjadi mayoritas penduduk pribumi di wilayah Penjaringan, beberapa kelompok Etnis dari Jawa Tengah dan Timur yang kebanyakan berasal dari daerah Solo, Yogyakarta dan lain-lain¹ dan

¹ Sebenarnya masih ada beberapa kelompok etnis pribumi lain yang tidak disebutkan dalam tulisan saya ini dikarenakan kehadirannya yang secara kuantitas saya rasa kurang signifikan dan tidak terlalu penting untuk dimasukkan dalam pembahasan tulisan ini.

sebagian kecil Etnis Madura. Etnis yang kebanyakan diklaim sebagai warga asli yang merujuk pada Etnis Betawi pada kenyataannya sangat sedikit dan malah kebanyakan direpresentasikan oleh etnis lain (contoh: orang dari Suku Jawa, Bugis, dan lain-lain) yang lama tinggal di Jakarta. Keberagaman masyarakat di wilayah ini juga diramaikan adanya golongan masyarakat Cina Peranakan² yang telah lama tinggal dan menjadi salah satu golongan masyarakat tersendiri dalam kehidupan sosial wilayah Penjaringan. Golongan Masyarakat Cina Peranakan ini agaknya saya pisahkan dari etnis pribumi asli Indonesia, karena dalam sejarah persebaran dan identitas berawal dari akar yang jelas berbeda. Kaum Cina di wilayah ini bermukim di daerah-daerah pecinan yang terbentang antara daerah Tanah Pasir sekitarnya dan ada juga yang berdomisili di bercampur di daerah-daerah mayoritas pribumi. Kebanyakan dari mereka adalah golongan orang kaya di Penjaringan, meskipun ada juga beberapa diantaranya adalah kaum miskin. Sulit untuk membedakan mereka sebenarnya dalam segi finansial, karena masing-masing bekerja di sektor perdagangan yang menurut saya relatif bila dijelaskan stratifikasinya. Hal ini dikarenakan banyaknya bos-bos Cina Peranakan -disebut *Toke*- hidup terlihat sederhana namun memiliki kekayaan berlimpah. Beberapa dari mereka yang sudah sangat berbaur dengan masyarakat walaupun kaya juga sangat dekat interaksinya dengan para kelompok etnis pribumi.

Dalam kehidupannya di wilayah Penjaringan pada masa sekarang, masyarakatnya terkesan berbaur satu dengan yang lainnya dengan merepresentasikan diri mereka secara umum sebagai Warga/Orang Penjaringan. Dalam satu situasi

² Sebagai catatan, pada bagian ini saya agak membedakan golongan Cina peranakan dengan golongan-golongan etnis pribumi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam rentang sejarah representasi pada mereka masih beragam, walaupun sudah sangat berbaur.

terkadang memang masih ditemukan adanya beberapa bentuk pengelompokan etnis tertentu (Etnis Bugis/Makassar, Etnis Madura) yang tak lebih dikarenakan faktor kedekatan spasial/tempat tinggal dan situasi kultural tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam contoh bagaimana Mayoritas Etnis Bugis dan Makasar hidup di daerah Kampung Luar Batang dan Muara Baru sedangkan Etnis dari Jawa Tengah dan Timur kebanyakan tinggal di daerah Tanah Pasir. Sementara sebagian kecil Etnis Madura yang kebanyakan berjualan besi tua memilih untuk meninggalkan daerah sekitar kolong tol. Pengelompokan ini biasanya terjadi dikarenakan adanya keterikatan kesamaan asal (primodial) –salah satu contoh situasi kultural- mereka sebagai pendatang, sehingga sesekali timbul rasa saling memiliki dan keinginan membantu dalam menghadapi kehidupan. Dengan tinggal berdekatan setidaknya mereka bisa saling membantu dan meringankan beban sesamanya, terlebih bagi mereka yang baru bermigrasi. Suatu bentuk kompilasi sosial seperti ini memang nyata dilakukan para pendatang dari sesama kelompok etnis yang bermigrasi di wilayah ini –Jakarta pada umumnya- sejak jaman dahulu.

Walaupun beberapa daerah ditinggali oleh kelompok etnis tertentu, dalam keyataannya tidak ada yang benar- benar homogen sebagai satu kelompok etnis dalam satu daerah di wilayah Penjaringan. Masyarakatnya tetap heterogen dalam kehidupan sehari-hari di wilayah ini. Semisal di daerah Muara Baru dan kampung Luar Batang yang kebanyakan ditinggali Etnis Bugis/ Makasar, pada kenyataannya juga banyak ditinggali Kelompok Etnis Banten, Etnis Jawa,dll. Golongan Cina peranakan juga mulai ada yang menetap secara permanen -bercampur -bahkan terkadang sulit dibedakan- di daerah yang kebanyakan ditinggali masyarakat pribumi. Selalu masih ada beberapa kelompok etnis lain yang berbaur dalam keseharian interaksi mereka.

Lebih lama saya menyelami Wilayah Penjaringan adalah permulaan bagi pribadi saya dalam memasuki kehidupan manusia yang terkesan sangat kompleks dalam kehidupan. Menjadi demikian dalam pemahaman, sebab realitas kehidupan

Penjaringan dimaknai masyarakatnya dengan wujud interaksi dalam keberagaman manusia yang hadir di wilayah ini. Seperti keadaan berkumpulnya manusia dari segala asal dan muasal di tempat lain, wilayah ini kemudian menemukan keselarasan kehidupan dalam perjalanan yang penuh liku. Masyarakat mengembangkan pemaknaan tentang kehidupan dengan berbagai logika kebudayaannya masing-masing yang terkadang menimbulkan eksistensi (identitas) individu dan kelompok etnis/ras. Atau dengan kata lain terdapat kompleksitas interaksi dalam pemaknaan kehidupan antar manusia di wilayah ini.

Beberapa hal yang terjadi di wilayah ini dalam pengalaman, kemudian coba saya ketengahkan untuk mendapat gambaran tersebut. Semua ini berawal di malam hari itu saat semua orang kebanyakan sudah tertidur. Pada saat saya sedang duduk di sebidang bangku tempat biasa warga berkumpul sambil ditemani seorang teman. Tiba-tiba dari arah sebelah timur datang orang beramai-ramai dengan raut emosi hendak menghampiri rumah seseorang di dalam gang. Melihat keramaian itu saya mencoba menghampirinya dengan teman saya tersebut untuk mengetahui ada apa gerangan yang terjadi. Tak lama berselang masuklah beberapa orang dari kerumunan tadi ke rumah yang dituju dan tak lama keluar lagi, namun kali ini dengan seorang dua pemuda usia tanggung yang terus menundukan mukanya. Kerumunan orang ini kemudian pergi dengan diiringi seorang Ibu yang tampak kesedihan memandangi kepergian kedua orang itu.

Setelah saya mencoba bertanya dengan salah satu orang di kerumunan –pada ke esokan harinya saya juga mewawancarai warga sekitar- itu ternyata telah terjadi peristiwa perkelahian sebelumnya yang melibatkan kedua orang tadi. Kedua pemuda tadi bersama sesamanya dari kelompok Etnis Banten berkomplotan memukuli seorang di arena tempat bilyard, dikarenakan tidak terima salah satu temannya dipukuli orang tadi. Korban yang sendirian dikeroyok ini pun habis babak belur namun masih sempat lari ke pekarangan warga yang tinggal tidak berjauhan dari lokasi arena tempat bilyard tadi. Para warga yang tidak terima dengan adanya

keributan, lalu berlarian untuk berusaha menolong dengan mengusir sang pengeroyok dan membawanya kemudian langsung ke pos RW. Sesampainya di pos RW, si korban ditolong dengan di beri obat pada luka di mukanya dan sambil meringis kesakitan dia bercerita tentang kronologis kejadian. Pada kenyataannya dia tidak mengetahui duduk persoalan sebenarnya mengapa ia dipukuli, dia hanya sedang bermain bilyard lalu kemudian dipukuli. Setelah akhirnya mendapat pengakuan dari korban, akhirnya warga sampai pada satu kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan pahaman yang fatal. Hal ini juga dikuatkan pada kenyataannya si korban yang juga bukanlah warga Penjaringan karena dia berprofesi sebagai supir truk dan memang sengaja singgah untuk beristirahat. Para pengeroyok memang telah salah sasaran.

Melihat gelagat amarah warga, maka Ketua RW setempat langsung memutuskan untuk mencari para pengeroyok, dimana kebetulan beberapa warga mengenalinya. Setelah berkordinasi dengan warga lainnya, akhirnya segerombolan warga berjalan kaki mencari beberapa pelaku pengeroyokan dengan langsung menjemput di rumahnya dan membawanya ke pos polisi. Mereka memang tidak berniat memukuli pelaku yang tertangkap³, karena dari awal sudah direncanakan untuk diserahkan langsung pada pihak Polisi untuk ditahan sementara waktu di sel.

Setelah malam itu berlalu, pada keesokan paginya saya bangun dengan kembali dikejutkan oleh kerumunan orang seperti tadi malam di jalan depan rumah yang saya tinggali. Setelah saya bertanya dengan penjaga warung, ternyata kerumunan ini adalah sanak keluarga –dari Etnis Banten juga- dua orang pemuda Banten yang semalam diringkus oleh warga. Pada kenyataannya mereka yang datang ini juga bukanlah warga sekitar melainkan orang dari luar perkampungan ini dan ada juga diantaranya yang merupakan aparat militer. Kedatangan saudara mereka ketika saya ketahui lebih lanjut ternyata ingin menyelesaikan permasalahan dengan warga

³ Sebagian dari pelaku pengeroyokan telah kabur setelah melancarkan aksinya. Sementara yang tertangkap adalah mereka yang mukanya dikenali oleh warga sekitar karena memang tinggal tidak jauh dari tempat bilyard tersebut.

sekitar (dari beragam etnis) yang terpancing oleh ulah sekelompok pemuda dari Etnis Banten semalam. Selain untuk menyelesaikan masalah, mereka juga menginginkan agar urusannya cekcok semalam tidak diperpanjang ke kepolisian agar kedua pemuda Banten tadi bisa keluar dari penjara. Setelah beberapa peristiwa dalam durasi tiga hari dari mulai malam peristiwa pengeroyokan dan kedatangan para kerabat pelaku pada keesokan harinya. Akhirnya masalah selesai di hari ketiga saat lobi para kerabat pelaku akhirnya berhasil meyakinkan warga yang akhirnya mencabut tuntutan di Polisi dan akhirnya membebaskan pelakunya. Kejadian ini pada akhirnya menguap menjadi cerita dari mulut ke mulut, seakan tidak ada dendam pada hari yang berlalu dalam keseharian saya mengamati wilayah ini. Warga setidaknya telah memaafkan secara tidak langsung, walaupun kebanyakan dari mereka tau bahwa si pelaku berbuat kesalahan fatal.

Dalam pengalaman saya tadi, rasanya kita dapat melihat di permukaan bagaimana bentuk pengelompokan etnis secara kultural terjadi di wilayah ini, suatu bentuk aliansi (pengelompokan) etnis yang dikembangkan dalam konteks kultural tertentu. Namun apabila kemudian ditarik lebih jauh maka peristiwa ini setidaknya dapat menunjukkan corak khas kehidupan sosial wilayah ini. Satu hal yang khas karena didalam kompleksitas interaksi masyarakatnya, kehidupan atau ruang dan waktu di Wilayah Penjaringan mewujud melalui negosiasi yang mutlak dikembangkan dalam segala konteks. Negosiasi disini tidak diartikan sempit sebagai perbincangan beberapa manusia seperti layaknya konferensi besar yang berjalan tertib dan keras dalam berargumen namun mengenal batasan dalam berselisih pendapat. Semacam pertemuan yang sangat berusaha menghindarkan konflik dan pastinya menjanjikan tanpa adanya kekerasan fisik. Negosiasi di Wilayah Penjaringan dalam pandangan saya mendobrak kekakuan dan tatakrama palsu layaknya pengertian umum tersebut. Satu hal yang menjadi demikian karena tidak menutup kemungkinan terdapat unsur-unsur yang erat dengan kolusi dan konflik di dalam setiap proses negosiasi tersebut. Mereka dapat dikatakan dengan sadar melakukan konflik

kekerasan namun tidak sadar sedang dalam proses membentuk integrasi diantara mereka. *Integration of the unconscious with the conscious.*

Apabila kita menghubungkannya dengan cerita di atas, sangat terlihat bagaimana kolusi para pemuda yang diakhiri dengan konflik dengan korban yang dipukuli adalah reaksi tidak terima mereka akan peristiwa pemukulan rekan –sesama etnis pula- sejawat mereka. Saya memahami apa yang mereka lakukan adalah dikarenakan eksistensi dan harga diri mereka yang terganggu sehingga timbul keinginan untuk membalasnya. Membalas disini bukan berarti menaklukan atau menghancurkan namun hanya diartikan untuk “menegakan” kembali posisi mereka, merekonstruksi ulang harga diri mereka yang sesaat terengut. Bagaimana para kerabat pelaku berkumpul melakukan kolusi atas nama Etnis Banten juga dapat menjadi contoh bagaimana kepedulian mereka terhadap sesamanya yang sedang terkena masalah. Satu hal yang membedakan disini adalah kolusi para kerabat tidak berujung akhirnya pada konflik dengan warga sekitar namun terselesaikan dalam perbincangan antar mereka, dengan kata lain mewujudkan dalam silaturahmi. Hasilnya apa yang dilakukan pelaku dan para kerabatnya terbukti pada akhirnya tidak menimbulkan konflik berkepanjangan, penindasan yang seakan tiada henti. Masyarakat sekitar akhirnya memaafkan kelakuan pelaku dan berusaha melupakannya dari ingatan mereka. Suatu bentuk ketercairan kehidupan sosial di wilayah ini yang menunjukkan dimana pada akhirnya kesemua pihak paham, terpuaskan dan tidak memunculkan dendam.

Kolusi dan konflik di dalam wilayah ini kembali saya tekankan adalah satu bentuk negosiasi di antara masyarakat karena pada kenyatannya tidak berusaha menaklukan satu pihak, namun menghadirkan bentuk kesepakatan di antara mereka. Satu corak khas yang membentuk kehidupan sosial wilayah ini sehingga bagi saya lebih menyenangkan bila disebut sebagai negosiasi kultural. Suatu bentuk kehidupan yang mewujudkan sebagai kesepakatan sesaat yang ternegosiasikan, lahir karena diawali oleh adanya ketidakpahaman diantara mereka.

2.4. Ruang, Waktu dan Pemaknaannya

Setelah melihat paparan di atas kita setidaknya sampai dalam gambaran umum tentang kehidupan sosial wilayah ini. Setidaknya dapat dikatakan bahwa perjalanan ruang dan waktu Wilayah Penjaringan dibentuk oleh andil satu kekuasaan yang lestari pada setiap masanya. Satu pusaran kekuasaan besar yang tentunya pongah.

Masing-masing Kekuasaan diibaratkan sebagai gerbang masa yang membawa perjalanan wilayah ini dalam kehidupannya tersendiri. Sangat berbeda coraknya dalam masing-masing era, namun memiliki kesamaan kepentingan dalam usaha menggenggam seutuhnya kehidupan wilayah ini. Kekuasaan juga seakan memaksakan porsi tersendiri sebagai pengaruh dalam kehidupan sosial yang pada dasarnya selalu bertujuan melegitimasi satu nilai di luar ruang pemaknaan kawasan Penjaringan. Nilai ini bisa dikatakan sebagai pemaknaan baru, dibawa kekuasaan dengan diawali satu bentuk penaklukan dan kecemasan yang dipelihara pada perkembangannya nanti. Selalu saja ada yang tenggelam, tertindas dan terlupakan di dalam pusaran ini. Suatu transformasi yang tentunya berdarah-darah, menyakitkan bagi yang berposisi dan terkalahkan dalam perjalanannya.

Jalan satu kekuasaan di Wilayah Penjaringan dari masa ke masa pada akhirnya tidak dapat dilambangkan sebagai satu bentuk struktur kaku dan mengekang secara tetap, walaupun masih ada beberapa bentuk kontinuitasnya pada masa sekarang. Selain harus hilang tergerus oleh para penakluk sesudahnya, semua itu terjadi dikarenakan pada akhirnya kekuasaan harus bersanding dengan wujud negosiasi kultural dalam kehidupan sosial.

Kekuasaan yang dimulai dari bentuk penaklukan dan negosiasi kultural yang dikembangkan masyarakat memang dua hal berbeda dalam kehidupan sosial wilayah ini. Menjadi demikian karena pada dasarnya kehidupan di penjaringan berpusat di satu sisi pada kekuasaan dan di sisi lain pada terbentuk dalam pencapaian

kesepakatan kebudayaan yang dinegosiasikan. Keduanya adalah dua hal yang pada kenyataannya bersebrangan dalam representasinya namun memiliki kesamaan sebagai proses pembentukan kehidupan. Kedua hal ini juga tidak berjalan sendiri karena tidak menutup kemungkinan saling bersinggungan dalam perkembangan kehidupan sosial wilayah ini nantinya. Seperti yang dinyatakan oleh Clifford Geertz, kebudayaan bukan sesuatu yang berada di dalam benak kepala manusia, melainkan terwujud di dalam simbol yang publik, di dalam mana anggota masyarakat tertentu bisa mengkomunikasikan orientasi nilai, pandangan hidup, dan etos satu sama lain. Di kehidupan Wilayah Penjaringan, simbol –pengertian Geertz- mewujud salah satunya dalam bentuk kekuasaan dan negosiasi kultural ini. Dengan kekompleksitasan keduanya kehidupan di wilayah ini mendapat nyawa, kontinuitas dan tentu gambarannya. Keduanya merupakan simbol yang berfungsi sebagai lembaga pemaknaan (*vehicle of meaning*) manusia-manusia yang ada di wilayah ini. Satu jalinan kehidupan yang dibentuk pemaknaannya dalam interaksi antar mereka.

Bila kita mau mencoba menelusuri hamparan realita wilayah ini, sedemikian akhirnya saya rasa harus disajikan dari masa ke masa. Kesemuanya menjadi penting, agar kita dapat melihat bagaimana simbol kehidupan sama-sama meruang dan mewaktu. Terjelaskan sebagai proses mewujudnya kehidupan di wilayah Penjaringan. Tidak saja hanya kekuasaan dan negosiasi kultural, namun juga simbol kehidupan lainnya yang nyata akan juga nampak dalam penjelasan tersebut dari masa ke masa. Terlukiskan sebagai representasi simbolis yang objektif tentang anak manusia.

Saya tidak mau terjebak dalam kesalahan para etnolog lama yang senang berbicara tentang segala sesuatunya yang sudah tersusun. Terstruktur secara fungsional atau terstruktur dijabarkan secara linguistik. Terstruktur menurut saya adalah jebakan pemikiran yang harus dihindari dalam tulisan ini. Penting dilakukan agar tidak melupakan apa yang tekstual dari kehidupan wilayah ini. *“Padahal, di hadapan para penyusun etnografi, ideologi dan lain-lain yang muncul itu adalah bagian dari teks budaya yang ditafsirkan dalam ulang tafsir berkali kali, baik oleh para ahli maupun oleh orang awam”*(Mohamad2011:11-12). Proses adalah

penjelasan yang harus nyata dalam tulisan, karena dengan begitu interpretasi wilayah ini tidak akan melawan sifat tektual dari kebudayaan.

Sebagaimana saya mulai petualangan dalam tulisan ini, maka perlu saya mengingatkan bahwa kekuasaan dan negosiasi kultural adalah penjelasan yang masih dipermukaan. Awal sekali bagi suatu pemaknaan kehidupan sosial di wilayah ini yang melekat sebenarnya dengan makna lainnya. Bagaimana itu semua nantinya saling mengkait –Kekuasaan, negosiasi kultural dan simbol-simbol lain - dan membentuk kehidupan sosial wilayah ini adalah jawaban tersendiri yang akan saya jabarkan pada akhirnya. Namun ada baiknya sebelum itu semua terlukis secara tersirat dan tersurat, ijinkan saya sebagai penulis mulai merenda masa-masa yang terekam sebagai realita yang terwujud, sehingga pada akhirnya pembaca mendapatkan satu untaian cerita indah mengenai proses kehidupan yang merupakan bentukan alam sosial dan tentunya kesadaran umat manusia.

BAB III

PROSES PEMBENTUKAN WILAYAH PENJARINGAN

3.1. Masa-Masa Pembentukan

Layaknya goresan sejarah yang dalam dan terlupakan. Wilayah Penjaringan pada masa lalu merupakan satu nama yang tak bermakna, belum mewujud dalam kehidupan dengan kenyataan. Sebagian besar wilayahnya masih berupa rawa-rawa dan walaupun ada daratan, semua kemudian menunjukkan keterikatannya sebagai bagian dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Secara kultural kehidupan wilayah ini memang dibentuk dengan keterikatan eratny terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga menyebabkan berbicara mengenainya dari masa ke masa seakan memang harus ditarik dalam runutan perjalanan pelabuhan ini.

Secuil kehidupan bermula dalam keheningan dan harapan, begitulah gambaran awal kehadiran Pelabuhan Sunda Kelapa. Diawali rencana Kerajaan Sunda/Pajajaran yang bernafaskan Hindu -memiliki mata pencaharian utama dari bidang pertanian- untuk meningkatkan devisa dari sektor perdagangan bahari, bandar pelabuhan ini kemudian dibangun. Sejak didirikan kemudian dengan pelabuhan lainnya- pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Cimanuk-, Pelabuhan Sunda Kelapa memang kemudian paling berkembang dan berhasil memenuhi ekspektasi tersebut. Di masa kejayaannya tersebut, pelabuhan ini bahkan menjelma sebagai urat nadi terpenting dalam kancah perdagangan Nusantara (embrio Bangsa Indonesia). Selain melayani perdagangan internal, dalam urusan luar negeri Pelabuhan Sunda Kelapa juga berperan penting dalam perdagangan dunia yang terhubung melalui “Jalur Sutra”. Jalur sutra merupakan satu rute perjalanan antara timur dan barat pada awal tarikh Masehi sampai sekitar abad 16 yang dihubungkan dalam konteks perdagangan dunia. Rute perdagangan ini merupakan panduan bagi para muallim dan saudagar di seluruh dunia untuk melakukan perdagangan yang terpusatkan pada

pelabuhan suatu negara. Di nusantara (timur) Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi salah satu dari sebagian kecil pelabuhan yang ikut berperan menjalankan kepentingan ini. Majunya pelabuhan ini secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh beberapa peristiwa seperti kejatuhan malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Hal ini kemudian sangat berpengaruh karena menyebabkan para pedagang yang beragama Islam (Arab) enggan berhubungan dengan para pengusaha Portugis yang beragama Kristen. Kebanyakan dari mereka –pedagang arab- akhirnya mengalihkan perdagangannya dari selat Malaka ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Para penguasa Portugis yang mengerti situasi ini disatu sisi juga enggan berhubungan dengan pedagang Arab dan lebih memilih berdagang dengan saudagar beragama Hindu yang kebanyakan tersebar di Nusantara(Burger 1962: 44-45 dalam Ongkodharma 1995).

Dengan berkembang pesatnya Pelabuhan Sunda Kelapa sedemikian rupa menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik tersendiri bagi semua pihak yang menyadarinya. Diibaratkan gula yang manis, kemajuannya membuat manusia berbondong-bondong datang untuk sekedar mencicipi keuntungan ekonomis dan harapan penghidupan yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka yang berdatangan ini kemudian bekerja sebagai pedagang, pelaut, dan lain hal yang berhubungan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa tentunya. Arus masuk para pendatang yang secara terus menerus bertambah membuat banyak diantara mereka -Kelompok Etnis dari Nusantara dan Kelompok Ras lainnya ini- kemudian memutuskan untuk menetap di wilayah ini. Pada perkembangan selanjutnya mereka kemudian beranak-pinak dan berinteraksi dengan sesamanya dalam menegosiasikan kehidupan sosial wilayah ini. Para kelompok pendatang yang memutuskan hidup di wilayah ini merupakan para pionir bagi berdirinya keberagaman kehidupan sosial di wilayah daratan sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa.

3.2. Awal Mula Jalan Penaklukan

Berkembang pesatnya Pelabuhan Sunda Kelapa pada kenyataannya membuat banyak pihak silih berganti bernafsu untuk menguasainya. Kekuasaan kerajaan Sunda/Padjajaran di pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian memang mulai goyah dengan hadirnya ancaman dari penguasa Islam yang ingin melebarkan pengaruhnya. Pada masa itu kerajaan Hindu-Jawa memang sedang mendapat tekanan yang cukup keras dari para Penguasa (khususnya Jawa Tengah) yang baru memeluk Islam¹. Kehadiran mereka yang terwakilkan dengan persekutuan antara Kerajaan Demak dan Cirebon merupakan ancaman yang sangat besar, mengingat begitu strategisnya wilayah ini bagi Kerajaan Padjajaran.

Peran Portugis sebagai pihak luar pada episode ini kemudian menjadi penting dikarenakan adanya perjanjian antara Raja Pajajaran dengan pihaknya (Portugis) untuk bersekutu melawan invasi pengaruh Islam tersebut. :

“Guna mempertahankan keberadaan Sunda Kelapa dalam Kekuasaan, Raja Pajajaran mengadakan perjanjian dengan Portugis yang ditandatangani oleh beberapa wakilnya di antaranya Mandaritado (Menteri), Tamungo Sanguede Pete (Tumenggung), Sam Angry Deputy (Sang Adipati) serta pejabat pabean.”(Majid,1995,hal. 80)

Dalam perjanjian ini tertulis dengan jelas Portugis diperbolehkan untuk membangun sebuah loji yang dipersenjatai, dipersilahkan membeli lada (276 kantong masing-masing @ 5,5 potong, yaitu 17.112pon @ 9 sen), dan menjanjikan persediaan yang banyak pada masa yang akan datang (1000 kantong setahun)(Hanna 1988:7). Keberlanjutan dari perjanjian ini memang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 1526 bala tentara Demak dan Cirebon dibawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati dan putranya Sultan

¹ Keadaan yang kacau ini juga diperparah keretakan internal antara Penguasa di Sunda Kelapa dengan Sultan Banten yang dimana masing-masing saling berkonfrontasi juga memanfaatkan momen- momen menuju kejatuhan Kerajaan Pajajaran untuk setidaknya mengambil alih kekuasaan di daerah masing-masing .

Hasanuddin telah berhasil menguasai daerah Banten yang notabene juga merupakan daerah Kerajaan Padjajaran. Penguasaan ini diyakini banyak pihak merupakan kekalahan awal bagi Kerajaan Padjajaran karena merupakan batu loncatan untuk menguasai Sunda Kelapa, bandar dagang mereka yang sangat menguntungkan.

Pada tahun 1527 invasi terhadap Sunda Kelapa benar-benar terjadi, dipimpin langsung oleh Fatahillah (Falatehan) pelabuhan ini benar-benar jatuh ke dalam kekuasaan penguasa Islam dari Demak dan Cirebon yang sudah terlebih dahulu menguasai Banten. Bala bantuan dari Portugis yang dipimpin Fransisco de sa tidak dapat berbuat banyak dikarenakan beberapa kapalnya yang karam dipantai utara Jawa Barat dan beberapa tentara sisanya yang dikalahkan dengan sangat mudah (Djajaningrat 1993: 74 dalam Majid1995). Peristiwa ini merupakan titik awal jalan cerita penaklukan wilayah Sunda Kelapa yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta (Kota yang Jaya) oleh Fatahillah. Dalam ketetapan para sejarawan peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527, dimana kemudian dijadikan sebagai hari jadi Jakarta pada masa kini (Sukanto,1977,hal.II).

Setelah berhasil ditaklukan maka keberadaan Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian masuk sebagai wilayah bawahan dari pusat kekuasaan Kerajaan Islam Demak/Cirebon. Posisi pelabuhan ini kemudian diatur sebagai bawahan Pelabuhan Banten dengan kewajiban tetap menyerahkan upeti. Hal ini kemudian jelas menjadi suatu bentuk kemunduran bagi keberadaan Pelabuhan Sunda Kelapa karena kegiatan perdagangannya yang serta-merta berpindah ke daerah Banten. Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian hanya menjelma sebagai tempat transit bagi para pelaut yang ingin mengisi persediaan air bersih (fasilitas yang tidak dimiliki pelabuhan Banten) atau bahan makanan(Colenbrander,1898,hal.184-189 dalam Ongkodharma1995). Arak yang dibuat dan diperjual belikan oleh pedagang Cina juga merupakan satu komoditas yang paling digemari dan menjadi alasan para pelaut yang singgah di Pelabuhan Sunda Kelapa(Lasmidjah dkk.1987:51: Hanna1988: 3-4).

3.3. Kedatangan Kolonial Eropa (Belanda dan Inggris)

Jejak perjalanan Pelabuhan Sunda Kelapa pada masa selanjutnya, kemudian menunjukkan kebangkitan kembali sebagai sentral dagang terpenting di dunia . Hal ini jelas nyata diawali pada saat kedatangan Bangsa Eropa dari Belanda dan Inggris yang tertarik untuk mengungkap kekayaan nusantara. Ramainya kedatangan para penjelajah dari Eropa jelas tentu dikarenakan kebutuhan mereka yang mendesak akan rempah-rempah. Kebanyakan dari mereka juga tergiur akan pencitraan nusantara yang digembor-gemborkan oleh para penulis pada zaman itu. Salah satu tulisan yang terkenal -selain dari petualang portugal bernama Toma Pires- adalah cerita deskripsi tentang Nusantara yang digambarkan sebagai satu negara yang kaya akan hasil Bumi berjudul *Itinerario naer Oost ofie Portugaeis Indien* (diterbitkan dalam bahasa Belanda dan Inggris) karangan Jan Huygen van Linschoten. Linschoten adalah seorang Belanda yang bekerja dalam pelayaran untuk Portugis di Nusantara². Akibatnya dari adanya buku ini bangsa Eropa yang kesusahan mendapatkan rempah-rempah akibat monopoli pedagang Arab di Venesia (tepatnya disekitar laut tengah) kemudian berlomba-lomba mempersiapkan armadanya untuk mengadakan pelayaran ke Nusantara(Ricklefs1989:32).

Awal kedatangan mereka di Nusantara dimulai oleh sekelompok penjelajah dan pengusaha yang mewakili negaranya masing-masing, seperti Laksamana Cornelis de Houtman(1595-1597) dari Belanda dan James Lancaster(1591,1601), serta beberapa negara Eropa lain seperti Prancis, Denmark dengan pelaut mereka masing-masing. Keadaan kemudian berubah di saat mereka merasa perlu menghindari persaingan antara pedagang dari satu negara yang sama sehingga masing-masing kemudian membentuk kongsi dagang sendiri. Belanda kemudian menamai kongsi dagang itu sebagai VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Keberadaan

² Bangsa Portugis memang terlebih dahulu hadir di Nusantara namun kehadirannya masih berpusat di daerah timur seperti Ambon.

kongsi dagang ini tak ubahnya dibentuk sebagai perwakilan penguasa negara asal di Nusantara, menghindari persaingan dan pada perkembangannya membentuk monopoli dagang untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

Hadirnya kolonialisme barat pada masa ini di nusantara merupakan satu wadah tersendiri bagi arus interaksi sosial terutama dalam hal perdagangan, dimana VOC mengambil peran penting didalamnya. VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) adalah satu kongsi dagang yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tahu 1602 dengan maksud mengatur segala usaha perdagangan Belanda dan akhirnya mengusahakan penaklukan terhadap Nusantara (monopoli dagang salah satu caranya). Gubernur pertamanya adalah Pieter Both dengan wilayah penguasaan berkisar antara Indonesia timur (Ambon, Ternate, dll) dan Banten. Pada masa itu Pieter Both mendapat instruksi secara khusus dari Herren XVII (Tuan-tuan bertujuh belas, Direktur dari VOC) untuk mencari satu lokasi bagi pangkalan baru mereka yang kuat atau pendek katanya mereka ingin membangun suatu Rendezvous (pelembut bagi istilah istana, benteng atau tempat kolonialisasi). Menurut mereka hal itu perlu dilakukan karena sudah merasa terusik oleh pemberontakan warga pribumi dan saingan mereka dari Eropa (khususnya Inggris) di beberapa daerah usaha seperti Banten. Kelanjutan dari cerita ini adalah kemudian dikirim beberapa kapten Belanda dan penjelajah yang berpengalaman untuk melakukan pencarian di beberapa wilayah, dimana pada akhirnya setelah ketidakpastian dan pergulatan yang panjang diputuskanlah Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai tempat yang paling pas untuk mengakomodir rencana mereka (Hanna, 1995, hal. 16-17). Gubernur VOC pada masa pemerintahan di Sunda Kelapa berpindah tangan dari kepemimpinan Pieter Both dan Laurens Reaal ke Jan Pieterszoon Coen (J.P. Coen) seorang yang pada nantinya merupakan tokoh utama dalam kegemilangan Pelabuhan Sunda Kelapa dalam masa kolonialisme Belanda.

Pada awal kedatangan Belanda di Sunda Kelapa atau yang waktu itu sudah berganti nama menjadi Jayakarta, wilayah ini sudah sepenuhnya dipegang oleh

kerajaan Islam di Jawa³. Dengan berstatus sebagai vasal kerajaan Banten, pada masa ini (Abad 17) Jayakarta dipimpin oleh adipatinya yang bernama Pangeran Wijayakrama. Untuk melegitimasi kekuasaannya, Belanda pada saat pertamakali masuk ke wilayah Sunda Kelapa langsung mengadakan kontrak dagang dengan Pangeran Wijayakrama. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Nopember 1610 -dari Belanda diwakili Jacques L'Hermite- dan kemudian untuk kontrak pembaharuan perdagangan serta pendirian bangunan diwakilkan oleh Pieter Both ("Coninck van Jacaatra") pada tanggal 28 Januari 1611(Lohanda,1995,hal.96). Pada perjanjian yang terakhir terlihat jelas Belanda pada awal kedatangannya tidak dianggap sebagai ancaman karena tidak saja diperbolehkan mengadakan perdagangan namun juga dengan begitu saja dipersilakannya membangun bangunan atau yang lebih suka mereka sebut *Huis* (rumah) di pinggir kampung Cina.

Keadaan ini memang tidak berjalan lama, karena pada satu masa riak-riak pertentangan antara Belanda dengan Pangeran Wijayakrama semakin meruncing dikarenakan rencana pembuatan bangunan mereka yang menjurus sebagai benteng pertahanan, melenceng dari perjanjian awal yaitu sebagai rumah atau gudang semata (*Factorij*). Belanda pada saat itu memfokuskan bangunannya dengan mempertingginya hingga mirip benteng dan mempersenjatai setiap sudutnya dengan meriam (cikal bakal Kasteel Jakarta). Tidak hanya itu Belanda kemudian membangun pulau-pulau kecil di sekitar Sunda Kelapa/Jayakarta seperti pulau Onrust dan Kyper lengkap dengan pangkalan angkatan laut,tempat perbaikan kapal dan sarana pendukung lainnya tanpa memberi tahu Pangeran Wijayakrama terlebih dulu. Hal ini jelas sudah membuat murka penguasa Jayakarta di satu sisi namun di lain pihak dia juga agak terkesan membiarkannya dengan maksud agar pihak Belanda nantinya dapat membantu dirinya saat datang invasi dari kerajaan Mataram.

³ Pada bagian ini penulis lebih menggunakan kata kerajaan Islam di Jawa karena puncak kekuasaannya membingungkan apakah berada di Demak atau Cirebon.

“Akan tetapi ia tampaknya senang melihat persiapan-persiapan yang telah diambil pihak Belanda untuk membantunya, andaikata Mataram mengadakan penyerangan, dan ia pun menawarkan uang muka sejumlah 500 ringgit sebagai tambahan pembiayaan pekerjaan –pekerjaan itu” (Hanna, 1995, hal. 24-26)

Walaupun agaknya senang dengan kemungkinan aliansinya dengan Belanda dalam menghadapi Mataram, namun secara keseluruhan kemurkaan Pangeran Wijayakrama lebih tampak. Bentuk kemurkaan yang ditunjukkan Pangeran Wijayakrama dilakukan dengan setidaknya mendukung hadirnya perusahaan dagang Inggris dengan memperbolehkan mereka mendirikan Loji yang bersebrangan dengan loji dagang (*Huis*) VOC dan mengadakan kerjasama dalam bidang penguatan pertahanan kota. Tak hanya sampai disitu, Pangeran Jayakarta juga menyambut kedatangan armada Inggris pimpinan Sir Francis Dale dan Kapten Christopher Pring yang sedang menjelajahi nusantara dan menganggap mereka sebagai sekutu dalam menghadapi Belanda. Keadaan ini memang merupakan kenyataan dari kekhawatiran Belanda selama ini akan posisi mereka yang terusik di Nusantara sehingga memilih Sunda Kelapa/Jayakarta sebagai pangkalan.

Pada akhirnya pertentangan antara Pangeran Wijayakrama, Belanda, dan Inggris akhirnya memang mencapai pada satu bentuk yang antiklimaks yaitu kaburnya J.P. Coen ke Ambon. Pertempuran antara Belanda dengan Wijayakrama dan sekutu Inggris memang akhirnya pecah. Kemudian dilanjutkan dengan pengepungan terhadap Benteng Belanda di Sunda Kelapa/Jayakarta. Pengepungan yang berlangsung ini terjadi terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan yang pasti. Masing-masing dari pihak Inggris dan Pangeran Wijayakrama saling melempar syarat penyerahan diri kepada pihak Belanda (terus dinegosiasikan) yang pada saat itu sebenarnya tertinggal sebagai sisa-sisa kekuatan yang sangat lemah (budak, Mardjiker/budak yang bebas, pegawai VOC, dll). Keadaan Belanda berada dalam kekalutan dimana situasi ini dilukiskan Hanna (hal 38-40) dalam buku “HIKAYAT JAKARTA” sebagai suasana penuh keputusasaan seolah kematian adalah kepastian bagi nasib mereka -entah di tangan Inggris atau Pangeran

Wijayakrama- yang terus dimaknai mereka dengan malah berpesta pora menghibur diri di dalam benteng. Dalam situasi ini jugalah mereka kemudian merumuskan mangganti nama Kasteel Jakatra (penggabungan antara Nassau Huis-Maurits Huis) menjadi Kasteel Batavia bagi kompleks bangunan tempat mereka berlindung dari kepungan Inggris dan Pangeran Wijayakrama dengan harapan dapat mengilhami perjuangan mereka yang terinspirasi kejayaan leluhur Bangsa Belanda, suku Batavir. Nantinya penamaan Batavia berkembang tidak hanya sebagai nama benteng tersebut namun menjadi penyebutan pada seluruh wilayah Jayakarta⁴ pada saat kekuasaan ada di tangan Belanda sepenuhnya.

Keadaan yang kacau dan bentuk kekuasaan yang tidak menentu ini kemudian diperparah dengan kegusaran Kesultanan Banten. Mereka merasa bahwa Jayakarta hanya merupakan Vasal dari kerajaannya dan tidak semestinya mengadakan pengepungan terhadap pihak Belanda. Kegusaran ini memuncak pada saat akhir tahun 1619 dimana Banten kemudian mengirimkan bala tentaranya. Pihak Belanda yang terkepung dan sebelumnya sudah sepakat untuk menyerah kemudian dihalang-halangi balatentara dari Banten. Nampaknya dari sisi ini Banten merasa dilangkahi oleh Pangeran Jayakarta dan menurut analisa beberapa ahli juga bisa dikarenakan Banten tidak menghendaki konfrontasi berbau politik yang akan berpengaruh terhadap kelancaran jaringan perdagangan mereka, karena mereka memfokuskan Jayakarta dan hubungan antara bangsa Belanda, Inggris dan lainnya hanya semata urusan kepentingan perdagangan (Ongkodharma,1995,hal.74-75). Sementara Ricklefs(1989,hal.44-45) lebih menunjukan hal ini terjadi karena Banten tidak ingin kedudukan VOC digantikan pihak Inggris yang sudah tentu bisa saja akan menimbulkan lebih banyak kesulitan bagi Banten.

⁴ Penggunaan nama Batavia sendiri sebenarnya tidak disetujui oleh J.P.Coen yang sebenarnya lebih menginginkan nama Jayakarta diganti dengan nama tempat kelahirannya *Nieuw Horn* .

Kegusaran Banten yang ditunjukkan dengan pengirimana bala tentara oleh Pangeran Aria Ranamanggala kemudian langsung mendesak pasukan Wijayakrama sampai ke arah hutan -sedangkan Pangeran Wijayakramanya ditarik kembali ke Banten⁵- dan menyebabkan Pasukan Inggris ketakutan lari ke kapal. Ketakutan pihak Inggris pada bagian ini perlu dicermati secara mendalam karena sejarah mencatat bahwa ada saatnya mereka meminta bantuan agar bisa berlindung di benteng Belanda apabila sewaktu-waktu pihak Banten berencana menyerang mereka (ketakutan belaka yang tidak terjadi). Pada bagian ini kolusi antar mereka terjadi dengan semangat identitas Barat/Eropa yang menganggapi ancaman dari negara asia (Hanna,1988,hal.35-36). Sementara itu pada saat yang bersamaan dilain pihak, para prajurit Banten bertemu pihak Belanda dan berjanji untuk membantu dengan menawarkan 4 buah jung besar untuk pemindahan karyawan dan barang VOC ke Banten. Belanda menanggapi hal ini serta-merta sebagai harapan baru (sekaligus juga rasa curiga tentunya), apalagi mereka juga mengetahui bahwa J.P.Coen dalam perjalanan menuju Jayakarta dengan membawa bala bantuan yang kuat. Situasi pengepungan yang sangat antiklimaks ini pun kemudian sesaat sirna karena bala tentara Banten menduduki kota mempersiapkan penyerahan diri Belanda yang sebenarnya memang tidak akan terjadi karena J.P.Coen kemudian datang dan memberantas mereka.

Tepat pada tanggal 28 Mei 1619 kapal berlabel “Petit Holland” yang ditumpangi oleh J.P.Coen datang dengan membawa bala bantuan yang cukup besar. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyerang tentara Banten yang menguasai kota Jayakarta. Tentara Banten menjadi satu-satunya pihak yang bisa dikalahkan karena pihak Inggris dengan pimpinanya Sir Francis Dale saat bala tentara Banten datang mengacaukan pengepungan dan mendengar isu J.P.Coen telah datang, sudah terlebih dulu pergi ke India diduga karena ketakutan. Selanjutnya dengan sikap

⁵ Penarikan Pangeran Wijayakrama ini atas perintah langsung Sultan Banten pada masa itu yaitu Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir.

agresornya J.P.Coen mengumumkan Koninkrijk Jakatra (Kerajaan Jakarta) dengan dia sebagai penguasa tertingginya dan berusaha sebaliknya mengadakan invasi terhadap Banten sebagai salah satu pembalasannya dengan berbagai cara termasuk bentuk blokade pada pesisir Banten yang sangat merugikan Kerajaan Banten. Bentuk –bentuk perluasan kekuasaan kolonialisme Belanda selama 3,5 abad di Nusantara agaknya bisa dikatakan dimulai dari pangkal peristiwa dan pertarungan mereka pada masa agresi J.P.Coen ini.

3.4.Kehidupan Kolonisasi Belanda Awal VOC (1619-1808)

Dalam masa kekuasaan Kolonial awal yang dijalankan Belanda, corak kehidupan di wilayah Sunda Kelapa/Jayakarta bisa dikatakan memasuki awal babak baru dalam pemaknaannya. Wilayah ini kemudian kembali bertransformasi sebagai faktor penting dalam satu hegemoni kekuasaan, karena dapat dikatakan merupakan tonggak awal kehadiran VOC. Dari sini VOC kemudian mereka meluaskan cakrawala kekuasaannya ke seantero nusantara, mengaturnya dalam satu tirani yang tentu pongah.

Penamaan Jayakarta di waktu ini telah berganti menjadi Batavia, dimana kawasan tersebut pada awalnya hanya membentang mengitari wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa dan Kasteel yang di pagari oleh tembok. Wilayah dalam tembok Kasteel yang biasa disebut *Intramous* merupakan pusat kegiatan Batavia dengan interaksi Kaum Eropa serta golongan elit kolonial, sedangkan daerah luar tembok yang biasa disebut *Ommelanden* kebanyakan ditinggali kaum pribumi dan kaum miskin lainnya. Kota Batavia (*Oud Batavia*) pada waktu itu ditujukan bagi kehidupan di wilayah *Intramous*, dimana dengan pengaturan kanal dan segala macam arsitekturnya yang baik kemudian dijuluki "Queen of the East" (Ratu dari Timur) atau di Belanda populer dengan sebutan "Venezia van Oost" (Venesia dari Timur). Sementara itu wilayah *Ommelanden* yang berada tepat diluar tembok kota merupakan wilayah luas yang banyak ditinggali kaum miskin dan tanahnya

dikemudian hari banyak dimiliki secara pribadi oleh orang Belanda maupun golongan masyarakat yang memiliki status tinggi.

Pada masa Kolonial Belanda, kawasan yang kita maknai sekarang sebagai Wilayah Penjaringan, selain merupakan daratan Pelabuhan Sunda Kelapa juga membentang terbagi pada wilayah *Oomelanden* dan *Intramous*. Wilayah ini di masa lalu pada bagian dalam tembok Kasteel (*Intramous*) merupakan bangunan VOC seperti gedung administrasi perniagaan pelabuhan, pasar ikan, gudang yang berfungsi untuk menyimpan hasil bumi -cengkeh, lada, buah pala, kayu manis, kayu putih, dan lain lain- untuk diekspor (sekarang Museum Bahari), dan galangan kapal VOC. Sisa-sisa bangunan ini bahkan masih dapat ditemukan pada masa sekarang -walau banyak yang terbelangkai- dimana banyak diantaranya kemudian dijadikan cagar budaya. Wilayah Penjaringan di bagian luar tembok Kastell *Oomelanden* pada masa itu merupakan rawa yang secara alami -juga buatan manusia- menjadi daratan dan kemudian berkembang sejak abad 17 sebagai tempat tinggal penduduk pribumi. Salah satu bagian yang merepresentasikan hal ini pada masa kolonial Belanda dapat dilihat dengan kehadiran Kampung Luar Batang.

Perkampungan ini pada awalnya merupakan tempat persinggahan sementara para awak (tukang perahu) pribumi yang ingin masuk ke pelabuhan Batavia (Sunda Kelapa). Ketika itu, penguasa VOC menerapkan peraturan yang tidak mengizinkan perahu-perahu pribumi masuk ke alur pelabuhan pada malam hari. Demikian juga tidak boleh keluar pelabuhan di waktu yang sama. Selain itu, seluruh perahu yang keluar masuk harus melalui pos pemeriksaan. Pos ini terletak di mulut alur pelabuhan dan di sini diletakkan batang (kayu) yang merintang di sungai guna menghadapi perahu-perahu yang keluar masuk pelabuhan sebelum diproses. Setiap perahu pribumi yang akan masuk diperiksa barang muatannya dan senjata-senjata yang dibawa harus ditiptkan di pos penjagaan. Sedangkan perahu-perahu pribumi yang tidak bisa masuk pelabuhan, ditempatkan di luar batang (pos pemeriksaan) dan harus menunggu hingga pagi harinya. Ada kalanya mereka harus menunggu beberapa hari

sampai ada izin masuk pelabuhan. Selama menunggu, sebagian awak perahu turun ke darat, kemudian mereka membangun pondok-pondok sementara. Lambat laun tempat ini dinamakan Kampung Luar Batang, yakni pemukiman yang berada di luar (batang) pos pemeriksaan.

Setelah menjadi perkampungan, penguasa Kolonial VOC kemudian sering menempatkan para pekerja yang berdatangan dari berbagai daerah untuk menetap di Kampung Luar Batang. Tercatat sekitar 1660-an, VOC mendatangkan para nelayan dari Jawa Timur dan ditempatkan di lokasi pemukiman Luar Batang. Pada tahun 1730, wilayah ini juga mulai dihuni orang Cirebon yang bertugas membersihkan mulut Kali Ciliwung dari lumpur, supaya arus kapal tidak terganggu. Berkembangnya Kampung Luar Batang pada masa selanjutnya juga disebabkan transformasi wilayah ini sebagai pusat agama Islam di Batavia. Pada waktu itu berdiri sebuah mesjid yang didirikan oleh imigran arab -tepatnya dari Hadramaut, Yaman Selatan- bernama Habib Husein Abu Bakar Al Idrus. Kehadiran mesjid yang dikemudian hari dinamakan Mesjid Keramat Luar Batang ini sangat menyedot perhatian masyarakat Batavia untuk berziarah dan sekedar meminta peruntungan. Seorang penulis Belanda bernama L.W.C van den Berg(1886) secara lugas menunjukkan betapa populernya ketokohan Habib Husein pada masa itu karena ramai didatangi dari berbagai macam golongan masyarakat –pribumi, Cina, Eurasia- untuk sekedar meminta keturunan, keberhasilan usaha, dan lain lain. Penjualan benda-benda keramatnya pun mencapai angka 8000 gulden setahunnya.

Kemunduran Kota Batavia (*Oud Batavia*) dikarenakan faktor alam juga satu hal yang perlu dicermati dalam mewujudnya Wilayah Penjaringan pada masa sekarang. Menjadi demikian dikarenakan kota dengan tembok megahnya itu memang kemudian memang jatuh dalam kegemerlapannya sekitar abad 18. Iklim laut, endapan lumpur di kanal dan kurangnya air bersih merupakan hal utama yang membuat banyak warga menderita penyakit. Angka kematian meningkat mulai dari tahun 1733 dengan jumlahnya yang berkisar rata-rata 2000-3000 orang per tahun. Mereka

merupakan korban dari tipus, malaria, disentri dan beri-beri. Kematian pada masa ini seolah menjadi berita yang santer tedengar di kalangan penduduk Kota Batavia.

Lama kelamaan masyarakat Batavia yang mulai jengah dengan kondisi kota mereka ini, kemudian mulai berpaling ke daerah pedalaman di sekitaran *Oomlanden*. Kebanyakan dari mereka yang merupakan pegawai VOC membangun *landhuis*⁶-nya masing-masing yang pada akhirnya ditinggali secara permanen. Mereka memang sangat takut akhirnya menjadi korban selanjutnya dari epidemi penyakit, terlebih kematian memang sudah menelan 14 orang anggota Dewan Hindia dan dua orang Gubernur Jendral (Dirk van Cloon, 1732-1735 dan Abraham Patras, 1735-1737). Tercatat pada pertengahan abad ke -18, pembangunan pemukiman baru mencapai wilayah luar tembok kota *Oomlanden*, tersebar di daerah yang dinamakan *Molenvliet*, *Jacatraweg*, dan *Weltevreden*. Kedatangan mereka ke wilayah kota (*Oud Batavia*) kebanyakan hanya dikarenakan urusan pekerjaan dan tentu kegiatannya di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Pelabuhan Sunda Kelapa atau yang di masa ini dikenal sebagai Pelabuhan Batavia memang tetap memegang peranan penting sebagai sumber pemasukan Belanda. Selain itu di wilayah ini nampaknya sudah terlanjur dijadikan sebagai basis ekonomi sehingga banyak Warga Eropa yang bekerja disini pada siang hari namun kemudian pulang di ke *Weltevreden* pada sore harinya. Suasana ini setidaknya dapat dilihat dalam penulis pelancong bernama Roorda van Eysinga pada tahun 1830 :

“In the 1830s Roorda van Eysinga noted the hundreds of carriages of Europeans officials and shop-peoples raising clouds of on the streets, while the Chinese, with their recognisable and unpleasant features, with their long pigtailed and silk craps, are everywhere busy hammering, sawing, painting, sewing, building, and so'on. Rich Arabs and Chinese rode through the street, half clad Javanese carried heavy loads, shabby Eurasians clerks walked beneath their sunshades to their offices, old woman sold cakes, an

⁶ Semacam vila tempat peristirahatan pada masa sekarang.

Indian sat calmly eating his rice on banana leaf, and vegetable, milk and fruits sellers, butchers and hill-dwellers offering monkey and birds all mingled together in the crowd.”

Kemunduran Kota Batavia (Oud Batavia) dengan daerah baru seperti Molenvliet, Weltevreden, dan lain lain pada masa selanjutnya memang kemudian sangat nampak dipermukaan. Hal ini semakin terlihat saat pemukiman baru ini kemudian memang lebih lagi nampak berkembang pada akhirnya saat beberapa orang berhasil mengembangkan usaha di wilayah baru tersebut.

Kota Batavia (Oud Batavia) ini memang sudah rapuh dalam hal struktural yang dicerminkan dari rusaknya kanal dan rumah serta bangunan kebanggaan mereka yang kini terbengkalai. Banyak nantinya gedung dijadikan kandang kuda atau menaruh barang rongsokan sehingga menyebabkan nilai rumah menurun drastis. Pada tahun 1779, populasi di wilayah ini hanya sekitar 12.131 sedangkan di luar tembok kota malah lebih besar dengan kisaran angka 160.986. Para pengunjung yang datang pertama kali ke Batavia bahkan banyak yang tidak sadar bahwa tempat yang mereka datangi dulu ini adalah wilayah yang paling dipuja-puja pada zaman dahulu. Gambaran mengenaskan ini kemudian dapat dilihat dalam gambaran penulis Belanda Stavorinus yang dikutip Susan Abeyasekere/Blackburn dalam bukunya JAKARTA A HISTORY :

“Stavorinus, describing Batavia in the 1770s, commented on the depopulation of the city: ‘The Houses in which the great merchant dwelt, their counting-houses where they carried on business, and the warehouses which received their immense stock of merchandise, are now either deserted or untenanted, or changed into stables or coach-houses.’”

Walaupun kegiatan ekonomi masih semarak berdetak menghidupkan kota di siang hari, namun tetap terlihat kemundurannya bila ditinjau dari aspek kehidupan sosialnya. Wilayah ini memang seakan seolah mendapat pemaknaan baru, terlihat jelas dengan mulai tumbuhnya pemukiman masyarakat golongan miskin didalamnya. Sejarah mencatat wilayah kota (Oud Batavia) dengan bangunan-bangunan kosongnya

kemudian malah banyak didiami orang Meztiso dan cina yang miskin. Pemukiman pribumi secara kecil-kecil pun kemudian mulai bertumbuhan dan bahkan mulai masuk ke wilayah kota, berbaur dengan masyarakat golongan miskin lain. Kebanyakan dari mereka memang buruh/pekerja kasar Pelabuhan Batavia/Sunda Kelapa dan pabrik yang tersebar di sekitar Kota Batavia (Oud Batavia), sehingga tentu memerlukan tempat bernaung yang dekat dengan tempat kerja mereka. Alasan lain tentu juga dikarenakan ketidakmampuan ekonomi mereka untuk tinggal di daerah Orang Eropa di pinggiran yang lebih sehat. Pada perkembangannya nanti, kehadiran pemukiman kumuh ini berkembang menjadi satu kesatuan kehidupan yang lebih besar seperti Kampung Luar Batang, cikal bakal wilayah yang pada saat nantinya menjadi Wilayah Penjaringan.

3.5. Manusia-Manusia Dalam Masa Kolonialisasi Awal (1619-1808)

Pada masa awal kekuasaannya di Batavia, Kolonial VOC kemudian membentuk kehidupan sosial yang khas dengan bentuk stratifikasi pemisahannya. Masing-masing kelompok masyarakat diatur dalam tirani dengan tingkatan vertikal yang mengerucut pada kekuasaan Kolonial VOC di paling atasnya. Selain dikarenakan keberagaman masyarakat yang sudah ada sejak dulu di wilayah ini, VOC nyatanya juga memerlukan tambahan masyarakat untuk menjalankan kolonialisasinya. Ketergantungan VOC ini menjadi sedemikian rupa dikarenakan orang Belanda asli yang bekerja di VOC memang sangat sedikit jumlahnya. Pada masa itu banyak Orang Belanda masih enggan mengambil resiko untuk menyebrangi samudra dan memulai hidup baru di daerah yang sebenarnya mereka sendiri masih sangsikan keadaannya. Kebanyakan dari mereka yang berhasil direkrut akhirnya merupakan kaum buangan: para penganggur, gelandangan, penjahat di negaranya.

Keinginan J.P.Coen untuk menghadirkan kaum Belanda yang baik dan ulet dalam bekerja selalu terganjal berbagai hal dan terutama dikarenakan mendapat penolakan dari Heeren XVII. Sejarah mencatat dengan jelas bahwa untuk mencanangkan cengkram kekuasaannya di Nusatara, Kolonialisme VOC pada

awalnya sangat bergantung dari berbagai unsur eropa non-Belanda ,asia non-Pribumi/timur asing yang terdiri dari kaum cina yang sangat diandalkan Belanda dalam bidang perdagangan, Jepang, Moor, Bengali, kaum campuran Mestizo (Portugis campuran), Mardjikers, Papangers⁷ dan yang terakhir tentunya Kaum Pribumi di Nusantara. Berbagai ras dan etnis ini kemudian dapat dikategorikan sebagai masyarakat pionir dalam kehidupan sosial wilayah ini, mengingat setelah berakhirnya zaman kekuasaan Kerajaan Banten para penduduk banyak yang melarikan diri ke sepanjang pantai Jawa Barat dan mengungsi di daerah pedalaman di sebelah selatan.

Unsur Eropa non-Belanda yang hadir pada kehidupan sosial Batavia pada era Pemerintahan Kolonialisme VOC, awalnya ada karena bentuk ketidaksiapan VOC dalam hal tenaga keprajuritannya. Selain karena Prajurit Belanda mereka sedikit, orang Belanda yang didatangkan oleh VOC ke Nusantara juga pada kenyataannya tidak berkualitas. Untuk dapat mengakomodir kesemua pengaturan di wilayah kekuasaannya, mereka merekrut orang-orang dari belahan Eropa untuk dijadikan prajurit-prajurit VOC dan juga bagian dari staf mereka. Kebanyakan dari mereka bahkan berasal dari Jerman, Swedia, Rusia, dan lain-lain. Bisa dikatakan pionir-pionir karyawan yang berkedudukan di pusat kantor dagang VOC bagian timur ini diisi oleh orang-orang Eropa dari Kaum Belanda, dengan kebanyakan berstatus buangan dan para Eropa non-Belanda lainnya yang merupakan tentara bayaran. Kehidupan mereka pada perkembangannya memang tidak hanya berakhir menjadi pegawai VOC pada saat berada di Batavia. Hal ini menjadi demikian karena setelah lepas dari dinas VOC banyak yang beralih profesi sebagai pedagang, tuan tanah, dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari pendatang dari unsur asia non-pribumi disini seperti kaum Cina, kelompok yang mendapat kekuasaan yang cukup besar dari VOC karena sangat diandalkan dalam bidang perdagangan. Kaum Cina

⁷ Kelompok milisi yang namanya diambil dari tempat asal mereka yaitu Pampangan di Filipina.

yang memang sudah ada terlebih dahulu ada di kawasan ini (Sunda Kelapa) bersama pedagang dan penyebar agama dari Arab memiliki keuletan dan kegigihan dalam berdagang ditambah pengetahuan tentang keadaan sosial dan ekonomi daerah Sunda Kelapa yang sangat tentunya dibutuhkan oleh VOC. Kaum Arab⁸ disini agak disisihkan oleh VOC menurut saya karena mungkin saja terjadi karena keenganan kedua belah pihak berinteraksi mengingat latarbelakang agama yang dianut keduanya. Dapat dikatakan penghuni pertama kota Batavia adalah serdadu, orang Cina dan para budak yang oleh Coen didatangkan dari Malaka, Malabar India, Bali dan juga Sulawesi (Lohanda,2007,hal.38). Pada masa awal setelah J.P Coen merebut Batavia, ia kemudian juga membujuk kaum Cina dari Banten yang dipimpin oleh Souw Beng Kong untuk pindah ke Batavia.

Orang-orang Cina pada masa ini memiliki kecenderungan untuk mempertahankan identitas Cina-nya pada saat berinteraksi dengan kehidupan sosial Batavia dan terutama saat dihadapkan dengan orang-orang Eropa khususnya. Hal ini dapat dilihat dimana pada satu kesempatan beberapa kaum Cina memilih untuk memotong habis kuncirnya dan memeluk Islam (biasa disebut cina peranakan atau *geschoren chinees*) untuk menghindarkan diri dari pajak orang Cina karena mereka terhitung sebagai kaum muslim yang harus dikenakan hukuman sebagai pribumi(F.de Haan 1984:394;W.E.van Mastebroek 1934:26 dalam Lohanda1995:99). Kaum Cina Islam ini disebut cina-peranakan⁹ pada masa itu dan dibedakan dengan Kaum Cina asli. Kaum cina peranakan memiliki jabatan kapitan/kapten tersendiri yang dipegang secara turun menurun oleh keluarga Dossol sampai jabatan itu nantinya ditiadakan.

⁸ Keberadaan pemukiman Arab pada zaman VOC tidak dapat dilaporkan dengan baik, karena menurut informasi keberadaan mereka secara menetap baru ditemukan pada pertengahan abad 19.

⁹ Cina peranakan pada masa itu lebih menuju pada penyebutan cina muslim, yang mana kemudian pemaknaannya terganti menjadi orang Cina hasil perkawinan campuran dengan unsur pribumi atau non-pribumi(Lohanda1995:99). Hal ini dikarenakan pada tahun 1823 ada perubahan penamaan distrik dari yang berdasarkan nama kelompok etnis/ras menjadi penomoran dan penghapusan jabatan komandan pasukan etnis. Pada tahun 1828 komandan der paranakkan Chinese tidak lagi lagi tercantum dalam “locale bestuur” Batavia di dalam Regeerings Almanak voor nederlandsch Indie.

Walaupun Kaum Cina sangat diandalkan VOC dalam sektor perdagangan untuk pembangunan kota Batavia, namun sejarah mencatat adanya satu bentuk konflik besar pada masa itu(1740) antara kedua belah pihak yang berakhir memilukan. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh menumpuknya imigran Cina di Batavia yang sekedar mengejar perbaikan nasib. Membeludaknya orang Cina ini diikuti dengan banyaknya dari mereka menjadi pengangguran dan melakukan tindak kejahatan yang agaknya meresahkan penduduk kota terutama pihak VOC. Hal ini kemudian membuat Gubernur Jendral Adriaan Valkenier dan Majelis Hindia Belanda atas nasehat Gustaaf Willem Baron van Imhoff memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan agar mereka semua ditangkap dan di buang ke Ceylon (Wilayah baru taklukan Kolonial Belanda). Menanggapi hal ini para kaum Cina ini tentu saja melakukan satu bentuk resistensi tersendiri dengan langsung berskutu dan mempersenjatai diri serta melukai beberapa tentara VOC. Mereka juga sempat mengancam untuk menduduki satu sudut kota dalam tempo secepat-cepatnya. Mendengar ancaman itu VOC pada bulan September 1740 langsung mengambil langkah yang bisa dibilang cukup keji yaitu membinasakan sebanyak mungkin kaum Cina di Batavia. Kebijakan VOC ini merupakan tinta kelam tersendiri bagi sejarah kota ini, para sejarawan mencatat upaya pembersihan kaum Cina ini meluas kepada mereka yang tidak tau apa-apa –Ibu, anak kecil, dll- bahkan para saudagar kaya pun dihabisi nyawanya(10.000 nyawa melayang) (Hanna,1988,hal.127-130).

Pembantaian kaum Cina ini di satu sisi kemudian mendapat kecaman dari pihak pemerintah Belanda di negaranya yang diwakilkan oleh Heeren XVII. Imbas dari ini merupakan satu penyesalan belaka dari Pemerintah Belanda yang kemudian di bayar dengan pencopotan serta pemberian hukuman bagi Gubernur Jendral Valkenier dan koleganya van Imhof. Setelah peristiwa berdarah ini kedudukan status sosial kelompok etnis Cina memang agak menurun di mata pemerintahan kolonial, namun hanya dalam beberapa saat di suatu masa. Setidaknya hal ini disebabkan karena bentuk ketergantungan Kolonial Belanda yang sangat besar terhadap Etnis

Cina dalam hal perdagangan sehingga membuat mereka tak bisa berlama-lama mencampakkannya. Hal yang mungkin mewakili tindakan tegas Pemerintah Kolonial Belanda setidaknya dinyatakan dengan pengusiran kelompok Etnis Cina dari wilayah dalam tembok kota atau *Intramous*. Mereka diharuskan tinggal di kawasan bagian selatan tembok kota ke arah Molenvliet (jalan Hayam Wuruk-jalan Gajah Mada), dekat tempat yang namanya *Waterplaats*, karena itu selalu disebut Glodok (Lohanda, 2007, hal. 63).

Sementara itu keberadaan orang-orang Jepang di Batavia juga menarik untuk kita masukan dalam pembahasan ini. Orang Jepang yang datang ke Batavia awalnya ditenggarai merupakan tentara sewaan Belanda yang dimana kebanyakan dari mereka kemudian memeluk agama Kristen. Kaum Jepang hampir sama dengan Cina dimana mereka memiliki kelebihan kekuasaan dalam ranah Kolonialisasi VOC. Namun bedanya mereka mencapai itu dengan proses kebanyakan dari mereka sengaja masuk dalam kebudayaan Kolonial Eropa dengan mengganti nama, masuk agama Kristen dan berkelakuan seperti orang Eropa, sementara orang Cina tetap dalam kesungguhannya mempertahankan identitas Cina-nya (baik cina peranakan atau asli/totok). Mereka sengaja melakukan transformasi identitas tersebut guna mendapat tempat tinggi dalam ranah sosial kehidupan Batavia. Hal ini terbukti manjur karena pada kehidupan di Batavia masa itu kita dapat menemukan posisi sosial orang Jepang yang cukup diperhitungkan. Contohnya dapat dilihat dari kehidupan sosok Simonz van der heijde yang berasal dari Hirado yang tidak memiliki darah keturunan Belanda sedikit pun tapi mampu mendapat jabatan *opperkoopman* strata sosial tertinggi dalam lingkup VOC waktu itu (Lohanda 1995:100-101). Warga Jepang umumnya berusaha di bidang penyewaan rumah, dimana kebanyakan dari mereka tinggal di daerah sepanjang Tijgersgracht (dekat museum Fatahillah) dan di Heeresgracht (jalan Pangeran Jayakarta). Keberadaan orang Jepang di Batavia hanya berada dalam waktu singkat dikarenakan keluarnya perintah Shogun Tokugawa tahun 1635 untuk menutup Jepang dari pengaruh dunia luar yang otomatis memutus persebaran orang Jepang di Batavia. Catatan Belanda tentang pemukiman Jepang

baru muncul kembali pada akhir abad 19 setelah dibuka hubungan dagang Jepang-Hindia Belanda tahun 1896(Lohanda,1995,hal.102).

Persebaran warga pendatang dari unsur asia non-pribumi yang terakhir kemudian diketahui berasal dari Kalingga yang terletak di Pantai Koromandel, India. Mereka umumnya disebut oleh Orang Belanda sebagai orang “Moor”. Tidak banyak keterangan yang dapat di peroleh dari keberadaan orang-orang India-Muslim ini , namun keberadaan mereka di Batavia memang sudah ada sejak dahulu dikarenakan terbawa arus perdagangan. Umumnya mereka tinggal di daerah Pekojan yang oleh VOC disebut sebagai Moorsekwartier (Lohanda,2007,hal.59). Nantinya pada akhir kekuasaan VOC pemukiman mereka di Pekojan pada akhirnya didominasi oleh warga Arab yang pada awal kedatangannya memang cenderung menetap dengan warga muslim non-pribumi.

Selain dari unsur non-eropa pihak kolonial juga sudah tentu memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap unsur pribumi baik itu yang penduduk asli Batavia maupun mereka yang non-Batavia. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Jawa, Melayu, Banda, Melayu, Makasar, dll dipergunakan sebagai tenaga budak atau prajurit dibawah naungan VOC. Untuk kehidupannya, mereka diberi tanah di luar wilayah kota atau yang biasa disebut “*Ommenlanden*” untuk menjadi penghadang seragan musuh paling awal sedangkan bagi yang berprofesi sebagai budak atau diangkat istri oleh Belanda kebanyakan tetap harus tinggal juga di dalam tembok kota. Mereka yang bertugas menjaga Batavia di luar tembok ini tergabung dalam keprajuritan VOC, dimana para pribumi ini dibentuk menjadi satu kelompok pasukan elit berdasarkan etnis-nya dan masing-masing memiliki pemimpinnya sendiri (dikenal dengan sebutan *Inlandsche kommandant*). Keterlibatan kaum pribumi dalam dinas keprajuritan VOC memiliki arti sendiri karena mereka cukup memiliki peran penting dalam membantu tegaknya kekuasaan VOC di Batavia dan wilayah kolonialisasi lain. Dalam jalan keterlibatan pribumi di kedinasan prajurit VOC ini, banyak dari antaranya yang merasakan kenaikan kelas sosial dan pergantian jati diri

mereka. Dengan kata lain bergabung dengan VOC adalah jalan untuk sebagian orang menanggalkan status rendah mereka sebagai pribumi, hal ini dapat disimak dari pengalaman –pengalaman pribumi seperti Kapitan Jonker dari Maluku, Aru Patuju dari Bone,dll:

“ Selain itu dapat dicatat para komandan Pribumi dari etnis lain seperti Kapitan Jonker dari Manipa/Maluku yang mendapat tanah Marunda dan yang namanya diabadikan dalam Jonkersgracht (sekarang jalan Roa malaka). Nama Petojo terkait dengan Aru Patuju dari Bone, yang bersama-sama Aru Pelakka bergabung dalam ketentaraan VOC. Komandan pasukan Sumbawa yang tercatat dalam dokumen VOC adalah Abdullah Saban, yang memperoleh bintang kehormatan, bahkan diangkat sebagai letnan pertama dalam pasukan marinir kerajaan Belanda, tersebut oleh keberaniannya menembus blokade armada Inggris di Batavia, Kapitan Babandam, komandan pasukan Bali, tercatat memilik sejumlah tanah di wilayah Jakarta Barat,(Lohanda,1995,hal.99)”

Pemisahan etnis dan ras di Batavia ini nyata diadakan dengan satu pembentukan pengelompokan masyarakat berdasarkan etnis dan ras yang kemudian dikepalai oleh satu pemimpin dengan julukan kapitein/kapten¹⁰, dimana jabatan kapitein/kapten paling istimewa dipegang oleh kapiten kaum cina. Sedangkan kapitein/kapten dari pribumi memiliki fungsi tambahan dalam urusan diplomatik dengan penguasa dari daerah asalnya. Selain bertugas untuk menghadang serangan dari luar, mereka juga diharapkan mengembangkan kehidupannya masing-masing terpisah dari kaum Eropa yang tinggal di dalam tembok kota (Intramuros). Wilayah tempat tinggal mereka dinamakan seperti nama etnis yang mendiami tempat tersebut seperti Kampung Bali, Kampung Makassar, dll.

Pada masa VOC jabatan kapitein/Kapten sangat banyak misalnya di tahun 1773 yang terdiri dari 17 orang, namun perlahan jabatan itu berkurang dikarenakan

¹⁰ Pada saat terjadi perang , atas nama VOC mereka bertugas memimpin pasukannya yang juga dibagi-bagi per etnis dan ras. Mereka disebut Inlandche Kommandant .

sudah adanya berbagai percampuran antar etnis sehingga menyebabkan perwakilan mereka di kepalai satu etnis tertentu. Betuk ini dapat dilihat misalnya, kalau di awal abad XVIII orang Sumbawa, orang Button, orang Mandar mempunyai kapitan sendiri-sendiri, di awal abad XIX jabatan kapitan itu digabungkan. Para pemimpin dari berbagai etnis dan ras ini antinya akan dapat masuk dalam dewan kota “Collegie van Schepen” yang bertugas mengurus administrasi kota, masalah penanganan hukum bagi penduduk kota dan berbagai hal lain menyangkut pengaturan kota Batavia.¹¹ Pada tahun 1829 jabatan kapitan/kapten akhirnya dihapuskan dengan alasan sudah bercampur baurnya etnis di Batavia sehingga menyebabkan pengaturan berdasarkan pengelompokan etnis dan ras tidak memungkinkan lagi. Sekalipun begitu ketika jabatan komandan itu dihapus tahun 1829, mereka yang saat itu dalam status aktif menjabat diangkat kembali sebagai komandan distrik(Lohanda,2007,hal.17).

Sementara berbicara mengenai budak maka sebaiknya kita juga tidak melupakan keberadaan Kaum Mardjikers. Kaum Madjikers merupakan budak-budak yang telah dibebaskan Portugis yang biasanya datang -dari luar orang Batavia- untuk sekedar mencari peruntungan di Batavia. Ketertarikan mereka ini nyata dikarenakan kantong-kantong kolonialisasi¹² (Maluku,Banten,dll) di tempat asalnya tidak memberi kesempatan pekerjaan yang cukup. Karena mengejar peruntungan hidup, kebanyakan dari mereka selama beberapa waktu akan terikat dalam kewajiban dinas keprajuritan dan kepegawaian VOC. Setelah habis kontraknya mereka kemudian sepenuhnya dinyatakan sebagai warga kota yang bebas atau disebut vrijburgers (banyak akhirnya menjadi pedagang). Dalam perkembangannya banyak dari mereka memiliki peran yang cukup krusial karena pada nantinya tidak sedikit yang berhasil naik kelas sosialnya dalam kehidupan masyarakat di Batavia.

¹¹ Khusus untuk pegawai VOC penanganan hukum diatur oleh Raad van Justitie yang dibentuk tanggal 10Sept 1626.

¹² Batavia pada masa itu memang menjelma sebagai bandar terbesar dibandingkan bandar lain di Nusantara. Orang Belanda menjulukinya dengan nama “*Koningin van het Oosten*” atau Ratu dari timur.

Kebanyakan manusia dalam golongan ini berasal dari budak pribumi (Bali, Bugis, Jawa, dll), pribumi keturunan Mestizo (Ambon, Tidore, dll), dan Mestizo asli itu sendiri. Namun tetap saja Golongan *Mardijkers* kebanyakan didominasi mereka yang berasal dari turunan kaum Mestizo (Portugis hitam) yang sudah bercampur darahnya dengan pribumi¹³ atau bisa jadi pribumi asli yang berasal dari Indonesia timur namun berkelakuan seperti Portugis karena lama menjadi hamba kolonial Portugis yang disebut "Swarten Christenen"¹⁴. Setelah beralih keyakinan dari Katolik menjadi Protestan, mereka ditempatkan di Kampung Tugu, yang sekarang ini termasuk wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan jemaat dan gereja tersendiri, Gereja Tugu, yang dibangun pertama kali pada tahun 1661. Kaum *Mardijkers* di wilayah ini banyak yang berpakaian seperti layaknya Orang Portugis dan menggunakan bahasa Portugis-Kreol (*Creole-Portuguese*).

Akibat dari ketergantungan yang sangat besar dari pihak Belanda terhadap unsur-unsur tenaga manusia dari luar bangsanya ini, maka terciptalah satu kehidupan sosial yang sangat heterogen di Batavia. Berkaca dari hal itu untuk bisa mengatur kepentingan, keteraturan dan kekuasaannya, Kolonial VOC akhirnya menetapkan kebijakan-kebijakan pemisahan atau yang bisa dikatakan sebagai satu stratifikasi sosial yang berdasarkan pada garis warna kulit dan agama (Lohanda, 1995, hal. 98, 102-103). Jelas pada awalnya Kolonial Belanda mencanangkan kekuasaan di Nusantara mereka menggunakan kekuasaan yang berbentuk politik segregasi. Bentuk ini kemudian ditegaskan lagi dengan adanya pemisahan secara spasial antara pribumi yang dialokasikan menetap di luar tembok kota dan Kastell yang disebut wilayah "*Ommenlanden*" dan Kaum Eropa yang tinggal di dalam tembok yaitu wilayah "*Intramous*".

¹³ Pada satu kesempatan dalam kehidupan masa itu, percampuran kaum Mestizo dengan penduduk pribumi di Batavia juga dimaknai sebagai golongan Indo-Belanda¹³/Eurasia.

¹⁴ Mereka ini kebanyakan adalah sisa-sisa tentara kontrak dengan Portugis.

Kebijakan ini pada kenyatannya tidak dapat dipaksakan karena pada akhirnya di Batavia terbentuk pembauran sosial yang cukup signifikan diantara para penduduknya dikarenakan interaksi antar mereka. Salah satu hal yang cukup umum dalam interaksi ini dapat dikatakan terlihat dari satu bentuk ketergantungan yang menghasilkan interaksi antara budak(pribumi) dengan majikan Eropa, Cina,dll. Bentuk interaksi ini juga kemudian memiliki dimensi tersendiri apabila kita berbicara tentang bagaimana perkawinan lintas ras dan etnis terjadi. Walaupun dikarenakan imbas dari politik segregasi tidak memperbolehkan adanya perkawinan campuran - antar etnis pribumi khususnya- pada kenyataannya di Batavia banyak ditemukan satu bentuk perkawinan lintas ras dan etnis. Perkawinan yang sedemikian rupa secara tidak langsung kemudian memang mendudukan peran perempuan lokal -kebanyakan awalnya adalah budak (Jawa, Bugis, Bali, dll)- sebagai agen transformasional kebudayaan bagi anaknya yang merupakan hasil perkawinan campuran. Anak hasil perkawinan mereka adalah satu bentuk insan manusia yang nantinya terdidik dan terpengaruh kedua orang tua mereka yang jelas berlatar belakang kebudayaan yang berbeda.

Untuk kasus perkawinan Bangsa Belanda atau Eropa lainnya dengan wanita lokal (Indonesia), sejarah mencatat hal itu kebanyakan dikarenakan mereka tidak dapat mendapatkan wanita Eropa baik-baik¹⁵ saat berada di Batavia, sehingga lebih memilih wanita lokal untuk dinikahi. Ada rumor sejarah yang mengatakan bahwa wanita baik-baik yang pertamakali sampai di Batavia adalah istri J.P.Coen dan kakaknya yang bermukim di Batavia sampai akhir hayatnya(Hanna1988: 80-81), sedangkan selain itu kebanyakan adalah pelacur dan kaum miskin di Belanda. Bentuk lain yang menyebabkan terjadinya banyak perkawinan campuran adalah kebanyakan dari mereka yang sudah habis masa kontrak pekerjaannya di VOC lebih memilih untuk

¹⁵ Kebanyakan adalah wanita penghibur yang kemudian bekerja lagi di Batavia dengan profesi yang sama, yatim piatu, dan juga kaum-kaum wanita miskin(Hanna1988: 80-81).

tinggal di Batavia daripada harus pulang ke negaranya dengan nasib yang tentunya belum tentu sebaik di Batavia. Kesemua anak hasil perkawinan dengan pihak Bangsa Belanda kebanyakan nantinya akan mendapat nama dan pendidikan Bangsa Belanda. Mereka ini akan menjelma sebagai kaum Indo-Belanda (Eurasia) yang pada satu waktu sempat tidak jelas kelas sosialnya namun kemudian memproklamirkan diri sebagai kaum kelas dua dibawah para Belanda totok.

Hal lain yang mempengaruhi kosmopolitan kehidupan sosial dan pembauran antara Kolonial VOC yang berasal dari Negara Belanda dengan unsur diluarnya (non-pribumi dan pribumi) di Batavia adalah dikarenakan naiknya beberapa kaum etnis/ras dari golongan budak dan pegawai kontrak VOC (prajurit, staf,dll) ke dalam satu tingkatan sosial/politik tertentu yang jelas lebih membanggakan. Naiknya mereka ini di satu sisi membuat naiknya peran dan kelas sosial mereka dalam satu tatanan kehidupan sosial Batavia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam hal politik, bentuk pemisahan dalam stratifikasi sosial tidak terlihat secara ketat dapat dipaksakan mengingat Pemerintah Kolonial VOC sendiri sangat membutuhkan tenaga manusia di luar bangsanya sendiri. Hal ini di satu sisi kemudian menyebabkan terjadinya banyak kasus yang menunjukkan majunya beberapa etnis pribumi dan kelompok ras dalam suatu tingkatan jabatan politik kaum elit Batavia. Kebanyakan dari mereka yang maju ini dikarenakan adanya satu bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa atau ada juga yang mencapai kesuksesan setelah menyelesaikan tugas di kedinasan VOC (contohnya Kaum Pribumi) dan ada juga karena menguntungkan VOC di sektor tertentu seperti perdagangan (contohnya Kaum Cina). Beberapa dari antara pihak ini memang kemudian berperan terhadap perkembangan pemerintahan Kolonial VOC namun ada juga yang merugikan seperti contohnya Untung Surapati¹⁶ yang kemudian memberontak di Pasuruan. Naiknya beberapa pihak dalam satu strata kolonial tetap saja diawasi dan dibatasi oleh para elit VOC, dimana terkadang

¹⁶ Untung Surapati sempat menjadi seorang budak saat masih berada di Batavia, sebelum menjadi penguasa Pasuruan yang menjadi musuh VOC yang tak terkalahkan(Kumar,Ann. *Surapati, Man and legend: A Study of Three Babad*.1976.Leiden:J.E.Brill.)

memang banyak dibuat perubahan-perubahan aturan untuk tentunya melegitimasi kekuasaan absolut Bangsa Belanda¹⁷. Satu bentuk pergantian jati diri yang terepresentasikan dalam pemaknaan identitas dan kelas sosial masyarakat Batavia yang pada masa itu memang sangat mudah berubah. Dalam artian sederhana sangat gampang menemukan seseorang yang awalnya memulai kehidupan di Batavia dari kelas sosial rendah (contoh:budak) berkembang kemudian nantinya menjadi pedagang, penguasa tanah, dll dan begitu juga sebaliknya kita akan dengan mudah menemukan orang kaya yang mendadak menjadi miskin tak terkecuali mereka dari Bangsa Eropa.

Suatu nuansa keberagaman dalam percampuran interaksi antar penduduk yang sedemikian rupa memang dibiarkan terjadi atau di satu sisi tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah Kolonial VOC. Namun hal ini memang tidak terjadi dalam bentuk perlakuan terhadap penduduk kota, terutama apabila berbicara dalam soal perlakuan hukum dimana kesemuanya sangat ditentukan oleh kebijakan VOC itu sendiri:

“... seorang budak yang memeluk agama kristen dapat dimerdekan dan mendapat perlakuan yang berbeda dari seorang prajurit pribumi. Peraturan yang diskriminatif di tahun 1642 menyatakan bahwa seseorang non-kristen yang terutang dan dijual sebagai budak harus dibayar dengan harga jauh lebih rendah dari nilai utangnya. Bahwa jika ada warga Kristen yang harus menjalani hukum penjara karena tidak mampu membayar hutangnya,tidak boleh diborgol atau dirantai. Bahkan perlakuan penjara pun berbeda terhadap mereka yang kristen dengan yang non kristen¹⁸. Di lain pihak, perlakuan diskriminatif juga dialami oleh mereka yang memiliki darah campuran seperti mestizo. Jika seorang janda dari pegawai VOC akan mengajukan tunjangan pensiun, maka ia harus mengisi kolom tentang warna kulitnya. Makin banyak pigmen yang

¹⁷ Salah satunya adalah penghapusan jabatan komandan pasukan etnis seperti Komandant der Balijers,der Maleijrs, boegineezen,dll dengan alasan sudah bercampur baurnya macam-macam etnis di Batavia yang menyebabkan pengaturan di antara mereka berdasarkan etnis menjadi susah. Sistem ini diganti dengan pembagian berdasarkan distrik.

¹⁸Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di F.de Haan, *Oud Batavia*.1930.Bandoeng: A.C.Nix&co. Vol.I,hal.404.

terkandung di dalam tubuhnya maka akan makin sedikit uang pensiun yang diterimanya. Di panti asuhan warga Eropa tentu mendapat perlakuan lebih baik daripada orang Mestizo, tetapi orang Mardijkers akan mendapat perlakuan yang lebih jelek, Ini karena kaum Mardijkers , sekalipun mempunyai nama berbau barat, beragama kristen, orang borgor(orang bebas), tetapi sama sekali tidak memiliki setetes pun darah Eropa di tubuhnya ”(Lohanda,1995,hal.99-100).

Keadaan ini memang sengaja dipaksakan oleh Kolonial dengan semata-mata untuk mendukung prestise mereka sebagai Bangsa Belanda dan tentunya melegitimasi kekuasaan mereka yang sebenarnya sangat rentan dikarenakan sumber daya manusianya sedikit dan tidak berkualitas. Selain itu pengaturan ini juga dilakukan untuk menjaga keamanan kehidupan kota Batavia dari serangan luar, pada beberapa masa Batavia memang sedang dalam peperangan terhadap Banten dan Jawa sehingga perlakuan pengawasan penduduk dari beberapa Etnis tertentu memang mutlak diperlukan. Hal lain berkaitan dengan keamanan ini juga dicontohkan dalam keputusan –keputusan yang mengharuskan setiap kelompok etnis golongan tertentu berpakaian menurut kostum adat masing-masing, ambil contoh, plakat 21 Juli 1658 menetapkan orang Melayu untuk berpakaian menurut cara adat mereka(Lohanda, 1995,hal.106). Peraturan ini tentunya dimaksudkan agar perbedaan antar mereka terlihat jelas dan pengawasan berdasarkan etnis/ras dapat dilakukan dengan baik.

Dalam membentuk kehidupan sosial di Batavia Kolonial VOC juga mempraktekan satu norma sosial yang mesti dipatuhi seantero Batavia yang dikenal dengan ungkapan “Budaya Indisch”. “Budaya Indisch” merupakan satu dasar-dasar norma sosial dan kode etik dalam bergaul yang diterapkan Belanda mulai abad 17 dengan keluarnya “*Reglement ter Beteugeling van Pracht en Praal*” dan semarak terasa pada abad 19. Adanya norma sosial tertulis ini memang semakin membuat terasanya suatu bentuk pengkotak-kotakan bentuk perlakuan dalam interaksi sosial Bangsa Belanda dengan para penduduk kota Batavia. Norma-norma ini memang memiliki fungsi untuk mengatur warga kota agar berkelakuan sesuai dengan identitas dan perannya dalam masyarakat yang diimpikan Kolonial VOC. Hal ini juga dapat

ditanggapi sebagai satu bentuk yang di lakukan serta-merta untuk mendukung perbedaan kelas sosial Bangsa Belanda umumnya dan terkhusus anggota Dewan Hindia dengan penduduk Batavia lainnya. Keberlanjutan norma ini nantinya akan menghilang dengan adanya pengaruh besar revolusi Perancis yang membawa semangat persamaan dan kebebasan di dunia. Satu bentuk elaborasi yang boleh jadi mulai terasa di Nusantara dalam era kekuasaan Perancis yang terwakilkan oleh Daendels.

3.6. Kehidupan Kolonial Perancis (DAENDELS 1808-1811)

Kota Batavia juga merupakan akumulasi dari peran VOC yang melemah dengan maraknya grogotan korupsi dan berbagai hal yang mendekatkan mereka pada kebangkrutan. Pada waktu itu Belanda juga harus berperang menghadapi invasi Perancis sehingga bisa dikatakan konsentrasi mereka terganggu-antara mengurus daerah kolonial atau negaranya yang diinvasi.

Kehidupan sosial Batavia pada masa itu, kemudian memang menunjukkan transformasinya dalam imbas berbagai akumulasi pergolakan dunia. Alur sejarah dengan gamblang menceritakan bahwa penaklukan Eropa (termasuk Belanda) oleh Napoleon Bonaparte secara tidak langsung berpengaruh dalam segi kekuasaan dan kehidupan sosial di Batavia. Petaka bagi Kolonialisme Belanda ini dimulai pada bulan Desember 1794 - Januari 1795 Perancis menyerbu negeri Belanda dengan penuh sukses dan membentuk pemerintahan boneka Perancis. Pada tahun 1796 *Heeren XVII* dibubarkan dan digantikan oleh suatu komite baru dan sesudah itu VOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800. Wilayah-wilayah yang menjadi miliknya kini menjadi milik pemerintah Belanda. Akan tetapi, hanya perubahan kecil yang terjadi di Indonesia karena personel-personel yang memegang jabatan masih tetap sama dan mereka juga masih mengikuti cara-cara lama (Ricklefs1989:168-169).

Bentuk-bentuk struktural kolonialisme yang jelas berganti adalah diangkatnya Marsekal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk menjadi Gubernur

Jendral. Daendels(1808-1811) adalah seorang Belanda yang sangat memuja-muja prinsip revolusioner dan liberal yang nantinya bersama rekan sepemikirannya seperti Dick van Hogendrop dan Herman Warner Muntinghe banyak mempengaruhi “social-culture” Batavia serta Nusantara pada umumnya. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Daendels sangat menentang bentuk feodalisme –menghapus bentuk keterkaitan erat VOC dengan penguasa lokal- di nusantara. Masa ini juga merupakan tonggak awal bentuk liberalisme merasuk kedalam kehidupan sosial Nusantara disertai dengan bentuk perkembangan yang cukup signifikan dalam perekonomian dimana terlihat dari banyak penduduk dan pedagang dari seluruh dunia yang datang dan melakukan perdagangan. Mengenai perekonomian yang berkembang pesat dapat dilihat kedatangan bangsa Amerika, Skotlandia, dll untuk melakukan perdagangan, Kapal pertama yang mengunjungi Batavia adalah ”Hope”(pemiliknya Mr. Sears, dari New York), yang tiba pada tahun 1788, menjual ter dan tali/kabel dan memuat gula, rempah-rempah dan kopi.

Sementara itu salah satu bentuk perubahan dari pemerintahan Daendels dalam kehidupan sosial Batavia adalah adanya semangat persamaan dan kebebasan yang terinspirasi revolusi Perancis sehingga menyebabkan berbagai norma-norma sosial seperti “*Reglement ter Beteugeling van Pracht en Praal*” yang menggelikan tak dipraktekan lagi dan lama-lama tidak berlaku lagi. Bentuk pembagian kawasan di Jawa dibagi olehnya dalam sejumlah distrik (arrondissement), satu kebijakan yang nantinya diikuti oleh Inggris dan pemerintah Kolonial Belanda yang baru. Bentuk stratifikasi sosial kehidupan di Batavia yang tertata dalam bentuk pengawasan per-etnis dan ras dengan pemimpinnya masing-masing yang dikepalai oleh seorang Kapitein/Kapten tetap dipertahankan sebagaimana dahulu kala namun interaksinya memang terasa lebih cair.

Keadaan mengesankan yang menimpa Kota Batavia kemudian juga baru benar-benar diakhiri pada masa kepemimpinan Daendels ini. Pada waktu ini, ia memerintahkan seluruh warga kota untuk benar-benar meninggalkan Kasteel Batavia

serta kompleks dalam tembok kota (*Intramous*) yang memang terkenal sangat tidak sehat lingkungannya. Dia bahkan meruntuhkan tembok kota dan bangunan sekitarnya untuk memakai puing-puingnya sebagai bahan membangun kawasan pemukiman dan bangunan baru bagi pemerintahan bernama *Weltevreden*, kota satelit *Meester Cornelis* (Jatinegara), dan lain-lain. Pada akhir abad 18 pusat pemerintahan Gubernur Jendral sudah tidak lagi berada di Kastil Batavia melainkan berpindah ke *Waterlooplein* (dalam wilayah *Weltevreden*). Perpindahan pemerintahan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan yang tidak sehat di sekitar Kastil ini memang sudah dimulai di zaman Gubernur Jendral P. G. Van Overstarten¹⁹, tapi jelas bahwa pembangunan secara besar-besaran terjadi di era Daendels. Di *Weltevreden* ia membangun Istana Gubernur Jendralnya yang megah yang menghadap langsung—sekarang menjadi Departemen Keuangan—ke lapangan *Waterlooplein*, tempat para tentara biasa berlatih. Bagunan bertingkat dua yang sangat megah ini diselesaikan pada 1829. Pada abad ke-19 tepat dilapangan depan istana kemudian didirikan monumen tugu putih besar yang di atasnya terdapat patung singa, sebagai salah satu simbol kekuasaan Kolonial Belanda.

Disamping membangun berbagai gedung di Batavia, Daendels juga membangun lapangan yang diberi nama Prancis yaitu *Champs de Mars* (terpengaruh kolonialisasi Perancis) yang kemudian berubah nama menjadi *Koningsplein* saat Belanda berkuasa kembali. *Koningsplein* yang mencerminkan pusat pemerintahan Belanda pada era Daendels dan seterusnya, pada masa pendudukan Jepang lebih dikenal sebagai Lapangan Ikada. Warga pribumi kemudian menamakan kawasan ini sebagai Lapangan Gambir, yang diketahui memiliki area yang cukup luas meliputi wilayah *Wilhelmina Park* (sekitar masjid Istiqlal sekarang) sampai *Waterlooplein* (Lapangan Banteng) dengan luas sekitar 10 hektar.

¹⁹ Van Overstarten lebih memilih berkantor di rumahnya yang terletak di *Weltevreden*, sedangkan Kastil hanya digunakannya bila ada acara dan rapat tertentu.

Daendels memang bercita-cita untuk membangkitkan romantisme Batavia yang pada akhir abad ke-17 yang sempat dijuluki "Queen of the East" (Ratu dari Timur) atau di Belanda populer dengan sebutan "Venezia van Oost" (Venesia dari Timur) karena kecantikan kanal-kanalnya. Ia mulai membangun Nieuwe Batavia impiannya dengan menjadikan area Rijswijk (Jl. Veteran) dan Noordwijk (Jl. Juanda) yang diapit oleh kanal Ciliwung sebagai daerah kebanggaan warga Eropa di Hindia Belanda. Untuk menyemarakan suasana di Batavia, Daendels membangun pusat perdagangan dan pertokoan barang impor dari Eropa di Pasar Baru dan Gedung Harmonie yang menjadi tempat hiburan bagi warga kelas atas Eropa. Perluasan dan pembangunan kawasan Batavia pada masa itu memang gencar dilakukan mengingat terus bertambahnya masyarakat didalamnya. Pembangunan ini juga menyentuh dalam hal pemukiman bagi pribumi dan unsur bangsa non – Eropa yang mengakibatkan mereka berkembang secara pesat meluas ke berbagai daerah tidak hanya di sekitar bagian luar tembok Kastell Batavia, membentuk cikal bakal Kota Jakarta yang kita maknai sekarang.

Perpindahan ini menurut saya bukan merupakan perpindahan struktural semata, melainkan juga ikut mempengaruhi kehidupan sosial batavia secara keseluruhan. Ditandai pindahnya secara besar-besaran pemerintahan kolonial dan Bangsa Eropa pada era Daendels membuat wilayah *Oud Batavia* turun pada titik terendahnya. Wilayah *Intramous* benar-benar hilang secara otomatis dan penyebutan Kota Batavia kemudian lebih ditujukan bagi wilayah *Weltevreden* dan wilayah baru lainnya (*Nieuwe Batavia*). Kota Batavia yang lama atau biasa disebut *Oud Batavia* kemudian menjadi sekedar tempat usaha dengan pemukiman kumuh yang mulai ditempati oleh warga-warga pribumi dan golongan miskin lain. Pada zaman Daendels, perkampungan di wilayah ini berkembang lebih banyak, dimana pembentukannya bukan lagi terfokus berdasarkan pengelompokan etnis. Dalam satu kampung sudah ditinggali beragama etnis dan ras dimana penyebab pengelompokannya lebih karena faktor spasial. Kampung-kampung kecil ini nantinya berkembang melengkapi kampung yang sudah ada terlebih dahulu -

Kampung Luar Batang- dan membentuk kehidupan wilayah yang pada saat nanti dinamakan sebagai Wilayah Penjaringan.

3.7. Kehidupan Kolonial Inggris (RAFFLES 1811-1816)

Perpindahan pusat pemerintahan dari pinggir laut yang sulit dipertahankan dan terkenal tidak sehat lingkungannya ke pedalaman yang jauh lebih sehat tepatnya di Waterlooplein ini nantinya memang sangat disyukuri pihak Inggris yang berkuasa tidak lama lagi. Inggris memang sangat bernafsu menguasai Batavia sejak dulu dan dengan mengambil momentum gejolak peperangan di Eropa seakan memiliki legitimasi dikarenakan keluarnya surat-surat Kew yang dilansir raja Belanda sendiri di pengasingannya. Pada masa itu sang penguasa kerajaan Belanda yang kekuasaannya di rebut Perancis yaitu Willem V memang berhasil melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795 dan tinggal di daerah Kew, satu daerah di Inggris. Di pelariannya ini, ia mengeluarkan apa yang dikenal dunia sebagai surat-suat Kew, satu dokumen yang memerintahkan seluruh pejabat di daerah kolonial untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris. Dengan berbekal keluarnya surat-surat tersebut seakan menjadi legitimasi bagi arogansi Inggris di semua kantong kolonialisasi Belanda tek terkecuali Nusantara. Khususnya Batavia, hal pertama yang dilakukan Inggris untuk merebut Batavia adalah dengan mengadakan blokade di laut sekitar Pelabuhan Batavia/Sunda Kelapa. Blokade ini sangat merugikan pendapatan pemerintah Belanda karena sangat mengacukan jalannya ekspor kopi mereka. Pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia dan sebagian besar daerah kolonial di nusantara akhirnya benar-benar dikuasai oleh Inggris. Batavia kemudian tetap dipakai sebagai pusat pemerintahan bagi Inggris dimana untuk menjalankan kekuasaannya mereka mengutus seorang perwira bernama Thomas Stamford Raffles (1811-1816).

Raffles sebagai wakil inggris di Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan nafas Liberalisme seperti yang pernah dilakukan Daendels. Pada era kepemimpinannya berbagai bentuk perubahan-perubahan untuk mendorong kemakmuran warga pribumi dicanangkan, suatu hal yang mungkin jarang terpikir

oleh pemerintah Kolonial sebelumnya. Rencana-rencana pembangunannya memang sangat transformasional namun dalam beberapa sisi semuanya tak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kendala yang sangat besar terutama soal dana. Di masa pemerintahannya perdagangan di Batavia berkembang dengan masuknya lebih banyak pedagang dari Amerika dan Eropa yang pada masa itu disebut “pedagang luar kota”. Orang-orang Inggris yang di datangkan dari negaranya juga merupakan pedagang dan profesional bidangnya yang kemudian sangat membantu perkembangan kota Batavia nantinya bahkan setelah Kolonialisasi Belanda tampil untuk sekali lagi. Para pemukim baru ini datang dengan membawab serta keluarga mereka, beranak pinak dan hidup dengan membentuk golongan bojuis Eropa baru di kehidupan sosial Batavia.

Pada era kepemimpinan Raffles, Batavia dimasukan dalam satu bentuk pengaturan dimana wilayah “*Oomelanden*” dijadikan kawasan huni masyarakat berbagai lapisan -beberapa tanahnya dimiliki warga asing- dan wilayah *Weltevreden* sebagai pusat pemerintahan -golongan ter-elit Batavis. Daerah *Oud Batavia* dengan kampung-kampung golongan miskin yang merupakan cikal bakal Wilayah Penjaringan secara resmi dimasukan dalam Wilayah *Oomenlanden* ini.

Bentuk pengawasan masyarakat dengan penggolongan sosial berdasar etnis dan ras yang dikepalai Kapitein/Kapten masih tetap dipertahankan, namun dimasa ini tak dapat dipungkiri pembauran antar penduduk dari berbagai suku/ras memang sudah meluas terjadi di seluruh kawasan Batavia. Nuansa pembauran ini setidaknya kemudian menyebabkan adanya bentuk satu pemimpin (Kapitein/Kapten) yang mengepalai beberapa etnis yang berbeda.

3.8. Kehidupan Kolonial Belanda Akhir (1816-1942)

Zaman kolonialisasi Belanda yang baru dimulai setelah diserahkannya wilayah Nusantara oleh Perancis kepada pihak Inggris akibat berakhirnya masa peperangan Napoleon di Eropa. Dengan berdasarkan hasil persetujuan kongres Wina

tahun 1815, maka koloni Belanda di Hindia seluruhnya akan dikembalikan Inggris dengan tenggat waktu antara bulan Agustus 1816. Pengembalian kekuasaan ini kemudian memang sangat disyukuri pihak Belanda yang untuk sekali lagi berharap dapat menjalankan kekuasaannya di Nusantara dengan mendapat keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Belajar dari kegagalan mereka yang mengandalkan VOC dimasa lalu secara jelas mereka kemudian membentuk perusahaan swasta yang tidak memiliki hak monopoli, namun dalam praktek kekuasaan memiliki perlindungan dari pemerintah dan hak-hak istimewa. Rencana pembentukan perusahaan swasta tersebut diwakilkan oleh keberadaan *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang sangat diharapkan dapat membawa keuntungan sebesar-besarnya bagi Belanda dan mempermudah pengawasan mereka terhadap kekuasaannya sendiri di Nusantara.

Selain berusaha memperbaiki sistem pengaturan pada daerah jajahannya, pada masa ini pemerintah Belanda juga gencar melaksanakan “politik etis” yang didengungkan sebagai upaya balas budi pemerintahan kolonial, untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat pribumi. Ide politik etis ini sebenarnya muncul dari kekusaran rakyat Belanda –terutama kaum liberal- akan nasib kaum pribumi di daerah koloni yang seakan dihisap kekayaannya namun tak diperhatikan kesejahteraannya. Bagi kaum Ethici -orang Eropa yang secara ideologis berkomitmen terhadap Politik etis- berharap bahwa pendidikan akan menguntungkan orang Indonesia dan menciptakan ikatan antara penduduk koloni dengan penguasanya (Blackburn,2011,hal.132-133). Ikatan yang kemudian dikenal dengan “Ide Asosiasi” ini dimaksudkan untuk dapat memperkenalkan kebudayaan barat - individualisme, kemajuan material, dan pemikiran ilmiah- dengan baik kepada rakyat Indonesia, sehingga mereka sebagai penguasa dan yang dikuasai (kolonial dan kaum pribumi) dapat berkerjasama mencapai satu tujuan bersama bagi kebaikan keduanya. Di satu sisi saya juga kemudian memiliki pendapat pribadi bagaimana politik etis ini juga dimanfaatkan dengan licik oleh sebagian pihak yang mengharapkan dengan adanya kehadiran pengaruh barat -dibawa oleh politik etis lewat pendidikan, iklan, film, dan

lain-lain- serta merta dapat memberi gambaran realitas kultural yang harus dianut oleh kaum pribumi, sehingga mereka berlomba-lomba mengejar label “barat” yang pada akhirnya berpengaruh pada naiknya konsumen kaum pribumi terhadap produk kolonial²⁰. Dengan semua cacat dan prasangka buruk dibelakang rencana ini, pada akhirnya “politik etis” tetap dilakukan dan telah menghasilkan berbagai polemik sebagai representasi kaum pribumi dalam menganggapi pengaruh dalam kehidupannya, seperti yang akan saya jabarkan dibawah ini.

Politik etis nyata dilaksanakan dengan memajukan pendidikan anak-anak pribumi asli di berbagai bidang dengan harapan dapat mewujudkan tersedianya sumber daya manusia unggul untuk mereka pekerjaan di lingkungan kolonialisasi. Realisasi dari “politik etis” ini pada akhirnya berjalan dengan tidak sesuai kemauan pemerintah Belanda dikarenakan pendidikan yang diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir kaum pribumi hanya diperoleh dan mempengaruhi sebagian kecil dari mereka –kebanyakan kaum elit-, sehingga bisa dikatakan “Ide asosiasi” ini mentah ditengah jalan. Mereka kaum pribumi minoritas yang terpelajar ini kemudian memang mempertanyakan apa yang mereka dapat dari pengaruh barat seperti ide kebebasan dengan nilai tradisi yang selama ini ditanamkan keluarga mereka, namun pengumpulan tersebut akhirnya malah menunjuk pada satu satu titik kulminasi yang mempertanyakan kekuasaan kolonial dan melahirkan kesadaran para pemuda pribumi akan nilai kemerdekaan mereka sebagai satu bangsa. Situasi dimana untuk pertama kalinya para pemuda dari berbagai asal etnis berkumpul dan berbaur dengan para pemuda dari daerah lain untuk sekedar bertahan hidup dalam suasana keberagaman di Batavia, juga mengharuskan mereka m persatuan itu sendiri. Kepentingan-kepentingan semacam ini di satu sisi membentuk kondisi di antara mereka untuk mengakomodir bentuk persatuan yang merupakan cikal bakal semangat kemerdekaan Bangsa Indonesia. Batavia pada masa ini memang dikenal sebagai salah

²⁰ Contoh dari kenyataan ini dapat dilihat pada masa itu dimana kebanyakan dari para gadis Eurasia (Eropa-peranakan) yang berlomba-lomba mempercantik dirinyadengan mengejar gambaran kecantikan khas Eropa dengan kulit yang mulus putih seperti yang terlihat di iklan dan film.

satu sentra pendidikan yang menyebabkan berbagai pemuda dari berbagai penjuru nusantara berkumpul, belajar nilai-nilai kemerdekaan dari penjajah mereka dan kemudian mulai menanyakan kekuasaan kolonial itu sendiri²¹.

Pada masa itu pengaturan wilayah kota Batavia (*Weltevreden*) dan daerah pinggiran yang disebut "*Ommenlanden*" dibentuk menjadi satu keresidenan, yaitu Residensi Batavia sejak wilayah jajahan Belanda ini dikembalikan oleh Inggris 1816 (Lohanda, 2007, hal. 7). Kehidupan sosial dalam pengaturan wilayah berdasarkan keresidenan, tetap mempertahankan bentuk-bentuk pengaturan berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat. Hal yang membedakan terletak dari adanya pergeseran pendefinisian kelompok masyarakat dari yang tadinya diartikan sebagai kelompok etnis /ras menjadi sekelompok penduduk dalam satu kehidupan wilayah spasial tertentu. Pada masa itu umumnya warga Jakarta sudah sangat berbaur namun hanya dalam hal pekerjaan mereka cenderung terkotak-kotak menurut Etnis. Contoh dari hal ini dapat dilihat dari mayoritas orang Banten dan Tangerang yang bekerja sebagai kuli musiman di Pelabuhan Tanjung Priok, Orang Cirebon dan Kuningan yang kebanyakan berjualan gado-gado, penjual air limun dan es krim dilakukan orang dari Sunda dan Jawa Tengah, dan lain-lain. `Suasana yang tercipta sedemikian rupa pada abad kolonialisasi baru ini memang menyebabkan pengaturan berdasarkan kelompok etnis/ ras tidak memungkinkan lagi.

“Tetapi pada tahun 1829 sebutan komandan pribumi dihapuskan, termasuk jabatan sesuai dengan kelompok etnis warga yang diperintahnya. Alasan pemerintah Hindi-Belanda waktu itu adalah bahwa etnisitas dari masing-masing kelompok sudah memudar tersebut oleh percampuran atau amalgasi yang menyebabkan identitas pokok masing etnis tidak nampak lagi” (Lohanda, 2007, hal. 177)

²¹ Pada masa pergerakan kepemudaan ini, Jakarta berperan dalam melahirkan kesadaran kemerdekaan dan pergulatan kata persatuan Indonesia, satu hal yang nantinya sangat di sayangkan oleh pemerintah Kolonial dan kelompok Bangsa Eropa.

Kelanjutan dari hal ini juga kemudian menyebabkan timbulnya kebijakan dimana wilayah Batavia dibentuk berdasarkan wilayah spasial yang dinamakan distrik nomor dan penghapusan jabatan komandan etnis. Pengaturan distrik nomor oleh Koloniasasi Belanda yang baru ini, mengikuti apa yang terlebih dahulu ditetapkan Inggris dalam mengatur wilayah Batavia, dimana *Stad en Vorsteden* - wilayah kota- tetap menjadi pusat perhatian. Pembagian wilayah Batavia yang berdasarkan distrik secara tidak langsung memang dimaksudkan untuk mengatur gerak sosial warga yang tinggal dalam wilayah yang bersangkutan. Berhubung jabatan komandan etnis dihapuskan pengaturan pada setiap distrik diwakilkan oleh seorang pemimpin yang disebut komandan distrik, dimana perannya hampir sama dengan jabatan Kapitein/kapten atau "*Inlandsche kommandant*" pada masa sebelumnya yaitu sebagai pemimpin warga. Bentuk perbedaannya tampak dalam tanggung jawab yang diemban komandan distrik dimana memang lebih besar karena tidak hanya memimpin warga sesama etnis/Ras dengannya tapi melingkupi berbagai orang yang hidup dalam wilayah distriknya. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jabatan yang awalnya di sebut sebagai komandan pribumi (*Inlandsche Kommandant*) pada saat pemerintahan VOC, Perancis dan Inggris nantinya akan berganti nama menjadi komandan distrik untuk masa 1828-1905²².

Pengecualian pada bagian ini perlu diketahui adalah mengenai jabatan pemimpin etnis Cina benar-benar hilang sampai tahun 1942 dimana hal itu akhirnya terjadi dikarenakan kedatangan Jepang²³ yang mengakibatkan kapitan Cina mati di kamp tawanan. Kaum Cina memang menjadi satu-satunya golongan masyarakat yang tetap mempertahankan identitasnya dan berusaha melingkupi dengan baik orang-orang dari berbagai etnis/ras yang masuk ke dalam golongannya lewat perkawinan.

²² Pada saat Batavia menjadi kotapraja/gemeente pada tahun 1905 dan diubah lagi menjadi wilayah afdeling tahun 1908, jabatan komandan distrik dan kepala distrik diganti penyebutannya menjadi Wedana.

²³ Mayor Khouw An adalah opsir terakhir di Batavia yang meninggal tahun 1945 di kamp tawanan Jepang.

Pemerintah Kolonial Belanda juga memainkan peran penting dalam mendukung eksistensi golongan ini, dengan tetap menjaga hubungan baik dikarenakan memang golongan Kaum Cina²⁴ merupakan tulang punggung perekonomian Batavia. Hal ini dapat dilihat dari contoh adanya pengaturan pemusatan wilayah Kaum Cina dalam sistem distrik di Batavia (Chineesche kamp). Khusus distrik ke -6 itu diperuntukan bagi daerah konsentrasi pemukiman orang Cina yang nantinya disebut Chineesche kamp. Areal di kawasan Glodok- Petak Sembilan –Pinangsia adalah wewenang Kapitan Cina(Lohanda,2007,hal.178).

Pada masa sesudah 1950 ada satu bentuk ide untuk melakukan desentralisasi pemerintahan di seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Nusantara. Desentralisasi yang direncanakan oleh Belanda ini telah sebelumnya diteliti terlebih dahulu untuk mendapatkan standarisasi yang tepat bagi penerapannya di Nusantara. Pola standard birokrasi yang ada di pemerintahan daerah di Jawa (Kerajaan Jawa/Mataram) pada akhirnya dijadikan sebagai penyeragaman sistem pemerintahan anak negeri (Inlandsch-bestuur). Implikasi dari hal ini membuat harus diadakannya jabatan-jabatan seperti Patih atau Bupati, Wedana atau Demang, dan mengakibatkan dihapusnya jabatan komandan distrik karena sebetulnya memiliki tugas yang hampir sama dengan jabatan baru tersebut. Jabatan yang berjalan ini bertahan tidak lama karena kemudian Jepang datang melakukan invasi. Batavia tercatat hanya memiliki 3 Bupati dalam rentang periode 1924-1942 dan 4 patih dalam periode 1908-1942. Kebanyakan yang menjabat juga bukan berasal dari etnis Betawi melainkan beberapa berasal dari Jawa, satu petunjuk yang setidaknya meyakinkan saya akan kekuasaan di Jakarta yang sedari dulu tak pernah benar-benar dipegang oleh orang dari etnis asli (Betawi).

Pembentukan dan penyebutan Wilayah Penjaringan sebagai bagian dari Batavia, kemudian dimulai pada kepemimpinan Kolonialisasi Belanda baru ini (1816-

²⁴ Para imigran yang datang pada masa ini kebanyakan bukan lagi berasal dari Hokkien, melainkan dari Hakka dan Kanton .

1942). Hal ini tepatnya dimulai saat sistem pembagian wilayah Batavia yang awalnya berdasarkan distrik penomoran diubah menjadi kebentuk penamaan wilayah. *Sesudah tahun 1855, tujuh distrik itu dijadikan 4 distrik, diberi nama sesuai dengan tempat kedudukan para komandan yaitu distrik Penjaringan, distrik Mangga Besar, distrik Pasar Senen dan distrik Tanah Abang.*(Lohanda,2007,hal.191-192) Penamaan wilayah Penjaringan ini kemudian bertahan sampai kolonialisasi Belanda pergi dari Indonesia karena dikalahkan oleh Jepang dan akhirnya sampai pada masa sekarang.

Perjalanan Wilayah Penjaringan kemudian semakin meluas dengan kehadiran kampung –kampung kumuh di dalamnya. Kehidupan sosial wilayah ini dengan interaksi golongan miskin yang tertuju pada sentra ekonomi seperti Pelabuhan Batavia/Sunda Kelapa terus berkembang dengan coraknya yang khas. Satu keadaan yang seolah memperlihatkan bagaimana masyarakat miskin di wilayah ini memperbudakan dirinya dengan bekerja keras setiap hari untuk mendapat kesengsaraan sepanjang hidupnya. Walaupun mengakomodir kepentingan ekonomi besar, wilayah ini memang tetap tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya. Selain didera kemiskinan mereka juga harus berjuang dengan lingkungan yang tidak sehat - ancaman yang dulu membuat golongan Eropa kemudian meninggalkan wilayah ini. Kebanjiran dan kekeringan adalah kondisi yang setidaknya menggambarkan kekacauan ini. Air yang dipakai untuk sehari-hari berasal dari kanal yang tercemar, dimana pada musim kemarau pasti kering sehingga mau tak mau mereka harus membeli dari pedagang keliling.

Keadaan kampung di wilayah Penjaringan dan lainnya di Batavai memang sangat mengesankan dan berbanding terbalik dengan pemukiman kaum Eropa dan golongan miskin. Ketimpangan ini kemudian merupakan satu isu yang terus diperjuangkan kaum terdidik hasil kebijakan politik etis yang kemudian dikenal sebagai kaum nasionalis. Kebanyakan dari mereka memang kemudian berkedudukan di tempat penting seperti Dewan Kota, *Volksraad* dan posisi lain. Desakan dari

mereka kemudian banyak memberi perubahan dalam kebijakan kolonial namun bila ditelaah lebih lanjut memang tidak berpengaruh secara signifikan. Contoh dari hal ini dapat dilihat dengan pembangunan kampung percontohan yang namun pada kenyataannya harus dijual dalam harga tinggi sehingga tidak dapat menampung warga golongan miskin²⁵ dan terutama pribumi. Dewan kota pun akhirnya harus memaklumi pembangunan mereka yang telah salah sasaran dan merelakan wilayah ini dihuni oleh penduduk yang lebih kaya. Persetujuan perbaikan kampung pada tahun 1928 juga akhirnya tidak dapat dijalankan karena pemerintah kolonial harus menghadapi depresi ekonomi.

Dengan semua faktor yang membuat perbaikan kampung menjadi tidak teralisasi dengan baik, pada akhirnya semua bermuara pada ketidakseriusan pemerintah kolonial dalam menanggapi. Apa yang mereka bangun terkesan untuk menjamin kepentingan Bangsa Eropa beserta kroni-kronimya golongan ekonomi kaya dan menunjukkan keberhasilan mereka dalam melakukan penjajahan. Kaum miskin tetap terlupakan walau politik etis terus didengungkan, mereka dianggap para manusia malas yang harus terus dipaksa untuk mengejar standarisasi kemakmuran dalam benak kaum Eropa.

Pada tahun 1880-an Pelabuhan Tanjung Priok kemudian dibangun untuk menggantikan keberadaan Pelabuhan Batavia/Sunda Kelapa. Peningkatan endapan lumpur di muara kali memang menyebabkan kapal makin jauh bersandar dari pelabuhan, menyebabkan tidak efisiennya usaha mereka dari segi waktu dan biaya. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1877-1886 pada kenyataannya tidak membuat turun pamornya perekonomian Wilayah Penjaringan. Hal ini menjadi demikian selain dikarenakan terlebih dulu mewujud sebagai sentra ekonomi, investasi perusahaan swasta pun semakin besar semenjak sistem liberal diberlakukan tahun

²⁵ Golongan miskin di Batavia pada masa ini mencakup juga orang-orang dari golongan Eurasia dan Cina.

1870-an sehingga membuat banyak usaha dan perkantoran didirikan di wilayah ini. Faktor terakhir yang tentunya membuat Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok tidak berkembang adalah dikarenakan faktor malaria sebagai ancaman terbesarnya. Satu hal ini terbukti ampuh membuat orang berpikir dua kali untuk mengembangkan usahanya di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok atau malah menetap.

3.9. Kedatangan Jepang dan Masa Awal Kemerdekaan

Berulang pada tulisan diatas saya mencoba menjabarkan bagaimana alur kehidupan sosial wilayah daratan Sunda Kelapa –dalam konteks penulisan ini wilayah Penjaringan- mewujud dalam satu pemaknaan manusia dalam masa ke masa. Rentang waktu yang saya lukiskan berada dalam konteks sejarah, dimana ada baiknya untuk melengkapi runutannya saya menambahkan urutan terakhir dalam kehidupan kolonialisasi yang dirasakan Bangsa Indonesia yaitu masa Pemerintahan Jepang yang berlangsung singkat dan masa awal kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kedua masa ini bisa dikatakan merupakan satu bentuk gerbang peralihan yang membawa dan menegaskan wilayah Penjaringan pada satu pemaknaan baru. Menjadi demikian dalam anggapan saya, karena masa peralihan ini adalah satu tonggak transformasi yang cukup signifikan dimana embrio Bangsa Indonesia yang selama ini sembunyi dalam kabut, kemudian perlahan tampak dan mendapat roh kehidupannya dalam dengung kumandang proklamasi. Semua menjadi demikian dikarenakan berita dan gegap gempita kemerdekaan ini paling awal dirasakan masyarakat Jakarta dimana tentu wilayah Penjaringan juga termasuk didalamnya.

Kedatangan Jepang di Batavia pada pukul 3 pagi, 7 Maret 1942 merupakan awal bagi cegkram kekuasaan kolonialisasi Jepang yang berlangsung singkat di Indonesi. Walaupun tidak lama namun masa kolonialisasi ini dirasa sebagai pukulan berat bagi semua pihak di Batavia tak terkecuali bagi Kolonial Belanda sendiri. Pada masa ini Jepang secara terang-terangan berusaha sekuat tenaga mereorganisasi kawasan Indonesia sebagai kantong perjuangan untuk mendukung perjuangan mereka

di perang pasifik. Nusantara ditekan dalam situasi siaga penuh dan segala macam kegiatan kolonisasi pada masa itu agaknya memang dipengaruhi kepentingan perang pasifik itu. Karena alasan-alasan tersebut jugalah Batavia pada masa Jepang yang sekali lagi menjelma sebagai poros pusat pemerintahan di nusantara dimana – pada masa Jepang diubah nama menjadi Jakarta- kemudian banyak terjadi pergerakan dan pengumpulan massa untuk mendukung Jepang. Tidak sampai disitu, pada masa ini Jepang juga berusaha keras menghapus pengaruh barat. Berbagai cara dilakukan salah satunya dengan merubah berbagai penamaan tempat (jalan,plang,dll) ke dalam Bahasa Jepang atau malahan Bahasa Indonesia. Penamaan Batavia kemudian diganti menjadi Jakarta seperti yang dibicarakan orang pada masa sekarang. Jepang pada kelanjutannya kemudian berusaha keras mempengaruhi kehidupan sosial Batavia dengan melakukan penetrasi pengaruh kebudayaan Jepang melalui pendidikan. Pada akhirnya apa yang Jepang lakukan bagi kehidupan bangsa ini tak terlepas dari anggapan diri mereka sendiri sebagai “saudara tua”, pembebas dari belenggu Kolonial Belanda bagi pribumi Indonesia.

Dalam mempengaruhi kehidupan sosial di Batavia, Jepang memperlakukan kelompok-kelompok sosial lainnya seperti Kaum Belanda dan Cina sebagai golongan yang mesti diawasi dan ditekan kebebasannya. Kaum pria Belanda kesemuanya(terutama yang totok dan beberapa peranakan) dimasukan ke dalam kamp-kamp internir di luar Jakarta²⁶ terpisah dari wanita dan anak-anak yang memiliki lokasi kamp tersendiri yang terletak di Petojo (Kamp Cideng), Salemba dan Manggarai (Kamp Adek). Kebanyakan dari pria Belanda ini nantinya banyak ditransfer ke berbagai proyek pembangunan Kolonial Jepang di berbagai belahan dunia seperti proyek rel kereta Burma-Siam. Kehidupan Kaum Eropa sebagai kelompok taklukan karena kalah perang memang sangat menyedihkan dan sangat berbanding terbalik dengan posisi mereka selama ini. Keadaan yang menyedihkan ini juga kemudian dirasakan oleh berbagai pihak yang pada masa sebelumnya berdekatan dengan Kolonial Belanda seperti Kaum Cina dan Eropa peranakan (Eurasia),

²⁶ Satu yang berada di dalam kota ada di dekat Waterlooplein yang berupa bekas barak tentara.

beberapa dari mereka kemudian memang ikut dijebloskan penjara. Untuk mengorganisi dan memastikan kontribusi mereka bagi perang maka kedua kelompok kaum Eropa peranakan/Eurasia dan kaum Cina yang berada di luar kamp internir atau penjara dibuatkan suatu organisasi politik dan diwajibkan membayar pajak per-kepala dan donasi untuk membantu perang :

“... P.F.Dahler and Oei Tiang Tjoe respectively led Eurasian and Chinese movement which claimed that their followers were loyal Indonesians with no links to other homeland. Both groups were also subject to special levies on behalf of the war: they were required to register themselves, which meant paying a head-tax, and were called upon to make donations’ to Japanese coffers..” (Brugmans1960 dalam Abeyasekere1989:139-140)

Jepang kemudian memberikan lebih banyak kedudukan kekuasaan kosong yang ditinggalkan kaum Eropa dan Cina bagi kaum pribumi tapi masih dalam pengawasan pemerintah Jepang. Perdagangan yang tadinya dikuasai oleh kaum Cina, kemudian coba dialihkan kepada pihak pribumi pula yang dirasa-rasa lebih dapat dipercaya. Posisi pribumi yang terangkat pada masa Jepang sebenarnya tidak dirasakan menyeluruh oleh semua orang di Nusantara, karena mereka yang berada di daerah pedalaman kebanyakan dipaksa ikut menjadi pekerja paksa/Romusha mengerjakan proyek Jepang. Akibat dari hal ini menyebabkan Batavia sebagai pusat kekuasaan nusantara pada waktu itu didatangi berbagai masyarakat dari nusantara untuk menghindari pengambil paksaan mereka sebagai pekerja paksa/romusha. Periode masa kolonialisasi Jepang, pada intinya memang penuh ketidakpastian dimana semua orang di Batavia kebanyakan berfokus diri untuk memikirkan keberlanjutan kehidupan masing-masing mereka.

Kekuasaan Jepang di nusantara berjalan dalam waktu yang sangat singkat dibanding kolonial lain yang ada di Nusantara. Keadaan ini terjadi karena mereka kemudian merasakan kekalahan perang dalam kampanye perang dunia ke II dan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima serta Nagasaki. Kaum penggerak Bangsa

Indonesia pada masa itu yang terdiri dari para pemuda dan kaum tua menanggapi hal ini dengan pergolakan untuk pencetusan kata kemerdekaan. Dimana akhirnya diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sekali lagi Jakarta mengambil peran pentingnya dalam pergolakan yang menentukan nasib bangsa ini. Masa setelah proklamasi di Jakarta juga kemudian menentukan, karena ibukota Negara ini ditempatkan dalam wilayah ini oleh pemerintah awal (Soekarno-Hatta).

Semangat kemerdekaan ini kemudian dirusak dengan kedatangan Belanda yang membonceng Pasukan Inggris guna melucuti dan membebaskan tawanan Jepang. Kedatangan Belanda ini juga dimaksudkan untuk kemudian mengambil alih kekuasaan Kolonialnya kembali yang sudah di tanamkan selama 3,5 abad. Rakyat Indonesia-dalam konteks ini masyarakat Jakarta- yang telah mendapat legitimasi kemerdekaannya kemudian menanggapi tindakan agresor Belanda dengan berbagai hal semisal gerilya tiada henti di kantung-kantung perjuangan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan juga menyebabkan peran media disini lebih berkembang pesat dan dengan kehadiran koran-korannya²⁷ perjuangan Indonesia terus dipropagandakan. Kaum Cina dan Eropa (peranakan dan totok) juga berpendapat beragam dalam suasana awal kemerdekaan yang bergejolak ini. Sebagian mereka merasa tidak perlu ambil bagian dalam perjuangan ini karena mereka merasa orang asing di Indonesia, namun di lain pihak yang pro-republik dari Kaum Cina kemudian membentuk kelompok San Ming Hui di Jakarta pada tahun 1946. Sementara itu di lain pihak, sebagian kecil Kaum Eropa yang tergabung dalam kelompok progresif dipimpin Mr.B.van Tjin, terang-terangan mendukung Indonesia dalam kemerdekaan dan untuk menentukan nasibnya sendiri. Bila kita merangkum berbagai reaksi Bangsa Indonesia terhadap pergolakan awal kemerdekaan, masa ini kembali menempatkan Jakarta pula dalam peran vital revolusi kemerdekaan, semangat yang terus bertahan

²⁷ Di antaranya surat kabar RI “Merdeka”, surat kabar cina dan surat kabar berbahasa Inggris ”Independent” yang memang bermarkas pusat di Jakarta dan dengan gencar mendukung kemerdekaan Bangsa Indonesia.

sesampainya kemudian Belanda mengakui kemerdekaan Bangsa ini setelah KMB (Konfrensi Meja Bundar) atau tepatnya tanggal 27 Desember 1949.

Setelah semua masalah pemindahan kekuasaan dengan Belanda terselesaikan, rakyat Indonesia masuk dalam masa awal berdirinya secara utuh Bangsa Indonesia sebagai kesatuan yang berusaha menginkorporasikan wilayah nusantara secara keseluruhan. Jakarta menjadi titik nadir dalam kesatuan ini, dimana Soekarno berusaha untuk membuatnya sebagai kendaraan utama retorika pembangunan Bangsa ini. Untuk mengakomodasi hal ini berbagai rencana bangunan megah dan event-event dicanangkan²⁸, satu hal yang setidaknya menunjukkan keinginan Soekarno untuk menunjukkan kesiapan dan kemodern-an Bangsa ini dalam menyongsong kemerdekaan. Era kepemimpinan Sukarno menginginkan Jakarta secara keseluruhan dibangun sebagai simbol kemerdekaan Bangsa Indonesia yang baru merdeka. Bangunan megah didirikan, wajah kota disulap dengan patung-patung pawai kebebasan dan kemenangan. Masa kepemimpinan Sukarno mengharapkan Jakarta dibangun untuk kepentingan moral dan harga diri bangsanya sehingga kepentingan lain semisal kesejahteraan masyarakat agaknya dikesampingkan. Hal ini persis dengan apa yang Sukarno pikirkan dalam tulisan di buku Autobiografi-nya :

“Man does not live by bread alone . Although Djakarta’s alleys are muddy and we lack roads, I have erected a brick-and-glass apartment building, a clover-leaf bridge, and our superhighway, the Djakarta Bypass, and I renamed the streets after our Heroes: Djalan Diponegoro, Djalan Thamrin, Djalan Tjokroaminoto. I consider money for material symbols well spent. I must make Indonesians proud of themselves. They have cringed too long.”(Sukarno, 1966,hal.293)

Masyarakat di wilayah Penjaringan serta merta kemudian sekali lagi terpinggirkan layaknya mereka di berbagai wilayah lain di Ibukota. Kekuasaan Sukarno terkesan tidak menjamin kehidupan wilayah Penjaringan karena sibuk dalam proyek moralitas Bangsa Indonesia. Tidak sampai disitu Soekarno juga seakan membentuk personifikasi Indonesia sebagai pemimpin gugusan kekuatan baru (New Emerging

²⁸ Pembangunan Monas, Hotel Indonesia, monumen-monumen, GANEFO,dll . Dimana setengah dari anggarannya berasal dari pemerintah pusat.

Forces) dengan Jakarta sebagai “mercusuar”-nya. Keadaan ini membuat berbagai pembangunan terus digalakan dengan dana yang cukup besar dengan maksud memenuhi apa yang diharapkan Soekarno. Rencana tersebut membuat Jakarta mewujud sebagai anak emas pemeritahan²⁹ namun di satu sisi juga menarik arus imigran karena adanya kesempatan bekerja yang cukup besar di Ibukota. Arus imigrasi yang berkembang ini juga diikuti keinginan mereka yang menghindarkan diri dari ancaman pemberontakan terhadap kesatuan NKRI yang sering terjadi pada masa ini di berbagai daerah. Walaupun terjadi lonjakan imigrasi dari penduduk di luar Jakarta yang mencari kesempatan bekerja, perekonomian perkotaan masih di dominasi oleh kaum Eropa dan Cina. Pemerintah kemudian menanggulangi ini dengan melakukan promosi terhadap peran pribumi, kebijakan nasionalisasi perusahaan - meningkat pada perusahaan Belanda sejak kegagalan diplomasi mengenai Irian Jaya- dan pengambil alihan tanah partikelir yang mayoritas dimiliki Kaum Cina. Terlepas dari segala polemik yang dihadapi perekonomian ibukota, survei tahun 1953 menunjukkan Jakarta memang pada satu sisi telah berhasil menyediakan keuntungan dalam hal pekerjaan bagi kaum imigran, walaupun masih kebanyakan dari mereka tertampung dalam sektor-sektor informal dan kalah bersaing dari pemilik modal besar (seperti Kaum Cina).

Wilayah Penjaringan pada masa ini bertumbuh sebagai daerah kumuh di pinggiran Jakarta. Masyarakatnya tetap berasal dari golongan miskin yang masih menggantungkan kehidupan pada kegiatan di Pelabuhan Sunda Kelapa, sedangkan para migran juga terus berdatangan berharap dapat mengais rejeki di pelabuhan ini. Kebanyakan dari mereka memang sangat tertarik dengan pesona ibukota yang jelas mengkilap dibandingkan daerah asalnya, survei pada tahun 1953 setidaknya menunjukkan hal ini dimana mayoritas orang datang ke Jakarta memang dikarenakan alasan ekonomi. Mereka terus berdatangan dikarenakan terbuju akan rayuan pendatang dari sesama etnis yang terlebih dahulu hidup di Jakarta. Di wilayah Penjaringan fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya buruh dan pekerja di

²⁹ Hampir dua per tiga dari total pinjaman pemerintah diberikan kepada Jakarta.

Pelabuhan Sunda Kelapa dari wilayah pesisir Indonesia seperti Sulawesi, Banten, dan Jawa. Beberapa dari mereka bahkan merupakan pekerja musiman yang tinggal selama beberapa bulan di kota untuk kemudian pulang ke kampungnya pada masa bercocok tanam dan saat lebaran. Imigran asal Jawa Tengah dan Timur memiliki kecenderungan seperti ini, kebanyakan dari mereka memang memilih tinggal di kampung karena tidak betah hidup di Ibukota.

Perkembangan masyarakat yang semakin besar membuat perkampungan yang lama tidak dapat dimukimi. Masalah perumahan di Jakarta pada masa ini memang juga dirasakan sebagian besar warga Penjaringan, dimana kebanyakan dari mereka kemudian memanfaatkan lahan kosong secara semena-mena untuk mengatasinya. Pemukiman penduduk di Penjaringan pada masa ini bertumbuhan secara liar membentuk perkampungan baru. Lokasi seperti rawa-rawa yang banyak ada di wilayah Penjaringan tidak luput dijadikan sebagai tempat tinggal (perkampungan). Salah satunya menjadi pemukiman padat yang dinamakan Muara Baru dan merupakan wilayah favorit para imigran pada masa sekarang. Beberapa dari masyarakat juga mendiami fasilitas umum seperti di bawah jembatan layang, bantaran sungai, waduk, dan lain lain. Rumah mereka dibangun dengan papan seadanya yang sangat rapuh. Jaringan listrik dan telepon masih sulit didapat, satu hal yang memang dialami juga oleh seluruh masyarakat Ibukota di masa itu. Dalam keseharian mereka harus berjuang dengan kesulitan finansial dan juga faktor alam yang ikut mencobai kehidupan masyarakat di wilayah ini. Seperti yang kita ketahui Penjaringan memang merupakan daratan dari Pelabuhan Sunda Kelapa yang dekat dengan laut sehingga banjir air pasang laut (Rob) sangat sering terjadi dalam keseharian. Sementara itu mengingat rumah dibangun dalam lahan sempit yang sangat berdempetan satu sama lain membuat kebakaran cepat menjalar dan sudah menjadi langganan bencana bagi wilayah ini.

Kehidupan sosial di wilayah Penjaringan juga merujuk pada kehidupan Jakarta pada masa ini yang menempatkan imigran dari berbagai etnis sebagai aktor utama dalam mempengaruhi perkembangan kebudayaan. Bisa dikatakan kehidupan

Jakarta dan khususnya wilayah Penjaringan dibentuk dalam kompleksitas interaksi para pendatang di dalamnya. Keberlangsungan kehidupan mereka bisa dikatakan juga ditunjang dengan kemampuan untuk kemudian menyesuaikan diri dan bernegosiasi dengan realita lingkungan kosmopolitan sehari-hari –bahasa beserta dialeknya, kebiasaan sosial, dll- di Jakarta. Mereka yang datang langsung dari berbagai wilayah di Indonesia, hidup dalam keberagaman atau dalam artian tidak membentuk pengelompokan etnis secara kaku. Anak –anak dan keturunan dari generasi para imigran ini kemudian nantinya mengidentifikasi diri sebagai “Orang Jakarta” , bukan berdasarkan dari asal kedua orang tua mereka. Suatu nuansa keberagaman sosial Jakarta yang oleh seorang penulis bernama Tjalie Robinson di ibaratkan sebagai kebudayaan gado-gado ini mengharapakan setiap pendatang untuk bernegosiasi dan belajar hidup berkompromi dalam perbedaan. Toleransi merupakan gairah kehidupan Jakarta pada masa itu yang memang tercipta oleh adanya keadaan untuk bertahan hidup yang mengharuskan itu terjadi.

Suasana toleransi yang mulai terbentuk sedemikian rupa kemudian ditentang oleh beberapa kalangan intelektual . Hal ini dikarenakan menurut mereka ketercairan tersebut dapat menutup ruang bagi nasionalisme yang khas bernafaskan ke-Indonesia-an. Pramoedya Ananta Toer menjelaskan suasana ini sebagai suatu krisis berkepanjangan dalam identitas masyarakat Jakarta yang menurutnya hanya “kumpulan besar desa-desa” yang hanya mencomot kebudayaan asal masing masing dan mengembangkannya di Jakarta. Sementara itu Hatta³⁰ dengan keras mengkritisi suasana cair ini yang kemungkinan berdampak dalam masuknya pengaruh asing (terutama yg buruk) yang sebenarnya hanya ditiru tanpa tahu maknanya secara benar dan ditakutkan berdampak buruk bagi kesatuan nasionalisme Indonesia yang baru terbentuk. Jakarta pada masa kepemimpinan negara dijabat oleh Soekarno memang dijalankan sepenuhnya dengan sentuhan langsung sang Proklamator. Kesan ini menjadi lebih terasa saat Soekarno memutuskan Indonesia harus berada dalam alur

³⁰ Argumen Hatta ini diperkuat dengan kemunculan geng anak muda berandalan yang terinspirasi film barat pada tahun 1950 an

demokrasi terpimpin dimana dia mentahbiskan dirinya sebagai penguasa seumur hidup. Dalam perjalanan kehidupan negara pada masa ini, kesatuan rakyat dalam nasionalisme adalah harga mati yang tidak dapat ditawar. Pengaruh asing terutama barat adalah bentuk-bentuk yang tidak dapat ditolerir dan harus hilang dalam keseharian Bangsa ini. Segala bentuk roda kehidupan Bangsa Indonesia harus berfokus dalam persatuan dan kesatuan, sehingga unsur –unsur yang dianggap mengganggu hal ini harus segera dihilangkan dalam kehidupan sosial Bangsa Indonesia. Kesemuanya ini nyata dalam bagaimana tekanan dan larangan pemerintah terhadap para pemuda yang pada masa itu sedang giat mengikuti trend barat melalui film dan berbagai produk lainnya.

Para warga asing seperti Eropa Peranakan dan Cina juga mengalami diskriminasi salah satunya dengan penutupan sekolah-sekolah mereka yang kebanyakan memakai bahasa Cina dan Belanda pada tahun 1958, perubahan nama surat kabar Cina di Jakarta yang tadinya Sin po dan Keng po dipaksa harus memakai nama Indonesia dan mempekerjakan pribumi, dan lain-lain. Masa demokrasi terpimpin ini merupakan satu tali kekang bagi nilai-nilai asing, dimana hal ini dirasa perlu untuk dilakukan menurut Soekarno dikarenakan Bangsa ini belum selesai dalam menegosiasikan dan membentuk rasa nasionalisme secara menyeluruh dalam satu kesatuan. Pada akhirnya apa yang diimpikan oleh Soekarno harus tak terlaksana dengan baik dikarenakan Bangsa ini harus mengalami pengalaman pahit G30SPKI , yang pada akhirnya menurunkan Soekarno dan membuat bangsa ini masuk dalam satu rentang sejarah orde baru dalam pimpinan Soeharto.

BAB IV

PERDAGANGAN DAN NEGOSIASI BUDAYA

4.1. Kemunculan Suharto

Setelah Sukarno turun dengan diawali peristiwa G30S/PKI negara ini dipimpin oleh Suharto, seorang Jendral yang sangat tampil dalam peristiwa itu. Indonesia akhirnya harus masuk ke dalam gerbang kekuasaan baru yaitu kehidupan dalam masa kepemimpinan Suharto dan kerabatnya yang dikemudian hari dikenal dengan masa Orde Baru.

Jakarta sebagai ibukota pada masa ini awalnya dipimpin oleh Mayor Jendral Ali Sadikin, seorang Marinir yang sangat Sukarno. Kehadirannya sebagai pemimpin Ibukota ditunjuk langsung oleh Sukarno di akhir kepemimpinannya pada April 1966. Hal ini, menyebabkan banyak rumor berkembang seputar pengangkatan Sadikin sebagai titipan Sukarno bagi pemerintahan Orde Baru untuk memimpin Jakarta.

Tidak seperti Sukarno yang ingin membangun moral dan harga diri Bangsa Indonesia, Orde Baru dalam kendali Suharto sangat menginginkan Indonesia bertumbuh perekonomiannya secara fungsional dalam struktur pusat kekuasaan Orde Baru. Disamping perbedaan paradigma kekuasaan mereka tersebut, kesamaan Sukarno dengan Orde baru tampak dalam keinginan mereka agar rencana pada masanya sangat terepresentasikan di Jakarta. Bagi mereka berdua Jakarta memang merupakan representasi Indonesia seutuhnya, simbol terpenting bagi Negara Indonesia.

Dalam konteks Orde Baru pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Jakarta akhirnya dijadikan pusat bagi perputaran modal dan perdagangan Indonesia. Sadikin sebagai Gubernur pada kenyataannya juga merasa bahwa sudah menjadi tugasnya membuat hal ini terlaksana dengan baik. Selama kepemimpinannya -

pada 1966-1977- Jakarta dibawa masuk dalam rencana besar Orde Baru yang mengedepankan pembangunan perekonomian Indonesia. Pada masa ini berbagai rencana pertumbuhan ekonomi dibangun dan dijalankan. Modal asing yang mulai gencar masuk ke Indonesia kemudian ikut pula diarahkan dalam gerak perekonomian Jakarta. Dalam kepemimpinan Orde Baru, Jakarta awalnya memang dijadikan pusat investasi asing sehingga agaknya tidak susah merealisasikan modal asing bagi berbagai kepentingan usaha nasional disini.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi Masa Awal Orde Baru

Wilayah Penjaringan dalam rencana pertumbuhan ekonomi Orde Baru dibangun sebagai kawasan industrial di pinggiran Kota Jakarta. Berbagai sentra ekonomi di wilayah ini kemudian dikembangkan untuk mencapai representasi pertumbuhan perekonomian. Rencana Orde Baru di wilayah ini kemudian cukup signifikan dapat terlihat dalam pengembangan kompleks Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu termasuk terbesar di Indonesia dijadikan sebagai salah satu pusat urusan angkut berat perdagangan ekspor dan import lewat jalur laut.

Untuk merealisasikan hal itu, lautan di sekitar pelabuhan yang pada awalnya tidak dapat di masuki oleh kapal yang besar terus diuruk dan daratannya diperluas agar mendapatkan kedalaman yang cukup. Fasilitas pelabuhan juga kemudian ikut diperbaharui menjadi lebih modern sehingga kapal-kapal asing dapat lebih efisien menjalankan perdagangan ekspor-import. Terutama untuk lebih mendukung kegiatan ekspor, mayoritas kapal pribumi yang masih berupa kapal kayu kemudian juga diarahkan untuk mengangkut hasil bumi dari seluruh Indonesia ke pelabuhan ini. Kelanjutan dari pengumpulan sumber daya alam komoditas ekspor yang sudah dilakukan kapal kayu tersebut kemudian akan diangkut kapal asing yang sudah terlebih dahulu menunggu di pelabuhan ini. Pada masa ini pengumpulan komoditi sumber daya alam untuk ekspor memang sangat bergantung pada keberadaan kapal kayu yang salah satunya berasal dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Hal ini harus

dilakukan mengingat kapal eksport-import milik asing jelas berbadan besar dan sudah pasti tidak bisa menembus selat-selat di Indonesia. Selain untuk mendukung kegiatan eksport-import keberadaan kapal kayu di Pelabuhan Sunda Kelapa juga penting untuk melakukan pengiriman barang dari Jakarta. Pada masa ini Jakarta memang menjadi pusat peredaran barang-barang kebutuhan primer dan sekunder, sehingga pengirimannya lewat jalur laut ke seluruh Indonesia sangat bergantung kehadiran kapal kayu dari pelabuhan ini.

Pada akhirnya ketergantungan perdagangan Indonesia dari jalur laut terhadap Pelabuhan Sunda memang memberi keuntungan yang cukup besar. Hal ini terjadi tentu disebabkan belum banyaknya pelabuhan lain dengan standard internasional yang dapat dijadikan persinggahan kapal-kapal asing pada waktu itu. Di sebelah barat wilayah Penjaringan sebenarnya telah hadir Pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun sejak zaman Belanda. Alasan dari pembangunan tersebut juga disebabkan oleh mendangkalnya lautan Pelabuhan Sunda Kelapa akibat pengaruh alam dan faktor manusia. Sebenarnya bila menelisik lebih jauh, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok memang dibangun kemudian jelas lebih besar dan strategis untuk melakukan eksport-import dibandingkan Pelabuhan Sunda Kelapa. Namun dalam pemerintahan awal Orde Baru mereka nampaknya lebih suka bila kegiatan perdagangan dijalankan oleh keduanya. Semua itu dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat dari perdagangan lewat jalur laut.

Pelabuhan Sunda Kelapa yang begitu maju dalam kegiatan perekonomian kemudian makin melejit saat eksport kayu sedang marak di Indonesia. Bila merujuk pada peraturan "*illegal logging*" yang belum dijalankan dengan baik pada masa ini, peran pengusaha dan permainan pemerintah juga memperlihatkan bahwa mereka hanya turut 'melanggengkan' usaha yang sangat merusak lingkungan ini terus berjalan. Peran warga wilayah Penjaringan dalam alur eksport kayu di Pelabuhan Sunda Kelapa hanya terbatas sebagai tenaga pengangkut dengan kapal kayu dan tentu kuli di pelabuhan. Pelaut Indonesia pada masa ini memang belum banyak memiliki

kapal besar dengan daya jangkau antar benua, hal ini kemudian membuat dalam kegiatan ekspor mereka kebanyakan berperan sebagai pengumpul dengan kapal layar kayu tersebut. Walaupun sederhana namun keberadaan mereka terbukti sangat vital bagi jalannya kegiatan ekspor kayu pada masa itu. Keterbatasan teknologi kapal mereka malah terbukti sangat bermanfaat untuk pengumpulan kayu di wilayah tebingan yang biasanya melewati selat-selat kecil. Meningkatnya kemauan pasar internasional akan kebutuhan kayu bahkan menyebabkan semakin sering kapal kayu dan tenaga masyarakat lokal di wilayah ini beroperasi.

Selain berfungsi sebagai angkut berat, pelabuhan ini juga sudah lama menjadi pusat kegiatan nelayan yang biasa beroperasi di teluk Jakarta. Tepat disamping pelabuhan bahkan telah berdiri pemukiman warga yang mencari nafkah dengan berdagang ikan sejak zaman Belanda. Lokasinya yang dekat dengan laut dan Pelabuhan Sunda Kelapa memang sangat strategis sehingga dalam keseharian nelayan yang baru selesai menjaring biasanya dapat langsung menjual di daerah yang dikenal dengan nama “Pasar Ikan” ini. Selain mendapat masukan ikan dari nelayan sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan juga mendapat kiriman hasil laut dari beberapa titik di Jakarta seperti Kamal Muara, Cilincing, Muara Angke, dan lain lain.

Pada masa awal Orde baru keberadaan Pasar Ikan yang masuk dalam kompleks Pelabuhan Sunda kelapa kemudian dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan ikan di seluruh Jakarta. Sistem penjualannya dibuat semi- pelelangan yaitu dengan cara pedagang ikan membeli dari nelayan kemudian masing-masing pedagang menjualnya sesuai dengan kemauannya dengan mempertimbangkan kesepakatan dengan penjual lain. Fungsi pemerintah sebagai pengawas perdagangan memang belum terlalu terlihat pada masa ini karena seluruh harga ikan benar-benar di serahkan kepada kesepakatan pedagang. Pemerintah juga belum menarik pajak dan membiarkan kegiatan perdagangan berjalan sebegitu adanya seperti sejak berdirinya pasar ikan pada masa lalu. Walaupun jelas ingin mengembangkannya, pemerintah

Orde Baru pada awalnya memang terkesan masih setengah hati dalam membangun Pasar Ikan.

Perkembangan perekonomian wilayah Penjaringan begitu juga Jakarta pada masa awal Orde Baru pada akhirnya menyebabkan melimpahnya arus pendatang. Wilayah Penjaringan yang pada masa ini berkembang sebagai kawasan industri kelautan sudah tentu kemudian menarik kedatangan berbagai masyarakat yang ingin mendapat kesempatan bekerja di bidang tersebut. Faktor lain kedatangan pendatang tentu juga dikarenakan kelompok-kelompok etnis yang terlebih dahulu ada seperti orang dari Bugis/Makasar, Banten, Jawa, Madura, dan lain lain juga kemudian ikut membujuk dan memfasilitasi kedatangan sanak kerabatnya. Kebanyakan dari mereka memang ikut tergiur akan kemajuan perekonomian wilayah ini dalam masa Orde Baru setelah melihat banyak saudaranya sukses. — Dalam sektor formal maka Pelabuhan Sunda Kelapa dan pabrik-pabrik yang dibangun di wilayah Penjaringan menjadi tujuan para pendatang, sedangkan dalam sektor informal mereka berharap dapat meneruskan pekerjaan mereka di kampung halaman seperti nelayan, pelaut, pedagang, dan lain lain. Akibat melimpahnya pendatang berbagai perkampungan kemudian berkembang lebih banyak membentuk pemukiman baru seperti di daerah yang dinamakan Tanah Tinggi dimana kebanyakan ditinggali orang Jawa, Tanah Merah yang merupakan *pecinan* (konsentrasi tempat tinggal orang Cina), Bandengan dan lain-lain.

Seperti imigran lain di Jakarta pada masa awal Orde Baru, para pendatang di wilayah Penjaringan juga banyak yang kemudian memutuskan hidup bersama kelompok etnisnya masing-masing. Keadaan seperti ini di wilayah Penjaringan dapat dilihat dalam kehidupan di Kampung Luar Batang, pemukiman tertua di wilayah ini. Sedari dulu terbentuknya perkampungan ini memang sudah dihuni oleh etnis Banten, Cirebon, Sulawesi dan para pekerja dari etnis lain yang dipekerjakan oleh Belanda. Mereka yang bisa dikatakan pionir kemudian mengembangkan kehidupannya, beranak pinak sampai melahirkan keturunan yang kemudian hadir pada masa

berikutnya. Keberadaan kelompok etnis ini kemudian pada kelanjutannya membuat para pendatang dari masing-masing daerah asalnya kemudian memilih untuk tinggal di pemukiman ini. Alasan mereka memilih tinggal dengan sesama etnisnya bermacam-macam namun biasanya dikarenakan untuk mendapat gambaran kondisi lingkungan baru di Jakarta dan bantuan dalam menjalani kehidupan. Walaupun tinggal berkumpul dengan sesama etnis dalam keseharian mereka kemudian berbaur dalam interaksi dengan berbagai etnis lainnya. Bersama-sama mereka kemudian mengisi keseharian wilayah Penjaringan, membentuk kehidupan yang merepresentasikan wilayah ini secara keseluruhan.

Di wilayah Penjaringan gambaran dari persebaran masyarakat pada masa awal Orde Baru dapat dilihat dalam aktivitas perekonomian mereka di beberapa sentra ekonomi seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan, dan pabrik industri. Orang dari Sulawesi dan Banten sangat menguasai pekerjaan yang berhubungan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pasar Ikan, mereka kebanyakan bekerja sebagai nelayan, penjual ikan, anak buah kapal, preman, dan lain lain. Di Pelabuhan Sunda Kelapa selain berlabuh kapal-kapal besar dari besi yang memiliki kemampuan menjelajah benua, banyak juga kapal kayu yang berfungsi menjelajahi antar pulau di Indonesia. Bila kebanyakan kapal besar dimiliki oleh orang asing maka kapal kayu sepenuhnya dipunyai pribumi Indonesia yaitu orang-orang dari Sulawesi, khususnya orang Bugis. Begitu banyak orang dari Sulawesi memiliki kapal kayu membuat usaha perkapalan (angkut berat) ini sangat identik dengan mereka, orang dari etnis lain seakan tidak mungkin memiliki kapal-kapal layar ini dan walaupun ada pasti sangat sedikit. Orang dari etnis Jawa juga banyak terdapat di wilayah Penjaringan. Beberapa dari mereka bekerja sebagai nelayan dan pekerja kasar pada pelabuhan dan pedagang di Pasar Ikan namun tetap mereka lebih menguasai pekerjaan dalam sektor informal di luar itu seperti pedagang makanan, penjual di pasar, tukang becak dan lain-lain. Orang dari Madura di wilayah Penjaringan adalah kelompok etnis yang identik dengan kesan kumuh. Hal ini tentu disebabkan mayoritas pekerjaan mereka yang biasa mencari nafkah dalam usaha lapak besi tua dan di bidang prostitusi

(mereka menyewakan rumah- rumah untuk kegiatan tersebut). Orang Madura di wilayah Penjaringan juga banyak yang bersifat temporal atau tidak menetap dalam waktu lama. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah orang-orang Madura yang berprofesi sebagai pembeli ikan di Pasar Ikan yang biasa disebut *Pelele*. Walaupun hanya datang untuk membeli ikan keberadaan mereka dalam keseharian wilayah Penjaringan memang cukup mengesankan seperti nanti akan saya jelaskan. Kelompok Masyarakat terakhir yang ada di wilayah Penjaringan merupakan Orang Cina peranakan. Orang dari golongan Cina Peranakan yang sudah lama ada di wilayah Penjaringan merupakan kaum Cina yang lebih miskin dibandingkan mereka yang ada di Pasar Baru dan Glodok. Di masa awal Orde Baru mereka kebanyakan tetap berwirausaha dengan membuka toko-toko dalam berbagai bentuk seperti pada masa-masa sebelumnya.

Dalam konteks kehidupan wilayah Penjaringan pada masa Orde baru, pembicaraan saya dengan beberapa tokoh masyarakat setidaknya memberi gambaran yang cukup jelas tentang kehidupan perantau di wilayah Penjaringan pada masa itu. Adalah Pak Buyung sebagai sesepuh wilayah Penjaringan yang pertamakali saya temui untuk menceritakan pengalamannya pada masa Orde Baru. Dia merupakan generasi pertama pendatang dari Sulawesi Selatan -Makasar- yang mengadu nasib ke wilayah Penjaringan setelah Indonesia merdeka atau tepatnya tahun 1950-an. *“Bapak paling masih lima tahun saat ayah meninggal. Karena di kampung susah sekali cari makan... ibu akhirnya membawa bapak yang anak satu-satunya merantau ke Jakarta, disana kami tinggal di Kampung Luar Batang dengan paman”, ujar Pak Buyung sembari mengerutkan keningnya.* Pak Buyung bercerita pada saya bahwa pada masa itu orang Sulawesi Selatan memang sedang ramai melakukan imigrasi ke berbagai tempat di Indonesia. Bagi mereka terutama yang biasa hidup dengan berdagang lewat jalur laut, sudah menjadi kebiasaan melakukan hijrah ke kota-kota di Indonesia yang memiliki bandar pelabuhan besar seperti di Sumatra, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok, dan lain lain.

Kegiatan merantau memang menjadi ciri permanen orang Bugis/Makasar – bahkan hingga kini- yang tentu dilakukan karena berbagai kepentingan terutama unsur perekonomian. Hal ini kemudian senada dengan apa yang ditulis Pelras¹ sebagai ahli Bugis/Makasar dalam bukunya berjudul “*Manusia Bugis*”. Ia menulis dengan data imigrasi orang Bugis/Makasar ke beberapa daerah yang menunjukkan bahwa merantau memang kemudian dijadikan sebagai strategi ekonomi bagi sebagian besar orang dari etnis Bugis/Makasar. Masih berkenaan dengan Pelras saya kemudian berpendapat bahwa motif “merantau” orang Bugis/Makasar ke wilayah Penjaringan pada masa Orde Baru adalah sebagai jalan untuk mencari rezeki (ma’sappa dalle’) dan menegakan harga dirinya. Hal seperti ini biasa dilakukan etnis Bugis/Makasar terutama dari kaum orang biasa untuk membuktikan diri dan memperbaiki nasib.

“Menurut Acciaioli, bagi orang Bugis istilah merantau itu menyiratkan “lebih dari sekedar mencari keuntungan... tetapi juga suatu upaya untuk memperbaiki nasib. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu cara menangani nasib diri sendiri, yang mencerminkan pandangan mereka yang rumit mengenai hubungan antara tabiat pribadi dan takdir, sekaligus mencerminkan pandangan hidup orang biasa yang berbeda dengan sikap bangsawan yang selalu mendasarkan penilaian (terhadap sesama manusia) secara hierarkis berdasarkan keturunan” (Acciaioli dalam Pelras2006: 376-377).

Karena terlalu banyaknya orang merantau pada masa Orde Baru kemudian sempat menyebabkan Sulawesi Selatan kekurangan sumber daya manusia. Antara 1969 dan 1980, populasi penduduk Sulawesi Selatan bahkan mengalami penurunan 8.762 jiwa (Mukhlis dan Robinson, Migrasi:VII). Hal ini bahkan terjadi walaupun sejak 1930-an, beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti di Luwu’ dan Polewali dijadikan daerah transmigrasi orang Jawa, sekaligus membuktikan bahwa gelombang migrasi orang Bugis bukan karena kelebihan populasi atau tidak adanya lahan garapan di kampung halamannya.

¹ Walau dalam penjelasannya ia memang tidak pernah menuliskan secara rinci mengenai imigrasi orang Bugis/Makasar pada zaman Orde Baru di Jakarta namun jelas ada kesamaan indikasi dengan orang Bugis/Makasar di tempat lain yang berusaha dalam bidang perdagangan dengan laut.

Masa kecil Pak Buyung di wilayah Penjaringan adalah Jakarta saat masih dalam bayang-bayang kepemimpinan Sukarno, dimana kemudian dengan sangat getir ia gambarkan sebagai periode keterpurukannya dalam kemiskinan. *“Ibu kerja jadi buruh cuci pakaian yang penghasilannya tidak menentu ... Sering kami berdua tidak makan cukup dalam sehari, paman memang sering bantu tapi lama-lama kami tidak enak juga”*, ujar Pak Buyung. *“Ia sudah punya istri dengan lima anak yang saat itu masih kecil-kecil”*, tambahnya lagi. Kemiskinan yang dirasakan Pak Buyung pada kenyataannya juga dirasakan mayoritas masyarakat wilayah Penjaringan pada masa itu. Mereka sebagai pendatang generasi pertama setelah kemerdekaan Indonesia sangat merasakan bagaimana Sukarno tidak mempedulikan kesejahteraan masyarakat bahkan untuk makan sehari-hari. Pada saat Sukarno lengser dan digantikan Suharto, Pak Buyung setidaknya merasakan kehidupan mulai membaik. Pelabuhan Sunda Kelapa mulai ramai didatangi kapal-kapal asing dan kehidupan masyarakat wilayah Penjaringan mulai sibuk dengan kegiatan perekonomian. *“Suharto memang banyak dihujat tapi dibanding sekarang atau jaman Sukarno, hidup pas Orde Baru itu paling enak”*, ujar Pak Buyung.

Pada saat Orde Baru datang dengan rangsangan pembangunan perekonomiannya Pak Buyung sudah menjadi remaja usia tanggung dan telah hidup sendiri keluar dari rumah. Dikarenakan berbagai cemooh orang sekitar sebab dirinya miskin dan terkesan berandalan, ia kemudian memutuskan hidup sendiri dengan maksud membuktikan diri. Bersama dengan rekan sepermainannya Pak Buyung bekerja di Pasar Ikan sebagai kuli angkut ikan untuk mengisi perut. Pekerjaannya sebenarnya sangat sederhana, ia hanya bertugas mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan untuk dibawa ke pedagang dan kemudian membantu pembeli mengangkut ikan ke truk-truk mereka. Bisa dikatakan pekerjaannya menjadi buruh merupakan pemasukan terkecil dalam kegiatan perdagangan di Pasar Ikan, namun menurutnya semua itu harus dilakukan guna menyambung hidup. Keikutsertaan Pak Buyung dan anak sebayanya dalam kegiatan ekonomi wilayah Penjaringan memang telah

dianggap biasa bagi masyarakat dan oleh keluarga anak itu sendiri. Kebanyakan anak di wilayah ini –sampai masa sekarang- bahkan memang tidak sempat mengenyam pendidikan formal yang memadai karena sibuk bekerja. Mereka yang awalnya hanya bermain-main pada akhirnya diajak orang yang lebih dewasa yang biasanya masih kerabat untuk ikut berkerja sebagai buruh di Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan, dan pabrik-pabrik yang ada di wilayah Penjaringan.

Kehidupan di wilayah Penjaringan yang sedari awalnya ditinggali kaum miskin agaknya kemudian memang mulai menggeliat dalam rencana perkembangan perekonomian pada masa awal Orde Baru. Bersama para pendatang yang kebanyakan adalah kerabat mereka, kaum miskin di wilayah ini dipekerjakan sebagai tenaga kerja kasar bagi kepentingan sentra perekonomian yang sedang dirangsang pertumbuhannya. Sadikin memang mempromosikan Jakarta sebagai kawasan dengan keuntungan tenaga kerja yang murah dan layanan pendukung yang lengkap dibanding daerah lain di Indonesia. Tercatat selama periode 1967 hingga 1971, Jakarta mendapatkan 63 persen proyek investasi asing berupa perusahaan manufaktur.

4.3. Euforia dan Negosiasi Kebudayaan

Berbagai kebijakan perekonomian pada masa awal Orde Baru jelas membawa bentuk perubahan tersendiri dalam perjalanan kehidupan wilayah Penjaringan. Seperti pada masa kerajaan, kolonialisasi dan awal kemerdekaan, maka orde Baru dengan paradigma pertumbuhan ekonominya memang menghadirkan suatu gerbang peralihan masa tersendiri bagi wilayah ini. Suatu bentuk yang kemudian dapat ditempatkan sebagai transformasi struktural dan kultural tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Dimana keadaan tersebut menjadi nyata saat masyarakat wilayah Penjaringan yang cenderung miskin harus bersentuhan dengan perdagangan internasional, kapitalisme dan ekspektasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Interaksi masyarakat dalam kegiatan perekonomian di wilayah Penjaringan kemudian memang dapat memberi gambaran kehidupan wilayah penjaringan dalam

transformasi yang dibawa era Orde Baru. Menjadi demikian dikarenakan kita setidaknya dapat melihat bagaimana kehidupan mewujud dalam satu rencana pembangunan ekonomi yang tertuju pada kekuasaan Orde baru di satu sisi dan pemahaman masyarakat terhadapnya di sisi lain. Suatu bentuk interaksi beragam manusia dalam memaknai kehidupan yang dinaungi satu bentuk hegemoni kekuasaan yang totaliter.

Dalam kehidupan masa awal Orde Baru, masyarakat Penjaringan jelas sangat senang dengan kehadiran pembangunan ekonomi. Suatu masa yang mereka harap dapat menghasilkan tetesan keuntungan yang terus meluber bagi kemakmuran kehidupan mereka. Namun selain itu, hal yang mendasar adalah jelas mereka sangat tertarik dengan keuntungan besar setelah lama hidup miskin dalam era pemerintahan Sukarno. Mereka merasa terlalu lama tertekan dalam pembangunan simbolis yang hanya menyengsarakan pada waktu Sukarno berkuasa. Oleh karena itu Masa Orde baru yang pada awalnya menawarkan kemajuan perekonomian jelas menjadi pengharapan bagi kehidupan mereka. Dalam pemahaman saya, pada masa ini masyarakat wilayah Penjaringan memang menjadikan pembangunan Orde Baru sebagai titik balik bagi kehidupan perekonomian wilayah ini. Hal ini sangat terlihat di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pasar Ikan yang kegiatan perekonomian terus berkembang dengan pesat. Para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia juga terus berdatangan karena tertarik akan keuntungan yang ditawarkan perkembangan perekonomian wilayah ini.

Dibandingkan pendatang dari daerah lain, orang Bugis dan Makasar kemudian menjadi salah satu kelompok etnis yang memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah Penjaringan. Kebanyakan dari mereka bahkan pada akhirnya telah menjadi orang yang kaya raya, jelas jauh berbeda seperti saat masih berada di daerah asal. Kekayaan yang didapat kelompok masyarakat Bugis/Makasar mewujud dikarenakan keberhasilan mereka memanfaatkan perkembangan perdagangan laut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Umumnya hal ini terjadi dikarenakan mereka merupakan mayoritas

pemilik kapal kayu yang pada masa ini sangat penting dalam kegiatan perdagangan laut. Selain itu mereka juga menguasai usaha kuli angkut berat yang dilakukan dengan cara memandori kuli-kuli yang mayoritas ber-etnis Banten dan Jawa. Kebanyakan orang Bugis/Makasar yang telah menjadi kaya dalam satu bidang usaha kemudian juga mulai mengembangkannya ke bidang lain semisal perdagangan ikan, warung kelontong dan lain lain.

Kekayaan orang Bugis/Makasar kemudian sangat terlihat dalam kehidupan Kampung Luar Batang yang pada masa itu banyak diisi bangunan rumah mewah mereka. Kehidupan Kampung Luar Batang yang sedari awal terbentuknya diisi oleh orang dari berbagai kelompok etnis, kemudian juga lebih didominasi oleh kehadiran orang-orang dari Sulawesi Selatan -khususnya orang Bugis/Makasar². Hal ini terjadi dikarenakan orang Bugis/Makasar yang telah berhasil memang kemudian banyak membawa sanak saudara mereka di kampung untuk tinggal disini. Kehadiran sanak saudara mereka ini nantinya dimanfaatkan dalam usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh kerabat kaya mereka di wilayah ini. Walaupun awalnya terlihat seperti diperkerjakan dalam usaha kerabatnya, mereka tetap diberi kebebasan bila suatu waktu ingin mengembangkan usaha sendiri. Banyak dari mereka yang kemudian sukses bahkan kemudian keluar dari kampung ini, hidup tersebar di Jakarta namun ada juga yang masih bermukim di Kampung Luar Batang. Contoh dari keadaan ini dapat dilihat dalam kehidupan Pak Buyung, ia dan ibunya yang hidup miskin di kampung kemudian ditampung pamannya untuk tinggal di Jakarta. Ia kemudian juga diperkerjakan oleh pamannya yang berdagang di Pasar Ikan saat memutuskan keluar dari rumah. Setelah memiliki modal dia kemudian keluar dari pekerjaan dan mencoba berdagang ikan sendiri. Dengan berdagang ikan kemudian dia mencapai kesuksesan dan kemudian menjadi salah satu orang yang berpengaruh di wilayah Penjaringan. *“Sekarang orang pada minta maaf dulu sudah ejek-ejek*

² Karena begitu banyaknya orang Bugis/Makasar datang ke Kampung Luar Batang pada masa Orde Baru membuat sampai pada masa sekarang kampung ini identik dengan Orang Bugis /Makasar.

bapak”, umbarnya dengan nada kesal. *“Alhamdulillah pas Orde Baru usaha Bapak sukses, jadi orang sekarang hormat sama saya”*, tambahnya lagi. Setelah menjadi kaya Pak Buyung juga banyak membantu keluarganya di kampung, baik dengan jalan memberi pekerjaan di Jakarta atau santunan uang yang dikirim ke kampung. *“Bapak kan udah sukses jadi harus bantu orang biar dapet rizki”*, dia melakukan sama persis dengan hal yang dilakukan pamannya dan bentuk itulah kemudian saya temui sering dilakukan oleh orang Bugis/Makasar kaya di wilayah Penjaringan.

Pada masa ini banyak juga orang dari Bugis/Makasar yang datang tanpa adanya bantuan dari kerabatnya sehingga murni dikarenakan tertarik oleh kemajuan perekonomian Jakarta. Sesampainya di Jakarta layaknya para imigran dari Sulawesi Selatan lainnya, mereka kemudian tetap mencari orang dari sedarah mereka. Identitas kedaerahan dikembangkan dan kemudian munculah afiliasi kekerabatan diantara mereka dalam prinsip keuntungan timbal balik. *“Dia banyak bantu saya pas awal-awal saya merintis usaha dagang ikan”*, jelas seorang mantan anak buah Pak Buyung. *“Makanya sekarang saya juga suka bantu dia kalo misalnya dia kurang stok ikan atau apa ajalah...”*, tambahnya lagi. Orang dari Sulawesi Selatan di wilayah Penjaringan memang sering melakukan hal ini kepada sesamanya. Kedekatan diantara mereka ini bahkan melingkupi seluruh orang dari Sulawesi Selatan dan bukan hanya sebatas dari kelompok etnis Bugis/Makasar.

Seperti pendatang Bugis/Makasar yang berhasil di perantauan daerah lain, kelompok Bugis/Makasar kaya di wilayah Penjaringan yang awalnya dikampung hanya orang biasa kemudian secara otomatis mendapat derajat yang lebih tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Dari mereka beberapa memang ada yang merupakan bangsawan rendah di daerah asalnya namun karena kekayaannya di perantauan maka semakin naik pula status sosialnya. Selain itu, belakangan terjadi semacam “inflasi gelar” karena banyaknya orang menyematkan gelar Andi’ dan Daeng yang menurut peraturan adat tidak pantas mereka sandang(Pelras2006:195). Kenyataan tersebut biasanya terjadi dikarenakan keberhasilan seseorang di bidang

ekonomi kemudian membuatnya berani menyematkan gelar bangsawan saat berada di perantauan. *Orang yang memiliki kekayaan melimpah, menguasai tanah luas, punya rumah besar dan indah, dengan mudah akan dianggap berdarah bangsawan-hanya barangkali terlupakan (Lineton dalam Pelras 2006:196)*. Kedua fenomena sosial ini seakan kemudian membuktikan bagaimana unsur stratifikasi sosial Bugis/Makasar yang terkesan kaku pada kenyataannya terkesan sangat fleksibel dalam kehidupan.

Status orang Bugis/Makasar di wilayah Penjaringan bahkan jauh lebih tinggi dibanding orang dari Sulawesi Selatan lain seperti orang Mandar, Toraja, Bajo,³ dan lain lain. Selain dari kekayaannya pada masa sekarang, status tinggi kebanyakan orang dari Bugis/Makasar juga terjadi dikarenakan mereka memang sudah menjadi saudagar penting di wilayah ini dari zaman Belanda. Para pionir orang Bugis/Makasar tersebut kemudian ada yang mengembangkan kegiatan perekonomiannya secara turun-temurun di wilayah Penjaringan. Apabila pada awalnya para pendahulu mereka memang kaya dan keturunannya tetap mewarisi kekayaan tersebut sudah pasti dia akan menjadi orang penting dalam stratifikasi masyarakat Penjaringan terutama dalam kelompok masyarakat Sulawesi Selatan seperti pendahulunya.

Orang Bugis/Makasar yang kaya di wilayah Penjaringan juga memiliki kesamaan hal dengan perantau Bugis/Makasar di daerah lain yang bermata pencaharian dari perdagangan laut. Kesamaan itu setidaknya dapat dilihat pada saat mereka mulai merambah ke bidang politik di tanah perantauannya. Manuver ini mereka lakukan sekedar untuk mempertahankan status sosial mereka yang dipandang cukup tinggi, namun ada juga yang diusahakan untuk mendukung perluasan usaha mereka. Pelras menjelaskan hal ini pada satu bab dibukunya yang memang kemudian membagi karakteristik perantau Bugis dalam beberapa jenis mata pencaharian. Pada

³ Walaupun saya tidak memukan data spesifik apa yang mereka perdagangkan pada waktu itu, namun jelas keberadaan orang Bugis/Makasar yang sudah lama juga turut menyebabkan jumlah mereka lebih banyak daripada orang dari Sulawesi lainnya.

contoh perantau yang bermata pencaharian dari laut, ia kemudian menjelaskan bagaimana bangsawan Bugis bernama La Ma'dukelleng pergi dengan 3000 pengikutnya ke Pasir, Kalimantan Timur. Disana ia menikahkan anak-anaknya dengan penguasa setempat sehingga kemudian dapat memonopoli hasil alam seperti damar, gaharu, dan lain-lain (Pelras 2006: 374-375). Di wilayah Penjaringan gambaran ini setidaknya dapat dilihat dari masuknya kaum Bugis/Makasar dalam struktur birokrasi pelabuhan Sunda Kelapa. Selain berusaha ikut merumuskan kebijakan operasional pelabuhan, paguyuban nelayan dan buruh kuli juga selalu mereka perjuangkan untuk dipegang oleh orang dari etnis Bugis/Makasar. Hal ini memang selalu coba diusahakan untuk mendukung status sosial mereka dan menjaga agar kesepakatan usaha di Pelabuhan Sunda Kelapa tidak merugikan mereka.

4.4. Kesadaran Kultural Dalam Kompetisi Ekonomi

Dampak pembangunan ekonomi yang dibawa Orde Baru memang kemudian memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat Penjaringan untuk maju. Hal tersebut kemudian menyebabkan orang Bugis/Makasar tidak pernah dapat menjadi aktor utama yang berperan sendiri dalam perekonomian di wilayah Penjaringan. Mereka selalu mendapat saingan dari masyarakat lain yang juga ingin tampil mengambil kesempatan tersebut. Keadaan ini kemudian membuat kompetisi perekonomian antar masyarakat di wilayah Penjaringan kemudian berjalan dalam konflik kepentingan yang berkepanjangan bahkan meluas ke dalam interaksi mereka di kehidupan sehari-hari.

Mereka yang sangat tergerak untuk maju dalam persaingan ekonomi ini kemudian dapat saya tunjukkan pada kehadiran orang-orang dari kelompok etnis Banten. Suatu kelompok etnis yang memang memberi pertentangan yang cukup keras dalam eksistensi usaha perekonomian orang Bugis/Makasar pada akhirnya. Sama dengan kelompok etnis Bugis/Makasar dan masyarakat lainnya, Orde Baru yang

menjanjikan pembangunan ekonomi di Indonesia diresapi sebagai momentum bagi mereka untuk naik ke permukaan dan tampil memperbaiki nasib.

Jika di Pelabuhan Sunda Kelapa dominasi Bugis/Makasar tidak terbantahkan, maka persaingan ekonomi masyarakat Penjaringan kemudian sangat terlihat dalam kegiatan perdagangan di Pasar Ikan⁴. Selayaknya kemajuan Pelabuhan Sunda Kelapa, Pasar Ikan dalam masa Orde Baru memang kemudian lebih berkembang daripada sebelumnya. Kesempatan berusaha disini juga terkesan lebih besar dikarenakan para pengusaha kaya dari etnis Bugis/Makasar yang memiliki modal besar memang belum terlalu banyak hadir. Mereka pada kenyataannya lebih terfokus dalam kegiatan perdagangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, sesuatu hal yang memang sangat mereka kuasai pada waktu itu. Beberapa dari mereka bahkan telat merambah usaha perdagangan ikan karena hanya dijadikan sebagai investasi lanjutan setelah lebih dulu berhasil di bidang usaha pelayaran angkut berat.

Untuk memenangkan persaingan ekonomi di Pasar Ikan, orang-orang dari kelompok etnis Banten melakukan segala macam cara untuk mencapainya. Hal ini mereka rasa perlu dilakukan karena saingan terberat mereka yaitu kelompok etnis Bugis/Makasar walau masih sedikit yang berusaha disini namun mereka jauh lebih mapan dalam hal modal. Situasi yang menghadapkan mereka pada tantangan untuk berhasil dalam perdagangan di Pasar Ikan tersebut kemudian dengan sendirinya membentuk kesadaran kultural orang-orang Banten terpanggil terhadap konsep “Jawara” yang ada dalam kebudayaan mereka. Jawara sebagai suatu konsep kebudayaan Banten banyak didefinisikan sebagai identitas yang melekat pada sekelompok masyarakat yang menunjukkan watak keras dan sering terlibat perkelahian untuk menyelesaikan masalahnya. :

“S

elain itu, Jawara juga memiliki karakter tertentu yang secara umum membedakannya dari anggota masyarakat lainnya seperti berani (wanten),

⁴ Pada masa Belanda dinamakan dengan *vismarkt*

agresif, sompral (tutur kata keras), dan blakan-blakan (terbuka), yang dibalut dengan ketrampilan bela diri silat dan diyakini memiliki kadigjayaan (kesaktian), seperti kebal senjata tajam (Tilhmi, 1992: 97-99;Hudaeri, 2002: 56), dan jawara cenderung untuk menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan (Alamsyah, 2010:65)

“D

engan karakter itulah jawara meraih dan mempertahankan dominasinya dan memberikan nuansa keberadaannya pada kehidupan sehari-hari Masyarakat Serang (Suhaedi,2006: 94-109)

Dalam sejarahnya, Jawara di Banten pada awalnya memangku jabatan sebagai seorang wakil Sultan di tingkat desa atau yang biasa disebut Jaro (setingkat Kepala desa). Peran mereka adalah sebagai penjaga keamanan dan eksistensi kerajaan di tengah masyarakat tempat mereka mengabdikan. Basis masa mereka yang sangat besar berasal dari paguron (Padepokan), tempat mereka melatih pengikutnya. Mereka yang dinyatakan lulus dari paguron nantinya memang dipersiapkan turun di masyarakat untuk menjadi Jawara-Jawara selanjutnya. Jaringan antar Paguron kemudian menjadi satu wadah persatuan Jawara yang keberadaannya berada dibawah kekuasaan kesultanan. Pada masa selanjutnya saat terjadi kekosongan kekuasaan akibat kesultanan Banten jatuh dan pemerintah kolonial tidak efektif lagi, mereka bersama kaum kyai mengambil inisiatif maju sebagai pemimpin informal masyarakat. Pada masa kolonial ini tak sedikit pula Jawara yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda(Lubis,2004:101). Namun demikian, ada pula jawara yang justru melakukan pemberontakan lokal, seperti Ce Mamat(Lubis, 2004: 171-173; Hudaeri, 2002: 70). Beberapa dari mereka di wilayah Banten bahkan ada yang menjadi pemimpin masyarakat (*Jaro*) namun dibawah kendali pemerintah kolonial.

Saat masa Sukarno berkuasa mereka seolah hilang dari permukaan. Tidak lagi berperan sebagai pusat sorotan kehidupan sosial masyarakat. Banyak dari mereka kemudian banting setir menjadi pedagang, nelayan, wirausaha dan lain-lain baik itu di Banten atau saat bermigrasi ke tempat lain. Beberapa dari mereka yang bermigrasi khususnya ke Jakarta ada juga yang tetap melanjutkan perannya sebagai penjaga

keamanan. Kebanyakan yang tetap melakukan hal tersebut kemudian bekerja untuk kepentingan usaha kerabat mereka sesama orang-orang Banten⁵. Di wilayah penjarangan misalnya, walau banyak dari mereka melanjutkan pekerjaan sebagai nelayan⁶ dan buruh pelabuhan, beberapa dari mereka tetap menjadi preman yang menjaga kepentingan usaha para pengusaha/pedagang dari sesama etnis Banten. Pada masa ini pula para jawara kemudian mengkonsolidasi kelompoknya dengan membentuk (Tjimande, Tarik Kolot, Djeruk, Hilir) pada tahun 1952, yang merupakan perkumpulan paguron dengan jurus silatnya masing-masing.

Berbeda dengan definisi sebelumnya yang lebih menyatakan “Jawara” sebagai identitas kelompok tertentu, maka di wilayah Penjarangan konsep “Jawara” lebih terjelaskan sebagai suatu bentuk kesadaran kultural. Selain mengejar keuntungan dengan berdagang, para pedagang/pengusaha Banten memang merasa perlu melakukan segala cara termasuk kekerasan untuk memenangkan persaingan ekonomi di Pasar Ikan. Akibat dari hal ini maka para pedagang/pengusaha jelas memerlukan para preman untuk menjaga eksistensi mereka dalam perdagangan, sementara preman memerlukan pedagang yang terus berkembang menjadi kaya agar pemasukannya juga turut meningkat. Dengan saling keterikatan antar (preman dan pedagang/pengusaha) mereka dalam mencapai keuntungan tersebut sebenarnya kesadaran kultural akan konsep “Jawara” itu timbul. Hal ini kemudian membuat konsep “Jawara” di wilayah Penjarangan lebih baik ditujukan sebagai satu bentuk kesadaran untuk mengembangkan kehidupan dengan segala cara -termasuk kekerasan-, dibandingkan berbicara tentang eksistensi suatu kelompok tertentu dalam masyarakat Banten yang identik dengan kekerasan dalam kehidupannya.

⁵ Di Ibukota ada juga orang Banten yang melanjutkan peran penjaga keamanannya, namun kali ini menjadi preman-preman yang menjaga pusat hiburan, pelabuhan dan tempat publik lainnya.

⁶ Kebanyakan nelayan asal Banten berasal dari daerah bernama Karangantu. Daerah di sebelah barat Serang yang memang pusat kegiatan nelayan.

Kesadaran kultural orang Banten akan konsep “Jawara” kemudian sangat terepresentasikan dalam usaha penguasaan mereka dalam perdagangan di Pasar Ikan. Mereka melakukan hal tersebut dengan menginkorporasikan masyarakat lain, baik dengan cara memaksa atau membangun kesepahaman di antara mereka untuk bekerjasama dalam perdagangan. Pada akhirnya apa yang mereka lakukan adalah membentuk suatu afiliasi yang menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perdagangan ikan ini. Afiliasi ini membentuk suatu jaringan kerjasama yang menghubungkan antar pedagang, nelayan, dan preman yang pada perkembangannya juga menjadi calo atau biasa disebut *pesisir*. Tujuan dari pembentukan afiliasi ini adalah membentuk suatu kesepakatan perdagangan yang sudah tentu harus menguntungkan orang Banten sebagai pemimpin (Jawara) dalam afiliasi ini.

Berbeda dengan kerjasama yang mengandalkan kekerabatan seperti yang dilakukan Orang Bugis/Makasar di Pelabuhan Sunda Kelapa, afiliasi ini lebih meluas dengan merangkai hubungan antar kelompok etnis. Dalam posisi ini para Jawara turut berperan memimpin kelompok etnis non-Bugis/Makasar lain untuk memusuhi kelompok Bugis/Makasar yang relatif lebih mapan. Mereka memang sangat memanfaatkan momen terpinggirkannya kelompok etnis non Bugis/Makasar di Pelabuhan Sunda Kelapa untuk merangkul mereka dalam afiliasi perdagangan. Representasi dari afiliasi ini kemudian sangat menunjukkan hal tersebut, dimana anggotanya adalah orang-orang dari kelompok etnis Banten, Cirebon dan Jawa. Kebanyakan dari mereka di Pelabuhan Sunda Kelapa memang berada dibawah bayang-bayang orang Bugis/Makasar. Entahlah itu bekerja menjadi kuli atau menjadi anak buah kapal yang dimandori orang Bugis/Makasar.

Bagi orang-orang Bugis/Makasar, Pasar Ikan merupakan sebuah tantangan baru untuk mengembangkan investasi perekonomian mereka. Namun bagi masyarakat non-Bugis/Makasar Pasar Ikan kemudian lebih dimaknai sebagai harapan, jalan untuk lepas dari keadaan mereka yang terpuruk dalam kemiskinan. Dengan berkembangnya perbedaan pemahaman di antara masyarakat tersebut, persaingan ekonomi di Pasar Ikan jelas berjalan dengan sangat ketat. Keadaan ini di satu sisi kemudian

mentransformasikan Pasar Ikan sebagai suatu bentuk pranata sosial tersendiri dalam kehidupan sosial wilayah Penjaringan. Disini masyarakat sepenuhnya dapat mengembangkan berbagai ekspresi dan intrik dalam kompetisi perdagangan, dimana kemudian hal ini sangat -mengingat peran pemerintah yang masih setengah hati masuk disini- merepresentasikan identitas mereka dalam kehidupan sosial.

4.5. Kesepakatan Kultural Dalam Afiliasi Perdagangan

Didalam afiliasi perdagangannya, orang-orang Banten pada awalnya selalu mengembangkan hubungan yang sangat personal dengan pedagang non-Bugis/Makasar lainnya. Mereka selalu berusaha mendiskusikan secara kekeluargaan segala kepentingan perdagangan mereka seperti penetapan harga, posisi lapak, dan lain-lain. Kesemuanya mereka bicarakan untuk mencapai kesepakatan agar perdagangan tidak merugikan pihak mereka (Banten, Jawa, Cirebon, dan kelompok etnis non-Bugis/Makasar lainnya) dan pastinya tidak diganggu oleh pedagang dari etnis Bugis/Makasar.

Hubungan tersebut kemudian juga berlanjut dengan nelayan yang bertugas menyortir ikan hasil tangkapannya. Nelayan di wilayah Penjaringan kebanyakan adalah orang-orang dari Banten dan Cirebon dimana mereka pada dasarnya adalah kerabat. Kesepakatan yang dibuat dengan seorang nelayan adalah soal fleksibilitas dalam tawar menawar harga yang dipatok si nelayan kepada para pedagang. Hal ini juga kemudian berkembang dalam keterikatan seorang pedagang ikan terhadap nelayan yang menjadi langganannya. Mereka tidak mungkin mengambil ikan dari nelayan lain apalagi nelayan Bugis/Makasar yang juga memang ada di wilayah ini. Begitu juga sebaliknya maka si nelayan juga pasti hanya menjual ikan kepada pedagang di dalam afliasinya dan tentunya bukan kepada pedagang ikan dari kelompok etnis Bugis/Makasar

Preman dalam afiliasi perdagangan ikan kelompok etnis non-Bugis/Makasar selalu diisi oleh orang-orang dari kelompok etnis Banten. Disini posisi mereka sangat penting dikarenakan mendukung konsep “Jawara” yang mempengaruhi orang-orang

Banten membentuk afiliasi perdagangan ini. Menjadi demikian karena pada kenyataannya posisi preman berperan dalam menginkorporasikan masyarakat lainnya masuk dalam afiliasi perdagangannya, termasuk dengan cara kekerasan. Bila pada suatu waktu kesepakatan yang dibangun seorang pedagang asal Banten terhadap pedagang atau nelayan tidak dapat dicapai, maka seorang preman akan maju untuk mengurus hal tersebut. Mereka akan melakukan segala cara agar keinginan bos-nya dapat terwujud walaupun pada akhirnya harus diselesaikan dengan konflik fisik. Preman pada akhirnya juga berlaku sebagai pelindung afiliasi perdagangan ini dari ancaman pedagang ikan lain, terutama mereka dari kelompok etnis Bugis/Makasar. Untuk urusan yang satu ini mereka bahkan bertindak seperti tidak kenal ampun karena memang jarang terselesaikan dengan pembicaraan.

Posisi preman kemudian menjadi lebih penting lagi kehadirannya dikarenakan mereka juga merangkap menjadi calo pedagang atau disebut *pesisir*. Bila sebagai preman mereka bertugas melindungi pedagang semisal keamanannya diganggu atau terlibat perselisihan dengan pedagang lain, sebagai *pesisir* mereka bertugas mengantarkan pembeli yang baru pertama kali datang atau mereka yang mau membeli borongan ke pedagang ikan. Bila pembeli selesai melakukan transaksi, maka si *pesisir* pasti mendapat persenan keuntungan entah itu berupa ikan atau uang. Banyak atau sedikitnya ikan yang berhasil dijual dalam transaksi sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima si *pesisir*. Hubungan antara satu pedagang dengan preman/*pesisir* juga sangat personal. Seorang preman/*pesisir* kepercayaan satu pedagang bahkan tidak mungkin mengarahkan pembeli untuk bertransaksi dengan pedagang di luar afiliasinya apalagi mereka adalah pedagang Bugis/Makasar.

Seorang preman kemudian juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi seorang pedagang ikan. Mereka biasanya mencapai hal ini dengan cara menjual kembali jatah ikan yang dibayarkan para pedagang dalam afiliasi perdagangan kepada mereka. Baik itu saat menjalankan peran sebagai *pesisir* atau tenaga pengaman usaha pedagang ikan. Transformasi preman menjadi seorang pedagang biasanya kemudian membuat kedudukan mereka selayaknya pemimpin

dalam afiliasi perdagangan. Hal ini menjadi demikian karena pada akhirnya mereka memang menjalankan banyak peran dalam afiliasi ini. Sebagai preman mereka bertanggung jawab atas jalannya kegiatan afiliasi perdagangan ini, namun sebagai pedagang yang melakukan kegiatan perekonomian mereka sudah tentu berusaha menguasai kesepakatan perdagangan afiliasi ini agar selalu diusahakan mendukung kegiatan perdagangan pribadinya.

Afiliasi perdagangan ikan kelompok etnis Banten sebenarnya bersifat sangat cair pada awalnya. Menjadi demikian karena afiliasi perdagangan ini tidak mewadahi seluruh elemen perdagangan ikan non-Bugis/Makasar di Pasar Ikan. Penguasaan jalur perdagangan yang dilakukan satu orang Banten pada kenyataannya harus dihadapkan oleh afiliasi perdagangan bikinan orang Banten lain. Dalam artian masing-masing mereka dapat menjalankan usaha perdagangannya dengan membentuk afiliasi perdagangannya sendiri. Sewaktu-waktu dalam kegiatan perdagangan ikan masing-masing afiliasi bahkan sering terlibat pertikaian. Hal ini biasanya terjadi bila ada satu pihak afiliasi mencoba mengganggu usaha afiliasi perdagangan pengusaha lain. Konflik diantara mereka bahkan sering diselesaikan dengan kekerasan fisik, tidak tanggung-tanggung korbannya bahkan harus kehilangan nyawa. Uniknya konflik ini kemudian akan berlalu begitu saja seiring berjalannya waktu. Mereka tidak akan membawa permasalahan tersebut menjadi dendam yang kemudian menjadi berkepanjangan. Keadaan ini menjadi demikian karena pada dasarnya antar afiliasi ini masih bisa terhubung dalam unsur kekerabatan kelompok etnis Banten. Misalnya seorang Paman masuk dalam satu afiliasi perdagangan, tidak mustahil bila kemudian keponakannya membentuk afiliasi lain. Kalaupun bukan kerabat maka hubungan yang erat antara anggota afiliasi biasanya membuat konflik diantara mereka tidak terus berlarut menjadi dendam dalam kehidupan. Secara kultural kedekatan antar mereka dapat dilihat dalam interaksi di kehidupan sehari-hari, dimana terkadang perkawinan antar mereka juga memperkuat kedekatan tersebut. Mereka pada masa ini juga seolah bersatu memposisikan kelompok non-Bugis/Makasar sebagai musuh bersama. Namun secara historis jelas kita dapat berpegangan dalam kontinuitas

suasana kultural tersebut dalam kehidupan di wilayah Penjaringan yang terbukti dengan jelas memang sangat membentuk corak kehidupan dari masa ke masa.

4.6. Orang Bugis dan Makasar

Dewasa ini, ketika berada di luar provinsi, setiap orang Sulawesi Selatan yang beragama Islam, entah dia orang Makassar, Mandar, Duri, Woru atau bahkan Bajo akan dengan senang hati memperkenalkan dirinya sebagai orang Bugis (Pelras2006:16). Di wilayah Penjaringan identitas orang-orang dari Sulawesi Selatan awalnya memang dimaknai sedemikian rupa. Namun, persaingan ekonomi antar masyarakat kemudian membuat identitas mereka terekonstruksi menjadi tidak sesederhana itu.

Orang Bugis di wilayah Penjaringan pada dasarnya sangat terkesan sebagai masyarakat dengan status sosial kaya dan terhormat. Watak mereka dalam kehidupan juga terkenal hangat dengan masyarakat lain. Walau mereka kaya, kebanyakan memang tetap menjaga kesantunan dalam interaksi di kehidupan sehari-hari. Orang Bugis juga terlanjur menjadi teladan bagi masyarakat Penjaringan dalam kehidupan agama dan pendidikan. Mereka yang sudah mapan memang banyak yang kemudian melakukan ibadah haji, sedangkan anak mudanya mayoritas telah lulus pendidikan sampai SMA (bahkan banyak sampai bangku kuliah). Suatu hal yang memang sangat jarang dilakukan oleh masyarakat lain di wilayah Penjaringan pada masa ini.

Dalam status di kehidupan beragama, banyak dari orang Bugis kemudian memanfaatkan situs Masjid Kramat Luar Batang untuk mengartikulasikan dan menegaskan posisi mereka yang terhormat. Masjid Kramat Luar Batang merupakan bagian dari folklore yang menceritakan sejarah masuknya Islam ke wilayah Penjaringan. Masjid ini juga menjadi salah satu simbol yang merepresentasikan awal

kehidupan Penjaringan dalam bentuk Kampung Luar Batang (perkampungan tua⁷ yang masih bertahan). Kedua fakta sejarah ini membuat keberadaan mesjid Kramat Luar Batang mengikat umat Islam di seluruh Penjaringan untuk selalu berkiblat kesana dalam kehidupan beragama. Untuk memahami sejarah ke-Islaman dalam dirinya seakan harus menatap ke dalam bangunan Mesjid Kramat Luar Batang tersebut. Begitu pentingnya kehadiran mesjid ini bagi kehidupan spritualitas masyarakat Penjaringan menyebabkan keterlibatan terus menerus orang Bugis adalah keuntungan tersendiri bagi mereka. Sadar akan hal itu membuat banyak dari mereka kemudian berperan aktif dalam kehadiran mesjid di tengah masyarakat Penjaringan. Dimulai dari para dermawan terbesar merupakan Orang Bugis, pengurus dan pelindung mesjid juga sudah pasti dipegang oleh orang Bugis. Banyak dari mereka kemudian juga berprofesi sebagai Uztad dan berkhotbah secara rutin di mesjid ini. Kenyataan yang menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka sudah naik Haji, memang kemudian membuat posisi strategis dalam kehidupan beragama ini sangat terkesan pantas diduduki oleh mereka.

Status di kehidupan adalah modal sosial orang Bugis dalam kehidupan wilayah Penjaringan. Sadar betul memiliki modal sosial berupa status yang terhormat di antara masyarakat Penjaringan, mereka kemudian selalu mau sabar dalam mendekati saingan usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan cara menegosiasikan segala kesepakatan perdagangan yang dibuat afiliasi-afiliasi pengusaha Banten di Pasar ikan dengan memposisikan diri sebagai kaum terhormat, agamis, dan kaya. Mereka sangat berpegang untuk tidak menghadirkan konflik, padahal sudah pasti tahu bahwa afiliasi pimpinan orang Banten ada untuk membendung Orang Bugis berdagang. Nampaknya kekerasan merupakan pantangan buat mereka lakukan karena ingin status sosialnya sebagai masyarakat terhormat tetap terjaga.

⁷ Belanda dengan “segregesi”-nya memang suka membuat perkampungan dengan menggunakan nama etnis, seperti contoh : Kampung Ambon, Kampung Bali, Kampung Makasar,dll.

Terbukti cara mereka mendekati para pedagang Banten ini agaknya memang membuahkan hasil. Beberapa afiliasi perdagangan ikan pimpinan orang Banten memang ada yang melunak dan bahkan berkerjasama kepada mereka untuk berdagang. Nampaknya kesadaran kultural untuk maju dalam perdagangan dengan menggunakan segala cara setidaknya juga memberi sisi pragmatis dalam diri orang Banten. Singkatnya, semakin seorang Banten mau maju dalam satu usaha maka mereka dituntut untuk fleksibel dalam menanggapi satu kesepakatan yang lalu termasuk untuk menjauhi orang Bugis. Pemahaman ini yang kemudian mendasari tindakan mereka menerima tawaran orang Bugis yang dirasa menguntungkan. Selain dikarenakan sifat pragmatis orang Banten, status sosial yang tinggi dalam kehidupan beragama juga setidaknya mempengaruhi orang Banten mau bekerjasama. Mereka merasa bahwa orang Bugis adalah pemimpin mereka dalam kehidupan agama sehingga kerjasama mereka diharapkan turut mendukung posisi orang Banten dalam kehidupan beragama wilayah Penjaringan. Manuver ini memang seperti layaknya Jawara di Banten, mereka juga setidaknya melakukan hal yang sama dalam kehidupan yaitu menginkorporasikan pemimpin agama setempat yang disebut Kyai di Banten untuk mendapat dukungan dan legitimasi dalam menjalankan kekuasaannya.

Walaupun pendekatan orang Bugis ini ada yang membuahkan hasil, pada kenyataannya beberapa afiliasi perdagangan ikan pimpinan orang Banten ada saja yang masih berkeras hati. Jika semisal tidak ampuh dan konflik fisik tidak dapat dihindari lagi, mereka pasti akan mulai memajukan orang-orang Makasar dalam urusan perdagangan ikan. Orang Bugis memang pengusaha kaya yang memiliki modal yang besar. Hal ini kebanyakan mereka manfaatkan untuk memodali orang Makasar turun langsung di perdagangan ikan. Dengan menempatkan orang Makasar mereka tidak terlibat perselisihan fisik dengan afiliasi-afiliasi pengusaha Banten, karena sudah tentu orang Makasar lebih dulu melakukannya. Semua ini mereka lakukan tentu agar tangan mereka tidak kotor dan status mereka tetap terjaga kehormatannya di tengah masyarakat.

Berbeda dengan orang Bugis maka orang-orang dari kelompok etnis Makasar hidup di wilayah Penjaringan dengan keadaan yang sangat bertolak belakang. Kebanyakan dari mereka baik yang tua maupun muda terkenal sebagai orang-orang dengan tempramental kasar. Mereka bahkan identik sebagai pemancing keributan dan pembuat onar. Terutama dalam bentuk persaingan ekonomi masyarakat di Pasar Ikan, mereka selalu berperan antagonis yaitu sebagai orang serakah dan mau menang sendiri. Banyak dari mereka bahkan terlibat konflik fisik berkepanjangan dengan para pedagang lain.

Beberapa memang sudah lebih dulu kaya dengan menjadi mandor kuli, pelaut, dan lain-lain di Pelabuhan Sunda Kelapa. Tetapi tetap saja orang Bugis lebih kaya dan usaha orang Makasar memang sangat bergantung dengan kegiatan angkut/berat yang sangat dikuasai orang-orang dari Bugis. Tak heran banyak dari mereka yang baru datang di Masa Orde Baru kemudian memanfaatkan koneksi kekerabatan dengan pengusaha dari etnis Bugis untuk masuk usaha perdagangan ikan. Beberapa bahkan tanpa memiliki modal cukup, namun biasanya kehadiran mereka memang disokong untuk menghindari orang Bugis dari perselisihan keras dengan afiliasi perdagangan ikan pimpinan orang Banten. Orang Makasar di wilayah Penjaringan memang senang mengakhiri segala masalah dengan keributan. Tidak saja dengan kelompok etnis Banten, mereka juga tidak sungkan berkelahi dengan etnis lain sesama Sulawesi Selatan.

Akhir kata berjalanlah kehidupan masa awal Orde Baru di wilayah ini dalam satu bentuk pengaruh yang besar dari kompetisi perekonomian masyarakatnya. Suatu drama yang sangat klasik di wilayah Penjaringan sebenarnya yaitu pertarungan antara manusia dalam memperebutkan kue yang bernama kekuasaan. Namun pada saat ini, kompetisi tersebut pada kenyataannya memang sangat menguntungkan bagi berbagai etnis lokal di wilayah Penjaringan. Pribumi Indonesia yang terakhir kali mungkin merasakannya saat zaman kerajaan, sebelum kolonialisasi masuk. Kompetisi ini menguntungkan karena jelas konflik antara masyarakat Penjaringan dalam perdagangan Pasar Ikan pada dasarnya memang terjadi untuk membentuk

kesepahaman antar mereka. Suatu bentuk kesepakatan yang dinegosiasikan karena menyangkut urusan pembagian keuntungan besar dalam perekonomian. Seorang pedagang ikan asal Banten bernama Pak Joko memberi gambaran ini dengan jelas kepada saya.

“Dari dulu sebenarnya tidak ada ribut antar etnis gara-gara kebanggaan asal (primodialistik)”, ujar Pak Joko. “Kita semua ribut cuma karena uang... bahkan sesama Banten juga bisa pukul-pukulan, jadi kita tidak ribut sama Makasar itu saja”, jelasnya dengan semangat. “Kalau dulu begitu semua dapat jatah dagang yang ‘sip’, pasti beberapa saat gak’ada ribut di Pasar Ikan”, ujarnya.

Interaksi masyarakat dalam kompetisi perekonomian walaupun itu konflik sekalipun merupakan suatu bentuk metaforik yang dapat dimaknai sebagai proses negosiasi semata. Suatu bagian dari diri mereka yang sedang menonjolkan perbedaan untuk memberi pengertian agar juga dihargai oleh masyarakat lainnya.

Kompetisi ekonomi ini juga jelas memberi corak kehidupan yang dibentuk interaksi masyarakat, dimana tentu mencerminkan identitas pelakunya. Sebuah karakteristik yang terbentuk dalam watak mereka di kehidupan perdagangan Pasar Ikan. Bila orang Sulawesi Selatan yang beragama islam di seluruh Indonesia identik disebut orang dari suku bangsa Bugis. Namun kompetisi ekonomi di wilayah Penjaringan membuat mereka di bedakan sebagai yang pintar dan terhormat yaitu orang Bugis dan si kasar yaitu orang Makasar. Sementara orang Banten dengan kesadaran kultural akan konsep “Jawara” merupakan orang-orang yang terkenal sangat pragmatis dalam kehidupan.

BAB V

MASUKNYA SISTEM KAPITALISME dan DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PENJARINGAN

5.1. Kemunduran Dalam Pembangunan Orde Baru

Perkembangan perekonomian yang dirasakan Jakarta khususnya wilayah Penjaringan pada kenyataannya harus berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sangat terlihat dengan bagaimana Jakarta harus mengakui kewalahan mengikuti rencana Orde Baru. Indikasi akan kejadian ini bahkan sudah bermula pada masa-masa kepemimpinan Sadikin, tahun awal dimana pembangunan ekonomi Orde baru dilaksanakan. Pada titik awal dari rangkaian akhir yang bermula pada krisis perekonomian hal yang paling disadari adalah ketidakmampuan Sadikin menjamin pendatang dapat hidup berkecukupan.

Ini merupakan masalah yang sangat masalah yang sangat dilematis. Berbagai kepentingan perekonomian dibangun dengan sokongan modal-modal asing namun itu hanya ditemui di Jakarta dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. Dengan bentuk ketimpangan pembangunan yang terlihat sangat menganak emaskan Jakarta membuat semua kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik terkesan hanya bisa di dapat di Ibukota, satu hal yang membuat arus pendatang ke Jakarta menjadi sangat tidak terkendali.

Para pendatang tidak tertampung dalam lahan pekerjaan, menjelma sebagai golongan miskin dengan label sebagai mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan kota metropolitan. Kehidupan metropolitan di Jakarta dalam pandangan Orde Baru waktu itu direpresentasikan sebagai kota modern dengan kehidupan masyarakat dalam keberagaman dan kemakmuran. Orde Baru dengan muluk membayangkan Jakarta di isi masyarakat yang bekerja dalam sektor ekonomi formal yang mendukung

rencana pertumbuhan perekonomian Indonesia, sehingga mereka sudah tentu tidak mengharapkan para pendatang yang tidak kompeten.

Arus pendatang yang meluap di wilayah Penjaringan seperti layaknya daerah lain di Jakarta kemudian mulai mengkhawatirkan pihak pemerintah. Sadikin tidak yakin kedatangan mereka dapat langsung menyatu dengan kehidupan metropolitan Jakarta (*Sadikin 1977 :52*). Berbagai rencana kemudian dilaksanakan seperti kampanye “Menjakartakan warga Jakarta” yang bertujuan menjamin para pendatang dapat beradaptasi di Jakarta. Program-program seperti ini diharapkan dapat mendidik pendatang untuk berkembang seperti kemauan Orde Baru atau saya anggap secara perlahan menyadarkan mereka akan ketidakmampuan mereka untuk hidup di Jakarta. Pada kenyataannya rencana itu tidak berjalan baik, karena arus pendatang terus berdatangan, membentuk kehidupan dalam keberagaman di seluruh Jakarta. Dalam masa pemerintahan Sadikin selanjutnya berbagai hal kemudian diusahakan untuk menanggulangi membludaknya masyarakat dalam kehidupan Jakarta. Beberapa hal seperti penanaman Keluarga Berencana (KB) dan kebijakan Transmigrasi masuk dalam rencana penanggulangan ini namun pada akhirnya kesemuanya memang gagal. Program KB (Keluarga Berencana) gagal karena terlambat dilaksanakan sehingga tidak didapat hasil yang memuaskan dan memang kurang disukai warga. Sementara itu Transmigrasi gagal karena pada akhirnya dilaksanakan secara sepenuh hati oleh Sadikin. Tercatat transmigrasi yang dilakukan dalam rentang tahun 1971 dan 1977 tidak sampai 3000 orang. Ia beranggapan kebijakan Transmigrasi menyumbang biaya yang sangat besar dan sudah seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat bukan dari kebijakan pemerintah daerah (*Sadikin 1977:201*).

Kenyataan pada masa ini yang memperlihatkan meningkatnya golongan miskin kota akhirnya membawa pemerintahan Sadikin membentuk Jakarta sebagai kota tertutup. Solusi ini memang cukup menakutkan warga Jakarta secara keseluruhan dan paendatang yang berencana datang ke Jakarta. Pada 1970 dengan dimulainya kebijakan Jakarta sebagai kota tertutup, warga Jakarta wajib memiliki KTP. Tim-tim keamanan kemudian sering berkeliaran mencari imigran ilegal yang

tidak membawa KTP untuk kemudian ditangkap bahkan langsung dipulangkan ke daerah asalnya. Implementasi kebijakan ini juga diikuti rencana Sadikin memberantas sektor perekonomian informal yang menjamur di Jakarta dan menjadi sandaran pendatang di Jakarta. Para pedagang di pinggir jalan, tukang becak, dan lain lain dirazia dalam berbagai operasi-operasi yang bersifat represif. Sadikin memang sangat tidak menginginkan pekerjaan informal yang menampung banyak massa dan di satu sisi juga tidak menggambarkan kehidupan metropolitan Jakarta. Implementasi Jakarta sebagai kota tertutup pada akhirnya tidak menunjukkan hasil positif seperti rencana-rencana sebelumnya, masyarakat miskin Jakarta terus berkembang dan bertahan hidup dengan melakukan resistensi terhadap tekanan pemerintah. Untuk mengakali wajib KTP mereka kemudian banyak mengusahakan KTP palsu. Sementara untuk mempertahankan pekerjaannya kebanyakan dari mereka mulai menyuap pihak keamanan atau menyingkir di pinggiran kota dan perkampungan yang luput dari perhatian Pemerintah DKI. Terbukti di wilayah Penjaringan becak masih beroperasi melayani warga dari pagi hingga malam sampai masa sekarang. Terakhir upaya Sadikin untuk membenahi Jakarta adalah dengan menelurkan program perbaikan kampung. Program ini bisa dikatakan lumayan berhasil memberi pemukiman layak bagi imigran di Jakarta, namun keberlanjutannya tidak dapat diteruskan karena halangan dana. Dengan segala rencana penanggulangan kepadatan penduduk dan peningkatan kesejahteraan yang tidak berhasil di Jakarta, keadaan ini kemudian harus diperparah dengan menurunnya dana pembangunan dari pemerintah.

Pada dekade 1970-an Pertamina tumbang dan tidak bisa memenuhi komitmen keuangannya, hal ini serta merta mengurangi pemasukan utama pemerintah dan tentu berimbas pada faktor perekonomian lainnya. Indonesia memang agak bangkit dengan berbagai pinjaman luar negeri yang diusahakan pemerintah, dimana hal ini kemudian menjadi tumpuan Orde Baru untuk melanjutkan pemerintahan. Akibat sudah lewatnya ledakan minyak dan meningkatnya bunga pinjaman asing tersebut, maka pemerintah terus berusaha menaikkan pendapatan dari sektor lain. Di wilayah

Penjaringan kebijakan ini dilakukan antara lain dengan menegaskan peran regulator pemerintah dalam perdagangan ikan. Hal ini dicapai dengan cara meniadakan Pasar Ikan dan membangun Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman pada tahun 1974.

Pemerintah memang sedang mem-privatisasi pemasukan lewat perdagangan ikan di wilayah Penjaringan. Untuk mengakomodir rencana ini suatu daerah luas lautan Pelabuhan Sunda Kelapa dan rawa sekitarnya terlebih dulu (pada tahun 1978-1979) diuruk menjadi daratan dan diberi nama Muara Baru. Kemudian disana dibangunlah pelabuhan ikan termmodern pertama kali di Indonesia tersebut. Muara Baru sebagai lahan yang luas juga kemudian dijadikan pemukiman terbesar masyarakat wilayah Penjaringan. Sedangkan di pelabuhan tersebut diwujudkan usaha pelelangan ikan besar, dimana semua ikan yang ditangkap nelayan wajib dimasukan sini terlebih dahulu untuk diperjual-belikan. Perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang produksi ikan kemudian dipersilahkan untuk menghadirkan pabriknya di komplek Pelabuhan. Kebijakan ini dilanjutkan dengan difokuskannya wilayah Penjaringan sebagai pusat kegiatan perikanan dan bukan lagi pusat usaha angkut berat perdangan eksport-import. Untuk menjalankan rencana ini, pada 1977 Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan sebagai pusat kawasan eksport di Jakarta. Pelabuhan Sunda Kelapa perlahan dikurangi kegiatan perdagangan eksportnya agar setidaknya dapat mendukung wilayah Penjaringan sebagai sentral perikanan di Jakarta. Tidak hanya sampai disitu, daerah penghasil ikan seperti Kamal Muara, Cilincing, dan lain-lain kemudian juga coba diintegrasikan untuk mendukung kinerja produksi perikanan wilayah Penjaringan.

Rencana pembangunan ini juga bisa dibilang tidak berjalan lancar. Pada tahun 1983 pemerintah bahkan terpaksa mengurangi proyek investasinya dan berusaha mendorong investasi dari sektor swasta. Celaknya mereka menganggap pribumi Indonesia tidak dapat diharapkan dalam pembangun ini. Modal usaha mereka tentu kecil dan belum lagi kompetisi perekonomian dalam konflik fisik tentu memusingkan pemerintah. Kaum Cina Peranakan kemudian diajak untuk kembali

tampil di permukaan pada saat ini. Belajar dari pengalaman yang lalu mereka sebenarnya sangat di cap buruk oleh masyarakat karena kedekatannya dengan pemerintah kolonial dan tuduhan Komunis seperti negara asalnya. Namun apa mau dikata, pemerintah merasa mereka lebih sanggup dalam pelaksanaan usaha dan memiliki modal besar. Para kroni-kroni Suharto kemudian juga memuluskan masuknya kaum Cina peranakan pada masa ini. Mereka melakukan ini dalam rencana untuk memperkaya diri sendiri dari bayaran para pengusaha Cina peranakan untuk kesempatan maju dalam dunia bisnis Indonesia. Sadikin pensiun pada tahun 1977, suatu keuntungan buatnya mengingat pada masa seterusnya perekonomian terus menurun terutama dikarenakan bunga pinjaman negara asing.

5.2. Militer Dalam Kehidupan Orde Baru

Kompetisi perekonomian masyarakat yang tadinya berjalan dengan penuh intrik, pada kenyataannya harus dihentikan dalam pandangan pemerintah Orde Baru. Hal ini diharapkan terjadi agar wilayah Penjaringan dengan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan pemasukan yang besar.

Ada tiga langkah yang diambil pemerintah dalam mengatur agar semua berjalan dengan baik. Pertama mereka turun untuk memperbaiki sistem perdagangan. Untuk menghindari konflik mereka kemudian berperan sebagai sentral yang mengawasi perdagangan. Mereka juga melindungi kepentingan pengusaha dengan modal besar yang mayoritas disokong kaum Cina peranakan.

Dalam mengatur kembali perdagangan ikan mereka kemudian merangsang kaum Cina Peranakan untuk memodali berbagai usaha di wilayah ini agar produksinya meningkat. Mereka mulai memberi kesempatan bagi para Toke¹ untuk menanamkan modal yang besar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Para Toke ini bahkan dipermudah

¹ Sebutan untuk bos Cina peranakan di wilayah Penjaringan.

untuk memiliki kapal layar angkutnya sendiri. Mereka yang tadinya hanya rekan bisnis pengusaha Bugis kali ini berubah menjadi bos besar dalam usaha angkut berat jalur laut. Dengan limpahan kesempatan padanya, mereka bahkan dibiarkan melakukan memonopoli usaha jasa angkut berat di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Berbagai usaha kaum Cina peranakan di Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain memang bergerak di bidang penyelundupan kayu. Hal ini membuat mereka di wilayah Penjaringan kemudian bergerak memonopoli usaha jasa angkut berat ini agar koneksi Cina peranakan di wilayah tebang dapat mengusahakan kerjasama yang lebih menguntungkan. Selain membeli banyak kapal kayu, mereka juga berusaha memonopoli perdagangan ini dengan menguasai orderan pekerjaan. Mereka lebih mengutamakan mengambil orderan pekerjaan yang besar, sementara kepada para pengusaha pribumi orderan diberikan yang kecil-kecil saja. Bila para pengusaha pribumi tidak mau menurutinya maka sudah tentu pedagang kayu di Kalimantan, Sulawesi yang merupakan koneksi mereka sesama kaum Cina Peranakan tidak mau memakai jasa mereka. Hal ini sangat menyengsarakan pengusaha pribumi karena terkadang berbulan-bulan kapalnya hanya lego jangkar di pelabuhan. Kalau sudah begini ongkos yang harus dibayar ke Syahbandar untuk biaya memakai dok Pelabuhan Sunda Kelapa terus bertambah, belum biaya perawatan kapal, dan lain-lain.

Para pengusaha Cina Peranakan ini memang sangat terkonsentrasi dengan monopoli perdagangan kayu di Pelabuhan Sunda Kelapa. Bahkan pengusaha Cina Peranakan baru mulai mengalihkan pandangan dalam bisnis ikan pada dekade tahun 1990-an, saat mereka merasa aturan *illegal logging* dari pemerintah benar-benar menutup segala kemungkinan dalam perdagangan kayu. Namun tetap saja beberapa dari mereka sudah hadir di perdagangan ikan bahkan berhasil mengembangkan usahanya. Pada saat pabrik asing masuk di pelabuhan, kaum Cina Peranakan juga yang dipercaya pemerintah untuk melakukan ekspor ikan. Kepercayaan pemerintah memang dibayar dengan kerja yang baik dengan inovasi mereka dalam perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari masuknya modal para Toke ini di usaha nelayan di wilayah

Penjaringan. Disini mereka menunjukkan hal inovatif dalam usaha perikanan dengan memiliki kapal motor kursin sendiri yang lebih besar dan cepat dibanding kapal bagang nelayan tradisional. Mereka kemudian mempekerjakan para pribumi untuk menjadi nelayan dan tenaga lainnya, kaum Cina Peranakan memang selalu hanya menjadi pemodal dan bukan pelaku sesungguhnya.

Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman sistem pekerjaan juga diatur kembali oleh pemerintah dengan harapan dapat mengakomodir tenaga kerja dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat dipekerjakan di pabrik-pabrik asing yang meng-eksport ikan sebagai tenaga buruh pemotong ikan, pengangkut, dan lain-lain. Beberapa yang menjadi pedagang ikan kemudian diorganisir dengan baik keberadaannya. Disini mereka tidak perlu bayar pungli untuk uang keamanan karena ada iuran dan dana lain yang harus dibayarkan kepada pemerintah lewat pejabat yang berwenang disini. Banyak dari mereka yang pengangguran kemudian diarahkan untuk menjadi tenaga buruh pelelangan (TKBM) yang bertugas membawa ikan dari kapal ke tempat pelelangan ikan.

Untuk melindungi perdagangan dan menghindari konflik yang sering terjadi mereka kemudian meniadakan posisi *pesisir* atau calo dalam perdagangan ikan. Otomatis dengan hilangnya peran *pesisir*/calo ikan maka praktek pungli juga ditiadakan dalam perdagangan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman. Para preman yang tergabung dalam afiliasi perdagangan atau yang bergerak sendiri kemudian juga ditumpas habis. Untuk menjalankan hal ini pemerintah bahkan mengirim tentara untuk mengawasi kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman. Para tentara ini bekerja dibawah BAIS dan bertanggung jawab kepada BAKORSTANAS secara langsung. Dalam bertugas di wilayah Penjaringan mereka sehari-harinya selalu menyamar sebagai penduduk lokal. Seorang Ibu bernama Rini yang sempat saya wawancarai menggambarkan dengan jelas kekalutan masyarakat akibat kehadiran tentara pada masa ini. “Dulu sebelum banyak BAIS²

² Sebutan masyarakat wilayah Penjaringan pada tentara yang bertugas di wilayah Penjaringan pada masa itu.

disini itu kerjanya ribut mulu”, ujar Ibu rini. “Tapi begitu mereka datang, preman ama anak muda ribut udah jadi jarang banget... apalagi konflik antar Makasar sama orang Kulon³”, jelasnya dengan gamblang. “Biar aman tapi waktu itu adak gak’ enak juga... Soalnya ga bisa bebas mau main, nah kita kan masih anak kecil waktu itu... masih suka ‘ngeplak’, ama Bais begituan juga suka ditangkep soalnya”, ceritanya sambil malu-malu. Pada saat saya tanya lebih lanjut ternyata ‘ngeplak’ disini dimaksudkan dengan mencuri hasil laut milik nelayan. Anak kecil pada saat itu memang senang bermain ramai-ramai di pelabuhan. Disana sebagian dari mereka sering ada yang berusaha mencuri ikan dari perahu nelayan. Selain untuk dimakan ada juga biasanya pedagang yang mau membeli ikan tersebut, harga ikan tentu murah karena tentu tidak lewat pelelangan. Begitu tegasnya peran yang dijalankan tentara di wilayah Penjaringan memang terbukti ampuh mengamankan dan melindungi perdagangan di Pasar Ikan. Tentara setidaknya berhasil menjaga perdagangan ikan agar berjalan dalam logika Orde Baru yang sedang kalang kabut membenahi industri Indonesia agar menguntungkan setelah kejatuhan Pertamina, pemasukan terbesar andalan Bangsa Indonesia di kala itu.

Dalam menjamin keberlangsungan usaha kaum Cina Peranakan bermodal besar, pemerintah bahkan mau pasang badan untuk mereka. Hal yang mereka lakukan dalam melindungi usaha kaum Cina Peranakan ini, merupakan kelanjutan dari tindakan masuknya tentara untuk memberantas preman, pencuri dan unsur kekerasan lain seperti diatas sudah saya jelaskan. Setelah dirasa aman, tentara kemudian melakukan apa yang mereka namakan sebagai Operasi Teritorial yaitu membentuk pengamanan swadaya masyarakat yang bertugas menjaga ketertiban di wilayahnya. Di wilayah Penjaringan secara lebih jelas dapat diceritakan tentara kemudian mengumpulkan berbagai kepala preman dan orang-orang yang sering bertikai. Dari mereka apabila dibagi secara etnis maka terciptalah dua kubu yang memang sering saling bertengkar yaitu kelompok etnis Banten dengan afiliasi-afiliasi perdagangannya dan kelompok

³ Salah satu nama daerah di Banten, namun menjadi sebutan beberapa dari mereka untuk menyebut identitas kelompok etnis Banten.

etnis Makasar. Dalam beberapa pertemuan, tentara kemudian mengadakan pendekatan agar mereka semua mau disatukan dalam satu lembaga/ organisasi masyarakat. Tugasnya mungkin masih sama yaitu menjaga keamanan pelabuhan, tetapi mereka lebih diwajibkan untuk menjamin agar perdagangan kaum Cina peranakan berjalan dengan tenang. Organisasi pengamanan swadaya masyarakat ini kemudian bernama PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Swakarsa). Setelah organisasi ini ada maka peran tentara yang menyamar dan melakukan penculikan kemudian tidak ada lagi. Tentara merasa para preman telah dijinakan dengan masuk PAMSWAKARSA didikan mereka dan bagi mereka yang membandel sudah pasti tidak sanggup menghadapi organisasi tersebut.

Bentuk organisasi seperti ini sebenarnya menjamur keberadaannya pada era Orde Baru, organisasi ini lebih merupakan milisi sipil yang menjadi alat pemerintah dalam menjaga keamanan di tengah warga. PAMSWAKARSA di beberapa wilayah di Jakarta juga dimanfaatkan nantinya untuk mengakomodir masa, digerakan ke berbagai wilayah bagi kepentingan Orde Baru. Jejak organisasi ini sangat terlihat dalam aktifitas demo menentang kegiatan mahasiswa setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Mereka juga terlibat dalam demonstrasi menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

PAMSWAKARSA dan tentara merupakan kedua hal yang cukup memberi warna baru dalam kehidupan wilayah Penjaringan. Dengan nuansa kekerasan tersendiri, keduanya dimaknai dalam interaksi masyarakat yang sangat membentuk corak khas kehidupan wilayah ini. Kaum Cina tentu menjadi orang-orang yang paling diuntungkan pada masa ini. Usaha mereka jelas mengembang dengan baik dan berjalan tanpa gangguan yang cukup berarti. Orang pribumi jelas sangat kalah bersaing dalam segi modal dan sangat takut berhadapan dengan tentara saat mau bersuara untuk ketidakadilan ini. Wilayah Penjaringan pada masa ini telah berhasil mewujudkan mereka menjadi orang-orang kaya di Indonesia bahkan sampai sekarang. Salah satu contoh tentu dapat ditunjukkan pada sosok Tomy Winata, pengusaha yang terkenal dekat dengan para Jendral di Angkatan Darat.

Orang-orang dari Banten menjadi kelompok etnis yang berusaha menyambut tindakan represif pemerintah dengan tenang pada awalnya. Walaupun sudah tentu lebih rugi dalam berusaha setelah adanya monopoli pengusaha Cina Peranakan, mereka tetap merasa pemerintah berhak melakukan pengaturan tersebut. Pada dasarnya mereka sangat menyadari kekuatan besar dari pemerintah pada masa ini. Kenyataan itu membuat mereka memutuskan untuk lebih kooperatif bagi keuntungan mereka sendiri. Selain dikarenakan sifat pragmatis mereka dalam kehidupan, pemilihan mereka untuk tetap berdekatan dengan pemerintah didasarkan pada keterikatan mereka di awal dengan GOLKAR . Pada saat awal Orde Baru berkuasa banyak para Jawara di Banten memang direkrut masuk bidang politik melalui Golkar. Mereka kemudian menjadi pengurus atau menjabat posisi penting dalam organisasi dibawahnya. Mereka berperan sebagai tentara sipil pemerintah dalam naungan Partai Golkar yang bertugas mengarnankan kegiatan usaha pemerintah. Dengan posisi tersebut mereka mendapat keuntungan menjadi kontraktor untuk proyek-proyek pembangunan pemerintah di Banten. Keberadaan mereka akhirnya bahkan sangat menguasai perputaran uang yang berjalan dalam logika pembangunan ekonomi Orde Baru di Banten.

Dengan keterikatan tersebut sebenarnya orang Banten di wilayah Penjaringan lebih memaknai adanya PAMSWAKARSA dan masuknya tentara. Mereka merasa dengan aktif di PAMSWAKARSA berarti sedang menjaga kegiatan usaha pemerintah, dimana nanti sebagai imbalannya akan mendapat keuntungan finansial dan kesempatan baik dalam berdagang di Pelabuhan Nizam Zahman. Terbukti setelah dibentuk PAMSWAKARSA ini afiliasi-afiliasi perdagangan ikan non – Bugis/Makasar dengan sendirinya mereka bubarkan. Mereka kemudian tetap menjalankan profesi namun beberapa yang merasa dirinya Jawara sejati kemudian bergabung dalam PAMSWAKARSA ini. Orang-orang Banten memang akhirnya menjadi pemimpin dalam struktur organisasi ini. Keberadaan mereka disebar menjaga setiap sudut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman. Mereka sangat

patuh menjadi penjaga perdagangan yang kesepakatan di dalamnya pada dasarnya sangat tidak menguntungkan mereka.

Orang-orang dari Bugis dan Makasar menjadi kelompok etnis yang paling menderita dalam kehadiran PAMSWAKARSA dan masuknya tentara. Pada akhirnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa dalam monopoli dagang pengusaha Cina Peranakan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Beberapa dari mereka memang dilibatkan dalam PAMSWAKARSA namun tetap saja posisinya ditetapkan dibawah posisi orang-orang Banten. Frustrasi akan keadaan ini banyak kemudian pengusaha Bugis kaya menjual semua asetnya di wilayah Penjaringan seperti kapal kayu dan lapak ikan. Mereka kemudian hijrah ke wilayah lain di Jakarta menjadi pedagang kelontong atau berwirausaha apa saja. Beberapa yang bertahan kemudian tetap melanjutkan usahanya walau tahu sudah tidak menguntungkan. Orang Makasar yang lebih banyak kuantitasnya kemudian banyak yang memilih untuk bertahan. Mereka tetap aktif dalam urusan angkut berat perdagangan laut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Namun kali ini mereka harus rela bekerja dibawah pimpinan pengusaha Cina Peranakan, entahlah menjadi anak buah kapal, atau mengurus angkut berat (mandor atau kuli angkut). Mereka yang berprofesi sebagai nelayan kebanyakan juga masih menjalankan aktivitasnya walau kemudian harus bersaing sengit dengan armada pencari ikan milik kaum Cina peranakan. Sementara itu di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman, orang Makasar yang terlanjur merambah usaha perdagangan ikan mau tak mau harus terus menjalankan usahanya. Mereka hanya bisa pasrah dengan pengawasan dan peraturan ketat dari pemerintah yang jelas tidak memungkinkan usaha mereka berkembang dengan baik.

BAB VI

KEKANGAN STRUKTURAL

6.1. Detik-Detik Akhir Masa Orde Baru

Wilayah Penjaringan yang dibangun sebagai daerah pusat industri penghasil ikan pada akhirnya berjalan dalam proses keterpurukan. Selayaknya kegagalan rencana pembangunan lain pada masa akhir Orde Baru, kesemua ini terjadi dikarenakan tidak berjalannya sistem perekonomian yang seharusnya mensejahterakan masyarakat. Monopoli kaum Cina peranakan dan oknum pemerintah juga tak lagi dapat dibendung dan semakin merugikan negara. Masyarakat pribumi yang terlanjur tidak punya modal besar dan keahlian akhirnya tidak bisa melakukan banyak hal dan malah menjadi tanggungan karena harus dijamin hidupnya oleh pemerintah. Kompleksitas masalah ini kemudian sangat berimplikasi pada hutang negara yang semakin menumpuk kepada negara asing, dimana memang sangat diandalkan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah selalu mengoreksi dan terus melakukan pembenahan. Tetapi mau dikata apa, setiap rencana pada akhirnya tidak pernah dapat memberi perbaikan yang cukup signifikan. Rencana-rencana tersebut malah kemudian seolah menjadi penanda waktu bagi kemunduran lain dalam setiap kehidupan masyarakat. Semakin terus menerus pembangunan dikumandangkan dari mulut Suharto sebagai pemimpin negara, maka semakin merasa dipaksa untuk hidup **tidak sejahtera** pula masyarakat di wilayah Penjaringan ini.

Dalam kenyataannya masyarakat pribumi memang semakin hidup dalam kemiskinan dan tinggal di rumah-rumah sempit yang kumuh. Banyak dari mereka bahkan kemudian mulai memanfaatkan area luas dibawah jalan tol dan bantaran kali sebagai pemukiman tetap. Bagi mereka pembangunan dimaknai lebih sebagai transformasi yang tidak menghasilkan kontinuitas namun hanya repetisi janji kosong

tentang kesejahteraan. Gambaran ini dipertegas oleh para pemuda yang hidup pada era itu, saat menceritakan pengalamannya kepada saya. “ *Waktu itu keadaan memang sedang jatuh banget*”, jelas Pak Konaedi. “*Semua usaha lagi susah, mau cari ikan atau bawa kapal... Cina juga pada belagu dimana-mana dan kayanya itu juga gak’ ketulungan*” “*Mereka pada berani soalnya tentara mau setia banget ngelindungi mereka*”, ujarnya setengah emosi. Kaum Cina peranakan tentu menjadi pihak yang terlihat paling mentereng hidupnya. Mereka yang kebanyakan pengusaha besar di wilayah Penjaringan kemudian mulai membangun daerah elit dan perumahan mewah di Pluit dan Pantai Indah Kapuk. Dua daerah yang mengapit Kelurahan Penjaringan ini, dibuat begitu baik dalam segala aspek untuk pemukiman di Jakarta. Kehadiran kaum Cina peranakan disana seakan menegaskan status mereka yang kaya dan kuat. Hal ini dikarenakan selain hidup dalam kemewahan, mereka juga menyediakan rumah-rumah bagi jendral-jendral yang dekat dengan mereka untuk tinggal disana. Bagi para Jendral tentu sebuah kebanggaan mendapatkan hadiah seperti itu, namun bagi kaum Cina peranakan mereka jelas merasa ada jaminan keamanan dalam kehidupan.

Kekecewaan masyarakat Pribumi meluas dimana-mana menanggapi kemerosotan hidup pada masa akhir Orde Baru ini. Di wilayah Penjaringan kekecewaan tersebut terlihat pada pemilu terakhir dalam era Orde Baru, dimana kantong suara di RW 17 Muara Baru membuat PDI menang mutlak dalam pemungutan suara mengalahkan GOLKAR. Hal ini merupakan tamparan keras bagi pemerintahan Suharto, terlebih kelompok etnis Banten yang banyak tinggal disana sudah mulai terlihat berpaling dari GOLKAR. Mereka yang diharapkan dapat menunjukkan kesetiaannya sebagai masa pendukung pada akhirnya kembali menunjukkan sifat pragmatisnya. Mereka nampaknya lebih memilih untuk mendukung kekuatan baru yang mungkin bisa membantu mereka dalam kesusahan hidup daripada setia dengan GOLKAR yang notabene adalah kendaraan politik Orde Baru. Hal ini tentu disambut hangat oleh kelompok etnis Bugis/Makasar, Jawa, dan lain-lain. Mereka yang sedari awal sangat

tidak setuju dengan monopoli pengusaha Cina peranakan sudah tentu sangat kecewa dengan pemerintahan Orde Baru.

Kekalahan GOLKAR di RW 17 Muara Baru pada akhirnya tidak berpengaruh banyak karena pada akhirnya GOLKAR memang berhasil menang kembali pada pemilu tersebut. Namun bagi Pemerintah Orde Baru jelas harus ada konsekuensi dari tindakan masyarakat wilayah Penjaringan yang dinilai sangat menyimpang pada masa itu. Konsekuensi yang mereka terima adalah permainan teror kekerasan seperti kebanyakan dilakukan didaerah lain pada masa Orde Baru, yaitu peristiwa kebakaran yang terjadi di Muara Baru tepatnya di kampung bernama kebontebu pada sekitar tahun 1990-an. Banyak korban meninggal dalam peristiwa ini karena pemukiman tersebut memang sangat padat penghuninya. Pemerintah DKI dituduh lalai dalam menangani hal semacam ini, namun dibalik itu semua masyarakat di wilayah Penjaringan lebih merasa kejadian ini sebagai peringatan bagi mereka. *"Tidak mungkin orang iseng main bakar rumah sendiri, jelas Pak Konaedi. "Itu mah, paling kerjaan tentara atau orang intel... Mana ada pemerintah suka sama orang sini lagi gara-gara pilih Mega"*, tanggapannya pada peristiwa itu. Hal ini kemudian juga diamini oleh Ibu Mini korban kebakaran pada waktu itu yang masih selamat. *"Kalau dulu gara-gara Mega menang disini, rumah saya kebakar abis di kebontebu"*, jelas ibu mini dengan agak sedih. *"Kita semua harus pindah lagi cari lahan kosong di Muara Baru soalnya areal kebontebu yang abis kebakar akhirnya dijual ke Salim Group".... Kita dapat pesangon tapi bukan main kecilnya, "Tapi apa mau dikata kita mesti terima soalnya rumah sudah habis terbakar"*, ujarnya lagi. Konsekuensi teror kekerasan dimana ditujukan untuk menegaskan "keangkeran" pemerintah Orde Baru memang sangat sering terjadi dimasa itu. Biasanya Orde Baru kemudian juga menyelipkan maksud-maksud bisnisnya seperti yang dilakukan dengan menjual tanah tersebut kepada Salim Group. Hal ini dilakukan tentu dengan harapan konglomerasi bisnis Cina peranakan ini dapat memanfaatkannya untuk bisnis menguntungkan.

Krisis perekonomian pun terjadi pada sekitaran tahun 1997 dimana merupakan puncak dari semua masalah di Indonesia. Wilayah Penjaringan dan masyarakat

pribuminya tetap tidak bisa berbuat banyak hal seperti rakyat Indonesia pada masa ini. Orde Baru memang sangat ketat mengawasi bentuk-bentuk perlawanan masyarakat terlebih setelah peristiwa malari, peristiwa Tanjung Priok, dan penandatanganan petisi 50 yang berusaha mengoreksi kepemimpinan Suharto. Permainan teror juga sangat rapi dilakukan pemerintah Orde Baru untuk sedikit mengalihkan perhatian mereka akan ketidakadilan dan kemiskinan dalam kehidupan. Tercatat ada satu peristiwa yang cukup menggemparkan Indonesia yang terjadi di wilayah Penjaringan. Peristiwa ini bahkan sempat mengalihkan perhatian Bangsa Indonesia dalam jalan menuju pergolakan reformasi.

Pada tanggal 18 Januari 1998, bom meledak di rumah susun Tanah Tinggi. Bom itu terbuat dari bahan kimia sederhana tidak meledak besar namun akibatnya tidak sederhana. Peristiwa ini memicu kontroversi politik luas. Sofjan Wanandi, juru bicara pengusaha konglomerat keturunan Tionghoa, dan Surya Paloh, pemimpin umum harian Media Indonesia, sempat kena getahnya. Hal itu terjadi dikarenakan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang berkedudukan di Jakarta Pusat turun tangan langsung memanggil Sofjan dan Surya Paloh. Nama Sofjan, juga kakaknya Yusuf Wanandi, tokoh Center for Strategic and International Studies, tertera dalam sebuah dokumen surat elektronik (e-mail) antaranggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang ditemukan dalam sebuah komputer di tempat kejadian. Isinya kurang lebih: ketiga orang itu mendanai kegiatan organisasi tersebut. Di luar itu, Agus Priyono, 28 tahun, anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), anak organisasi PRD ditangkap oleh Polda Metro Jaya di tempat kejadian. Kepada aparat, Agus mengakui bahwa bom itu dibuat PRD. Setelah diseret ke meja hijau, Agus divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman penjara selama tujuh bulan lebih karena dianggap mengetahui rencana pengeboman tapi tidak melaporkannya ke pihak berwajib.

PRD adalah organisasi politik terlarang ketika Soeharto masih berkuasa. Bila kemudian kita menghubungkan masalah ini dan berpikir secara jernih, maka sudah jelas isu ini adalah palsu. Pada kenyataannya wartawan tempo ada yang mendapat

keterangan dari teman satu sel Agus di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta. Kepada Agus menyatakan bahwa ledakan bom tersebut cuma kecelakaan biasa. Suatu hari, begitulah kisahnya, Agus yang dikenal suka mengutak-atik peralatan apa saja tertarik merakit bom kecil-kecilan. Namun, entah bagaimana persisnya, bom yang ditinggalkan di atas meja itu suatu waktu meledak. Bunyinya terdengar sampai radius 500 meter. Getarannya memecahkan kaca-kaca pintu. Ledakannya menjebol atap eternit sebesar sejengkal tangan. Agus dan beberapa temannya terkejut. Agus yang keluar belakangan, ditangkap oleh aparat. Sayangnya, selepas dari penjara, Agus dikabarkan sengaja "menghilang", meninggalkan sebuah peristiwa yang tetap misterius hingga kini. Di satu sisi isu ini jelas ditujukan untuk melempar kesalahan pada pihak yang dianggap kaum pembangkang beserta berbagai gambaran palsu tentangnya. Seakan ingin menghadirkan ancaman untuk membangkitkan kesadaran sebagai bangsa yang sedang diancam pengkhianat. Drama yang mirip-mirip dengan bagaimana Suharto menimpakan G30/SPKI kepada komunis dan PKI, namun kali ini PRD yang menjadi kambing hitamnya.

Pada akhirnya masyarakat wilayah Penjaringan seakan sudah muak hidup dalam kepemimpinan Suharto. Kesadaran kultural mereka kali ini timbul untuk melawan pemerintahan Orde Baru yang terus berjalan dalam teror sebagai konsekuensi tindakan yang mereka tidak setuju dan sebagai pengalihan isu akan kemiskinan. Momentum itu terjadi setelah seruan reformasi dari mahasiswa dijawab dengan pengunduran diri Suharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Reformasi menang dan Jakarta pun larut dalam kacau balau kerusuhan.

Di wilayah Penjaringan kemenangan reformasi ini dimaknai seperti di daerah lain di Jakarta yaitu dengan pengrusakan dan kerusuhan. Korbannya juga sama yaitu para kaum Cina peranakan, namun yang berbeda kaum Cina peranakan yang menjadi korban adalah mereka yang kaya dan bukan yang miskin dan hidup berbaur dengan warga. Wilayah Penjaringan memang banyak menampung kaum Cina peranakan dengan status biasa saja. Mereka hidup berbaur dengan warga di beberapa wilayah pecinan yang bernama tanah merah dan tanah pasir. Kebanyakan kaum Cina

peranakan yang kaya memang hanya memiliki usaha di wilayah Penjaringan, sementara rumah mereka ada di kawasan elit Pluit dan Pantai Indah Kapuk. Disana keamanan mereka sangat terjaga karena para Jendral adalah tetangga mereka. Pada saat kerusuhan di Jakarta merebak, kawasan ini bahkan dipagari oleh puluhan kendaraan lapis baja milik tentara.

Keadaan ini menyebabkan mereka Cina peranakan kaya yang menjadi korban adalah para penghuni apartemen mewah satu-satunya di wilayah Penjaringan. Apartemen yang terletak bersebrangan dengan kawasan kampung Luar Batang ini memang sangat mencolok keberadaannya. Disini diperkirakan beberapa orang meninggal, barang mereka kebanyakan dijarah dan beberapa wanitanya ada juga yang diperkosa oleh warga. Konsentrasi masa yang datang dapat diperkirakan datang dari sekitaran kampung Luar Batang, Muara Baru, dan lain lain. Pak Edi seorang etnis Jawa yang menjadi tokoh masyarakat karena keterlibatannya dalam politik di wilayah Penjaringan menceritakan kejadian ini suatu waktu pada saya. *“Kacau banget keadaan waktu itu.... Mayat toke Cina bergelimpangan di jalan depan apartemen, akhirnya saya sama pemuda mesjid yang mungutin”*, ujarinya mengenang masa itu. *“Saya tau sebenarnya siapa aja pelakunya, tapi mau dikata apa ... masyarakat memang udah terpancing... tentu kita kalah jumlah dong kalau mau bikin tenang mereka”*, tambahnya lagi. *“ Akhirnya setelah beberapa hari kerusuhan reda saya bersama tojoh agama kumpulin warga banyak-banyak di Kelurahan ... Disana kita suruh warga balikin barang jarahannya masing-masing”*, *“Beberapa nurut mau balikin tapi kebanyakan emang pada gak mau ngaku.”* Jelasnya kepada saya.

6.2. Kebebasan Dalam Ketidakmampuan

Setelah keadaan kembali aman dengan naiknya Presiden B.J Habibie, momentum reformasi kemudian dimaknai masyarakat wilayah Penjaringan pada awalnya sebagai suatu gerbang kebebasan. Mereka berharap masa ini tentu dapat memberi perbaikan akan kehidupan, mengingat keadaan sudah berubah dengan adanya ketakutan kaum

Cina peranakan dan melemahnya peran TNI. Mereka setidaknya berharap dapat ada jalan untuk naik ke permukaan dan kembali ikut menegosiasikan kesepakatan dalam hidup.

Disinilah dimulai babak baru dalam kehidupan masyarakat wilayah Penjaringan yang kemudian masih berjalan sampai pada masa sekarang. Suatu kehidupan dimana mereka memang hidup dalam kebebasan bertindak sesuai dengan kesadaran diri, tetapi di satu sisi pada kenyataannya keadaan tidak akan pernah dapat mendukung mereka naik ke permukaan. Keadaan yang saya maksud disini ditujukan pada kehidupan masyarakat wilayah Penjaringan itu sendiri yang terlanjur jatuh dalam kemiskinan dan kebodohan. Masyarakat Penjaringan jelas tidak memiliki modal sosial yang sesuai untuk memenuhi ekspektasi perkembangan zaman.

Di Pelabuhan Sunda Kelapa pada akhir tahun 2000, usulan peraturan *illegal logging* yang tertahan pada masa Orde Baru -karena alasan bisnis gelap konglomerat Cina peranakan- akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi masyarakat wilayah Penjaringan yang banyak mengandalkan hidup di Pelabuhan Sunda Kelapa, keadaan ini jelas menjadi pukulan terberat yang pernah mereka terima. Usaha jasa pengangkutan kayu sebagai pemasukan utama mereka setelah angkut berat dari jalur laut lebih difokuskan di Pelabuhan Tanjung Priok akhirnya harus ikut hilang. Keadaan ini membuat banyak orang Bugis terpaksa menjual kapalnya ke pengusaha Cina peranakan. Mereka lalu menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk beralih menjadi pedagang ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman. Beberapa pengusaha dari kelompok etnis Bugis yang terlanjur menjadi tokoh masyarakat kemudian memakai status sosialnya untuk tampil di tengah masyarakat. Beberapa bahkan kemudian berhasil memanfaatkan momen pada masa reformasi dimana banyak hadir partai untuk menjadi juru kampanye partai. Wilayah Penjaringan dengan penduduk yang sangat banyak memang menjadi kantung-kantung suara yang potensial.

Sementara itu orang-orang Makasar yang pada awalnya bertahan kemudian pada akhirnya harus mengalah dengan keadaan dan mulai banyak berganti profesi. Mereka yang memiliki modal usaha kemudian meninggalkan pekerjaannya di Pelabuhan Sunda Kelapa dan memilih lebih serius berdagang ikan di pelelangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman. Pada masa ini mereka tidak lagi ikut dengan kerabat mereka dari kelompok etnis Bugis melainkan menjalankan usahanya secara personal. Beberapa dari mereka yang tidak punya modal usaha kemudian banyak memilih menjadi buruh angkut di pelelangan ikan itu juga. Profesi buruh angkut dalam perdagangan ikan ini terbukti sangat menguntungkan karena ada batas pekerja sehingga tidak dapat dilakukan sembarang orang. Peraturan ini membuat hanya ada beberapa pekerja yang bertugas memanggul orderan angkut ikan baik dari pedagang atau pembeli. Kondisi tersebut membuat banyak orang Makasar berpikiran pragmatis untuk kemudian memilih menguasai kesempatan tersebut daripada menjadi pekerjaannya (kuli di pelelangan). Mereka melakukan hal tersebut dengan cara menyewakan atau menjual rompi pekerjaannya pada orang lain yang mau bekerja. Pekerja kuli angkut di pelelangan memang kemudian diberi rompi oranye untuk membedakannya dengan pedagang dan pembeli di tempat pelelangan. Rompi ini juga menjadi pertanda bahwa mereka adalah orang yang sah dalam peraturan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman untuk melakukan usaha pengangkutan ikan. Harga rompi oranye ini sekarang bahkan sampai angka 30 Juta jika dijual, tidak peduli kondisi rompi sudah rusak sekalipun. Nampaknya penampilan fisik rompi tidak dihiraukan karena kesempatan bekerja sebagai tenaga angkut membuat rompi ini lebih bernilai.

Orang-orang Makasar pada masa ini kemudian juga mencoba mendalami profesi yang benar-benar baru dalam kehidupan untuk mata pencaharian mereka. Di wilayah Penjaringan banyak mantan anak buah kapal kemudian menjadi ojek kapal motor yang mengantar turis atau warga sekitar dalam kesehariannya. Sementara mereka yang berprofesi sebagai nelayan akhirnya harus pindah ke tempat lain seperti daerah Cilincing dan Kamal Muara, mereka harus mengalah kepada kapal-kapal besar milik

pabrik yang jauh lebih besar dan canggih. Beberapa dari mereka yang keluar dari wilayah Penjaringan juga melakukan pekerjaan seperti menjadi pemulung, kuli bangunan, dan lain-lain. Saya sempat menelusuri keberadaan mereka yang hijrah keluar dari wilayah Penjaringan sampai ke suatu daerah bernama Jurangmangu, Bintaro. Disana saya bertemu dengan Pak Ade, seorang Makasar yang dulunya bekerja sebagai kuli angkut di Pelabuhan Sunda Kelapa.

“Tepat di tahun 2000, bisnis angkut kayu berkurang terus menerus karena peraturan pemerintah”, jelas Pak Ade. “Saya gak’ punya modal buat buka usaha, jadinya jadi kuli bangunan keliling aja ... Memang ada teman tawarin kerja di pabrik, tapi saya mana kuat udah tua gini”, tambahnya lagi. “Akhirnya saya ambil aja tawaran dari kakak ipar buat kerja kaya gini(pemulung) ... Biar kecil duitnya yang penting cukup buat makan dan santai kerjanya”, ungkapny mengenai alasan menjadi pemulung.

Dalam kenyataannya, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman yang diharapkan dapat menjadi harapan masyarakat setelah terpuruknya Pelabuhan Sunda Kelapa pada akhirnya tidak dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Usaha perdagangan ikan sepi karena pabrik-pabrik eksportir ikan tidak mau membeli ikan lagi dari pelelangan. Walaupun zaman telah berganti namun monopoli dagang nampaknya sudah menjadi kerak yang susah untuk dihapuskan.

Layaknya semua pelabuhan ikan, maka kapal muatan ikan yang bersandar sudah seharusnya menjual semua ikan di tempat pelelangan pelabuhan, begitu juga sistem yang diterapkan awalnya di pelabuhan ini. Dengan adanya pelelangan ikan maka pelabuhan selaku pengawas dapat serta merta mengatur perdagangan agar tidak terjadi monopoli. Para warga yang kebanyakan pedagang juga secara tidak langsung dapat merasakan keuntungan dalam kegiatan transaksi jual beli ikan di pelelangan ini. Rancangan sempurna ini pada kenyataannya tidak berjalan sedemikian rupa. Perusahaan besar pada perkembangannya selalu berusaha untuk memonopoli kegiatan perekonomian di pelabuhan ini. Berbagai hal mereka lakukan seperti

bertransaksi dengan nelayan langsung untuk mendapatkan ikan kualitas terbaik tanpa melewati pelelangan agar mendapat harga yang lebih murah karena tidak terkena pajak pelabuhan.

Pada kelanjutannya kebanyakan dari perusahaan juga mendirikan lokasi pabrik di pelabuhan dan memiliki kapal sendiri dengan dok –untuk berlabuh- di sekitar pabriknya. Hal ini membuat mereka bisa langsung membawa ikan tangkapan kapalnya langsung ke gudang pendinginan untuk kemudian diproses di pabrik tanpa melewati pelelangan. Mereka melakukan ini dengan alasan efisiensi produksi. Sehingga banyak pengusaha kemudian membuat persetujuan dengan pemerintah untuk memiliki armada kapal pencari ikan sendiri dan memiliki lokasi yang dibuat sebagai gudang penyimpanan ikan. Hal ini tentu membuat banyak pedagang ikan di Pelelangan ikan menderita karena konsumen besar mereka yaitu pabrik-pabrik eksportir sudah hilang. Mereka juga tidak bisa mendapat ikan dengan kualitas yang baik karena para nelayan tradisional kebanyakan kalah teknologi dengan kapal-kapal besar milik pabrik. Di tahun 2005 secara mengejutkan pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan secara mengejutkan mengeluarkan larangan ikan hasil tangkapan kapal nelayan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman untuk dijual selain kepada pabrik. Peraturan ini menyebabkan banyak pedagang di pelelangan menutup usahanya dan beralih ke bidang wirausaha lain. Mereka pada kenyataannya tidak memiliki cukup modal untuk harus setiap saat membeli dari nelayan dari daerah tangkapan lain seperti Cilincing, Kamal Muara, Muara Angke, dan lain-lain. Beberapa memang masih bertaham sampai sekarang dengan coba memanfaatkan koneksi dengan para nelayan yang masih berani menjual kepada pedagang secara sembunyi-sembunyi. Selain itu mereka juga terkadang bersusah payah membeli ikan di laut, karena begitu sampai darat mereka sudah tidak bisa bertransaksi lagi.

6.3. Senjatanya Orang – Orang Yang Pragmatis

Keterpurukan masyarakat wilayah Penjaringan menjadi sedemikian parah tentu dikarenakan dalam 32 tahun kekuasaan Suharto mereka terlanjur dipaksa tunduk sebagai mesin-mesin pekerja. Mereka tentu lemah dalam pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi tuntutan globalisasi seperti pada masa sekarang. Pak Konaedi sebagai informan kunci saya dalam penelitian ini juga dengan jelas mengakui hal ini. *“Warga sini gak’ bener kalau cuma dibantu materi aja... Mereka harus dikasih pelajaran dan diberi pendidikan”*, usulnya kepada saya. *“Perusahaan gede sih banyak... Jalan dari rumah bentar juga ketemu pabrik asing, yah tapi gtu gara-gara gak’ ada sekolah paling jadi buruh”*, tambahinya lagi dengan liris.

Sadar akan ketidakmampuan diri menghadapi perkembangan zaman membuat banyak dari mereka kini kemudian mulai menerawang ke masa lalu. Memaknai jalan sejarah yang membentuk diri mereka seutuhnya. Mereka melakukan hal ini untuk lebih mengerti masalah yang mereka lalui di masa sekarang dan tentunya menentukan sikap sebagai koreksi atas kesalahan dari tindakan mereka yang terdahulu. Perenungan tersebut pada kenyataannya kemudian membuat masyarakat wilayah Penjaringan lebih pragmatis dalam menjalankan kehidupan. Menjadi demikian karena sifat pragmatis ini setidaknya kemudian nyata dalam kehidupan mereka dalam memaknai kemiskinan. Suatu saat kemiskinan mereka terima selayaknya nasib yang tak dapat diubah, namun terkadang dalam situasi tertentu mereka kemudian menolak kemiskinan sebagai representasi kehidupan mereka.

Mereka sangat memaknai kemiskinan sebagai bagian dari diri mereka pada saat dihadapkan pada kesempatan yang sekiranya menguntungkan. Kenyataan ini kemudian sangat tercermin pada saat mereka memosisikan diri sebagai kaum yang lemah saat berhadapan dengan kekuasaan yang jelas lebih besar. Perilaku sangat manis ditunjukkan mereka dengan maksud untuk memberi gambaran bahwa hidupnya sangat bergantung dari belas kasih orang lain. Dalam posisi tersebut, mereka berharap ada keuntungan yang diberikan untuk mereka melanjutkan hidup. Masyarakat miskin

di wilayah Penjaringan nampaknya sadar bahwa di masa lalu kekerasan pada akhirnya tidak dapat menegosiasikan kepentingan mereka. Peristiwa pembantaian kaum Cina peranakan pada tahun 1997 misalnya, walau banyak memakan korban pada kenyataannya bagi mereka Kaum Cina peranakan tetap masih menguasai perekonomian sampai pada masa sekarang. *“Biar banyak mati dulu, kayanya mereka gak’ kapok-kapok... Mereka masih ulet dan licik cari duit disini”*, jelas Pak Buyung mengomentari kaum Cina peranakan. *“Kita mau lawan susah juga Mas, sekarang kan apa-apa urusannya pasti nanti jadi panjang... Jadi ya sekarang mending kita diemin ajalah”*, tambahnya lagi.

Terutama dengan Kaum Cina peranakan, interaksi masyarakat pribumi memang kemudian memiliki kesan terbentuk hanya sesuai dengan konteks keuntungan. Selagi menguntungkan bagi mereka maka tidak jadi soal berpura-pura sesaat menghamba kepada mereka. Kejadian ini saya saksikan sendiri suatu waktu pada saat dua hari sebelum perayaan CAP GO MEH di satu klenteng berlangsung. Disana warga pribumi dengan sukacita membantu pemilik klenteng meyiapkan berbagai dekorasi dan perangkat acara. Mereka bekerja giat secara bergotong-royong dan tidak nampak raut kesal dimuka mereka. Pada saat saya bertanya mengapa begitu semangat, serempak jawaban mereka sama yaitu karena mendapat uang. *“Uangnya lumayan mas, buat belanja besok... Kalo gak’ ada uangnya mah tempeleng aja tuh Cina”*, ujar seorang bapak usia setengah baya. *“Dapet makan trus nanti pasti dikasih duit kalo hajatan gini... Lumayan itung-itung buat uang rokok daripada ngganggur”*, ujar seorang anak muda sambil tertawa. Setelah acara perayaan CAP GO MEH berlangsung interaksi mereka kemudian berjalan seperti biasa malah cenderung seperti tidak saling mengenal. Terlihat bahkan beberapa pemuda yang sebelumnya ikut bekerja kemudian dengan santai mabuk-mabukan di depan klenteng tersebut pada malam hari.

Sementara itu dalam menolak kemiskinan sebagai representasi kehidupan mereka, masyarakat Penjaringan melakukannya sebagai suatu bentuk resistensi di kehidupan. Dalam posisi ini, mereka memilih untuk mengkonstruksikan diri sebagai

masyarakat lokal yang berpengaruh dan jelas memiliki kekuatan dalam kehidupan sosial. Kenyataan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman setidaknya dapat dijadikan contoh dari tindakan mereka ini.

Saat pasca Orde Baru runtuh, kegiatan perekonomian di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman seakan tidak ada yang mengawasi secara keseluruhan. Pada masa ini peran tentara yang juga kena imbas reformasi memang menjadi lebih lunak dalam urusan keamanan. Melihat peluang tersebut, orang Banten yang sedari dulu dipercaya sebagai milisi sipil yang menjaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman oleh pemerintah -dengan adanya PAMSWAKARSA- merasa di masa reformasi dapat melanjutkan perannya tersebut dengan kekuasaan yang tentu lebih besar. Untuk mendapat legitimasi penguasaan tersebut kali ini mereka lalu mencoba menginkorporasikan masyarakat pribumi lain untuk mendukung pengaruh mereka. Dalam perkembangannya, mereka bahkan merangkul musuh lamanya yaitu orang-orang Makasar¹ walau tetap nantinya didudukkan di bawah mereka. Terkadang pula orang Banten rela menjadi wakil, sementara orang dari etnis Bugis naik menjadi ketua. Hal ini terjadi dikarenakan keterikatan orang Bugis sebagai tokoh agama memang sangat membantu orang Banten menguasai masa di bidang tersebut. Selain itu nampaknya orang Banten pada kali ini lebih memilih untuk di dukung masyarakat daripada pemerintah. Menjadi demikian karena pada masa lalu, menurut mereka pergantian kekuasaan pada akhirnya tidak menjamin posisi mereka dalam kehidupan perekonomian.

Untuk dapat menginkorporasikan masyarakat mereka kemudian memakai organisasi masyarakat RW sebagai wadah inkorporasi tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, posisi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman memang terletak di sebuah daerah pemukiman yang luas bernama Muara Baru dan terdaftar sebagai RW 17. Di daerah ini mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman tinggal. Hal

¹ Peristiwa ini terjadi dalam kenaikan Gustara M (Serang) sebagai ketua dan Sudirman Dg. Sewang (Makasar) sebagai wakil selama dua periode (2008-2011, 2011-2014) di RW 17 Muara Baru.

ini membuat posisi ketua dan wakil RW disini menjadi sangat prestise karena seolah merepresentasikan suara masyarakat yang terkait dengan kegiatan perdagangan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman.

Pengesahan seorang sebagai ketua dan wakil RW 17 kemudian dilakukan melalui ritual pemilihan yang dibuat sangat demokratis. Rangkaian acara bahkan diisi debat kandidat dan penyampaian visi dan misi layaknya pemilihan walikota. Durasi masa kampanye dan pemilihan juga dibuat seminggu penuh dengan diselingi berbagai acara hiburan. Kemenangan seorang bakal calon bahkan dibuat layaknya pesta akbar . Biaya yang dikeluarkan untuk acara ini bahkan bisa mencapai 50 Juta dimana semua dipastikan ditanggung oleh bakal calon peserta. Ritual pemilihan ini menjadi sangat penting karena disinilah mereka menunjukkan pengaruh dan kekuatan mereka seolah sebagai penguasa lokal. Semakin tinggi gengsi mereka dipertaruhkan dalam pemilihan ini seakan menunjukkan kesiapan mereka dalam memimpin masyarakat. Terbukti dengan naiknya orang Banten dalam beberapa kesempatan sebagai ketua RW17 membuat mereka kembali dapat menjalankan peran sebagai penjaga kegiatan ekonomi yang berpengaruh. Mereka tentu masih membawa nama organisasi PAMSWAKARSA seperti bagaimana tentara membentuk mereka. Namun, hal yang berbeda pada masa ini adalah mereka kemudian tidak lagi menjadi milisi pemerintah, tetapi bertanggung jawab langsung kepada organisasi masyarakat (RW) yang mendukung mereka².

Disinilah peran ketua dan wakil RW 17 yang terpilih secara demokratis oleh warga menjadi penting. Organisasi masyarakat seperti ini seakan menjadi menjadi gambaran inkorporasi masyarakat lokal wilayah Penjaringan yang jelas memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam kehidupan sosial. Pengaruh dari organisasi terlihat

² Pada masa reformasi sampai dengan masa sekarang, Orang Banten memang memperluas ruang lingkup kerja mereka dengan menjadi penjaga keamanan di berbagai tempat hiburan malam seperti lokalisasi Royal dan Kali Jodoh. Disini mereka tentu bertanggung jawab kepada pemilik dan orang yang menyewa mereka.

dalam prestise dari organisasi ini sedangkan kekuatan dalam kehidupan sosial nyata dalam kemampuan mereka menginkorporasikan hampir seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zahman. Mereka seakan menegaskan identitas mereka sebagai pemilik sah berbagai kepentingan yang ada di wilayah ini dan memosisikan para pengusaha sebagai pihak yang harus takluk dalam kekuasaan mereka. Dalam keadaan seperti ini mereka merasa sudah seharusnya para pengusaha meminta izin dan berkonsultasi kepada mereka dalam menjalankan usaha. Mereka memang tidak mengatur secara sistemik bagaimana pembagian jatah usaha, karena pada dasarnya yang mereka lakukan sekedar untuk mendapat pengakuan berupa uang yang dibayarkan kepada mereka.

Memang masih ada beberapa pengusaha kuat³ yang bersikeras tidak mau memberikan jatah uang lewat iuran organisasi masyarakat seperti RW dan PAMSWAKARSA. Biasanya mereka sudah tentu memiliki *backing* kekuatan yang sudah tentu sangat besar. Menanggapi hal tersebut masyarakat Penjaringan dengan kalkulasi kulturalnya memperhitungkan tindakannya dan memilih menanggapi dengan tidak mau ambil pusing. Menurut mereka selagi kehadiran satu bentuk kekuasaan masih sangat kuat, maka masyarakat lebih baik diam dan tak banyak protes. Namun dalam kondisi diam seperti ini bukan berarti mereka sedang membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Karena pada dasarnya mereka sedang mencoba menginkorporasikan segala unsur kekuatan untuk menegaskan posisinya dalam kehidupan sosial wilayah Penjaringan. Dalam bentuk akumulasi kekuatan ini mereka juga selalu memahaminya secara pragmatis, dimana sangat terlihat dalam pilihan mereka terhadap Cagub DKI pada periode 2012-2017.

³ Preman tanah abang Hercules dan Tomy Winata mungkin dapat dijadikan contoh dari para pengusaha ini. Mereka berdua memang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan para pembesar TNI bahkan sampai masa sekarang. Terutama Tomy Winata, dia memang beralih menguasai perdagangan ikan setelah peraturan *illegal logging* dijalankan. Dalam penguasaan industri ikan bahkan dia memiliki area laut sendiri yang tidak boleh dimasuki kapal lainnya.

BAB VII

KESIMPULAN

Kehidupan wilayah Penjaringan pada kenyataannya mewujud dalam interaksi panjang antar manusia yang terjadi dikarenakan oleh suatu bentuk kompleksitas pemaknaan antar mereka. Seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli strukturalis antropologi (Levi-Strauss), manusia, seperti juga masyarakat di wilayah Penjaringan membagi kehidupan dalam ranah budaya (*culture*) dan ranah alam (*nature*). Ranah budaya (*culture*) adalah ranah yang nampaknya sudah dimanusiawikan dan dekat dengan kehidupan manusia. Sedangkan ranah alam (*nature*) adalah ranah yang menakutkan dan liar (*wilderness*). Walaupun ranah alam yang kemudian dapat dicontohkan dengan laut, gunung, hutan rimba sangat menakutkan bagi kehidupan manusia, namun pada dasarnya disinilah hakekat dari kehidupan. Sumber segala sesuatu untuk meneruskan kehidupan, yang sangat kental keliarannya. Hal ini kemudian membuat ranah alam harus terus di-eksplora agar bisa ditransformasikan menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kompleksitas pemaknaan yang membentuk kehidupan wilayah Penjaringan sebenarnya hadir dalam bentuk paradoks dari relasi antara *culture* dan *nature* ini¹. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kehidupan wilayah Penjaringan berjalan dalam proses manusia yang tidak pernah selesai dalam memaknai dan mewujudkan bentuk oposisi biner ini (*nature dan culture*).

Bila kemudian sejarah dirunut dan diselami kedalamannya maka setidaknya gambaran kehidupan wilayah Penjaringan yang *subjunctive* dan *konstitutif* tersebut akan sangat nampak. Hal ini dapat dilihat dengan mewujudnya wilayah Penjaringan yang pada waktu lalu masih berupa daratan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai wilayah taklukan yang selalu diperebutkan oleh satu bentuk kekuasaan. Setiap penaklukan sudah tentu membawa nilai pemaknaan baru bagi wilayah ini dimana tentu

¹ Satu hal yang mungkin tidak dibahas oleh Levy-Straus yang terkesan hanya mengkontraskan antara *nature* dan *culture*.

bertentangan dengan kehidupan pada masa sebelumnya. Kita dengan jelas kemudian dapat melihat hal ini dimulai dari hegemoni Islam di Jawa yang menyerang Sunda Kelapa sebagai penaklukan kekuasaan Hindu Kerajaan Pajajaran –merupakan kerajaan Hindu-.

Invasi selanjutnya dilakukan oleh kolonialisasi bangsa Barat (Belanda, Inggris, dan Perancis) dimana kehadirannya juga seakan menegaskan bagaimana wilayah ini dibentuk dalam berbagai benturan kepentingan. Belanda pada awalnya menginginkan wilayah ini Pelabuhan Sunda Kelapa masuk sebagai bagian dari wilayah *Intramous* (dalam tembok kota) yang merupakan gambaran kota Batavia. Mereka tentu tidak mau sembarangan merepresentasikan wilayah ini karena merupakan bagian dari kota Batavia dengan kedudukan Gubernur Jendralnya yang mengatur seluruh daerah jajahan Belanda di belahan bumi bagian timur². Sebagai Pelabuhan kehadirannya dalam kompleks *Intramous* (dalam tembok kota) sangat menambah gairah kemegahan kota ini. Dimana wujudnya memang dibangun Belanda sebagai pusat kanal-kanal kota yang pada awalnya masih sangat indah.

Pada kenyataannya di abad 18, Belanda akhirnya harus mengalah dengan alam Pelabuhan Sunda Kelapa yang tidak bersahabat. Mereka juga nampaknya tidak dapat mentolerir banyaknya kematian di dalam kota-nya akibat berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh iklim laut, endapan lumpur di kanal dan kurangnya air bersih. Angka kematian meningkat mulai dari tahun 1733 dengan jumlahnya yang berkisar rata-rata 2000-3000 orang per tahun. Mereka merupakan korban dari tipus, malaria, disentri dan beri-beri. Berdasarkan hal itu pemukiman dan pusat pemerintahan kemudian pada masa Daendels akhirnya pindah ke *Oomelanden* (luar tembok kota). Wilayah yang awalnya diperuntukan untuk pemukiman warga pribumi. Disana mereka membuat pemukiman impian mereka yang lebih bebas dari penyakit yaitu

² Terbukti Batavia pada masa ini memang sempat sangat terkenal dengan julukan "Queen of the East" (Ratu dari Timur) atau di Belanda populer dengan sebutan "Venezia van Oost" (Venesia dari Timur).

Weltevreden, sedangkan kompleks *Intramous* (dalam tembok kota) atau kota tua (*Oud Batavia*) beserta Pelabuhan Sunda Kelapa benar-benar mereka tinggalkan. Wilayah ini kemudian berkembang sebagai kota yang terlupakan, kosong dan jauh dari gambaran awal saat pertamakali dibangun. Disini orang Belanda hanya hadir untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa dan berbagai sentra ekonomi yang memang sudah terlanjur dibangun. Berbagai Bank, pabrik, dan lain-lain juga tetap melakukan kegiatannya disini.

Dalam perkembangannya, di wilayah *Intramous/Oud Batavia* kemudian malah banyak menjamur pemukiman pribumi miskin. Disana dalam perkembangannya banyak juga dari mereka tinggal di rumah-rumah yang sudah ditinggalkan pemilik aslinya yaitu warga *Intramous*. Beberapa dari mereka juga membentuk pemukiman-pemukiman baru yang melengkapi kehadiran Kampung Luar Batang³, nantinya akan menjadi cikal bakal wilayah Penjaringan. Bagi mereka menjadi berkah tersendiri untuk dapat mendiami tempat ini karena sangat dekat dengan akses pekerjaan mereka yang kebanyakan bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Sejak awal terbentuknya wilayah ini bila ditarik dari masa kolonialisasi, maka wilayah Penjaringan memang identik dengan kemiskinan. Dimana kemudian, keadaan tersebut yang tergambarkan dengan kemiskinan terus berlanjut keberadaannya melewati beberapa masa kolonialisasi selanjutnya (Perancis, Inggris, Belanda, Jepang) sampai pada masa awal kemerdekaan. Walau Indonesia telah menemukan kemerdekaannya pada masa Sukarno. Pada masa ini pula wilayah Penjaringan dengan kesan kehidupan miskin masyarakatnya malah makin mengental. Nampaknya Sukarno masih terlalu berpuas diri dengan pembangunan-pembangunan simbolik yang dilakukannya di pusat kota Jakarta. Seperti wilayah pinggiran Ibukota lainnya di masa ini, wilayah Penjaringan akhirnya menjelma sebagai kantung-kantung

³ Sudah ada sejak zaman Belanda, namun wilayahnya di Oomelanden (luar tembok kota).

pemukiman masyarakat miskin . Jauh dari kesan ibukota dari negara Indonesia yang makmur dan kuat seperti layaknya impian Sukarno.

Wilayah Penjaringan kemudian seakan bangkit dari tidurnya dalam masa Orde Baru. Bagi masyarakat Penjaringan, masa ini memang seakan memberi harapan setelah lama hidup sengsara dalam kepemimpinan kolonialisasi asing dan Sukarno pada awal kemerdekaan. Dalam era kepemimpinan Suharto ini, berbagai sentra ekonomi kemudian mulai dikembangkan sementara masyarakatnya diajak untuk lebih terlibat dalamnya. Seperti pada masa sebelum-sebelumnya, maka hegemoni kekuasaan kali ini juga memiliki ekspektasi tersendiri dalam memaknai wilayah Penjaringan yaitu representasi pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan awal, bisa dikatakan rencana-rencana Orde Baru tersebut cukup dipahami dengan baik oleh kehidupan masyarakat wilayah Penjaringan. Terbukti kompetisi perekonomian antar masyarakat dapat setidaknya memberi keuntungan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan.

Kemajuan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru yang sering dianalogikan dengan kalimat “tinggal landas” kemudian memang dengan cepat harus menurun. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakmampuan pemerintah dalam meratakan pembangunan dan tentu ketidak ketersediaan mereka akan modal . Terutama soal modal bagi pembangunan, hal ini terjadi dikarenakan Pertamina sebagai pemasukan terbesar telah bangkrut karena korupsi dan kegagalannya memenuhi ekpektasi pemerintah. Efeknya kemudian adalah pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk memodali berbagai kepentingan usaha, termasuk yang ada di wilayah Penjaringan. Ketergantungan modal ini kemudian membawa mereka bergantung pada kaum Cina peranakan dan kepentingan asing. Ketergantungan ini kemudian dipertebal dengan ketidakpercayaan mereka pada kaum pribumi.

Ketergantungan pemerintah tersebut kemudian menyebabkan perekonomian Indonesia harus jatuh dalam monopoli pihak kaum Cina peranakan dan kepentingan

asing. Masyarakat kecil jelas menderita karena tidak dapat melawan tekanan modal besar dari konglomerasi dagang tersebut. Mereka pada kenyataannya juga tidak dapat mengembangkan usahanya karena terbentur oleh penguasaan dagang yang seolah tak ternegosiasikan. Pemerintah yang seharusnya berkepentingan menjaga agar persaingan ekonomi tidak merugikan masyarakat malah berbalik melindungi ketidakadilan ini. Orde Baru dengan militernya setia menjadi “anjing-anjing penjaga” bagi kepentingan pihak-pihak yang merugikan masyarakat ini.

Setelah Orde Baru turun dengan segala masalah yang mendasarinya, wilayah Penjaringan akhirnya harus masuk dalam era reformasi yang kelanjutannya masih berlangsung sampai pada masa sekarang. Pada masa ini masyarakat jelas lebih merasa diberi kebebasan untuk hidup, terlepas dari belenggu tirani layaknya pada masa Orde Baru. Namun pada kenyataannya, disatu sisi mereka jelas tidak memiliki kemampuan dalam mengembangkan dirinya dalam alam kebebasan ini. Masyarakat wilayah Penjaringan nampaknya telah terlalu jauh tertinggal untuk menghadapi tuntutan zaman. Dalam hal ekonomi mereka juga jelas tidak dapat melawan monopoli dagang yang sudah menjadi kerak di dalam kehidupannya.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kehidupan wilayah Penjaringan hadir dalam gambaran manusia yang memahaminya sebagai suatu tantangan yang harus coba ditaklukan, sementara di lain pihak selalu ada keberlangsungan kehidupan sekelompok manusia. Keduanya merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah ini dan kekompleksitasan pemahaman kedua hal tersebut yang akhirnya membentuk kehidupan wilayah Penjaringan. Di masa sekarang sebagai kelanjutan dari alur kebebasan yang dicita-citakan masa reformasi, masyarakat Penjaringan nampaknya telah sampai dalam satu bentuk kesadaran akan kekompleksitasan proses pemaknaan yang membentuk kehidupannya tersebut. Dalam artian sederhananya, dapat dikatakan bahwa mereka sangat sadar akan adanya satu bentuk kekuatan yang terus berusaha menegaskan kekuasaannya di wilayah ini, namun kemudian

representasi itu sangat bertentangan dengan kehidupan miskin mereka yang terus berjuang setiap harinya untuk urusan perut.

Pemahaman akan kehidupannya yang dibentuk oleh kekompleksitasan pemaknaan. Sebenarnya semua ini mereka konstruksikan dalam suatu bentuk kesadaran akan sejarah yang membentuk mereka seutuhnya. Masa ke masa yang terlukiskan sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Bentang masa lalu dalam perjalanan panjang wilayah Penjaringan pada akhirnya memang dapat dikatakan sebagai satu bentuk untaian realitas yang tersurat dalam kehidupan anak manusia. Kesemuanya mengakar secara mendalam dan kuat membentuk pemaknaan wilayah Penjaringan sebagai simbol kehidupan, dimana alurnya memiliki pengaruh besar dalam membentuk wilayah Penjaringan pada masa kini dan seterusnya.

Kesadaran sejarah ini sebenarnya berhasil mereka kembangkan karena sadar akan ketidakmampuan mereka dalam mengikuti perkembangan zaman, namun mau tak mau harus terus maju agar bisa terus bertahan hidup. Kenyataan di lapangan yang saya temukan sangat mendukung hal ini. Masyarakat Penjaringan pada masa sekarang memang seakan membangkitkan romantisme masa lalu mereka dan itu dimaknai untuk membentuk jalan hidupnya pada masa kini. Pemaknaan disini mengacu pada suatu bentuk kesadaran yang dikembangkan manusia dalam rangka mengkalkulasikan kesempatan dan kegagalan untuk mewujudkan kehidupannya. Dalam bentuk ini, pengkalkulasian menjadi sangat kultural saat mereka mempertimbangkan masa lalu dan sekarang.

Suatu pemaknaan masyarakat wilayah Penjaringan pada masa kini kemudian mewujud dalam bentuk-bentuk kesepakatan yang didasari oleh bagaimana mereka secara pragmatis memandang segala aspek dalam kehidupan. Pragmatisme disini dapat dilihat sebagai bentuk negosiasi kultural yang dikembangkan oleh masyarakat Penjaringan. Dimana dalam bentuk yang paling mendasar dapat dilihat dalam bagaimana mereka memaknai kemiskinan dalam hidup. Pada suatu saat mereka dapat sepakat memaknai kemiskinan sebagai bagian dari kehidupannya, namun di lain

waktu mereka juga dapat sekuat tenaga menolak hal itu dan mewujudkannya sebagai bentuk resistensi dalam kehidupan.

Sebagai contoh dari hal ini dapat dilihat dengan bagaimana mereka memaknai militerisme dalam masa Orde Baru pada masa sekarang. Dulu saat militer dengan ketat menjaga sistem perekonomian yang dimonopoli Cina dan kepentingan asing mereka jelas sengsara karena perekonomiannya tidak berkembang. Namun bila kemudian mereka membandingkannya pada masa sekarang, jelas banyak masyarakat yang menganggap kehidupannya di masa Orde Baru lebih sejahtera. Mereka dapat membeli sembako dengan harga murah, hidup berkecukupan walau terus menerus hadir dalam kehadiran militer di wilayah ini. Mereka nampaknya benar-benar merasa sangat lapar sehingga melupakan berbagai kekerasan militer yang hadir di wilayah ini. Mengacu pada masa itu, pada kenyataannya dalam kehidupan di masa sekarang mereka juga kemudian menganggap kehadiran militer adalah satu akumulasi kekuasaan yang menguntungkan dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat Penjaringan militer memiliki kekuatan yang seperti biasa dapat menggerakkan perubahan dalam kehidupan Bangsa Indonesia.

Militer pasca Reformasi memang seolah mundur dari pentas kehidupan, terpecah menjaga kelangsungan bisnis mereka masing-masing. Dunia politik seolah menjadi ditabukan bagi mereka setelah mundurnya Suharto, namun peran mereka pada kenyataannya tetap sentral hadir dengan kesadaran yang seragam yaitu menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia. Dalam perenungannya banyak petinggi militer sebenarnya cemas dengan nasib Bangsa Indonesia dan mulai kembali tergerak untuk mendukung perubahan dalam masyarakat.

Kenyataan ini sangat terlihat dalam peristiwa majunya seorang pensiunan Jendral TNI-AD bernama Hendarji Supanji (mantan DANPUSPOM) sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Masyarakat wilayah Penjaringan terutama di daerah Muara Baru dan Kampung Luar Batang terlihat sangat antusias menyambut kehadirannya sebagai bakal calon pemimpin mereka. Dalam posisi ini

mereka sangat memperlihatkan posisi mereka sebagai masyarakat yang sangat terpuruk dalam kemiskinan dan harus dibantu dalam kehidupannya. Mereka seakan menganggap kehadiran Hendarji sebagai penyelamat mereka dalam kehidupan. Layaknya kehadiran Suharto dan Ali Sadikin pada masa awal Orde Baru dalam membangun sentra ekonomi di wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka sangat senang dalam kehadiran Hendarji memberikan bantuan-bantuan sembako dan pengobatan gratis dalam beberapa kesempatan.

Representasi kemiskinan mereka yang menderita dalam kehidupan kemudian bergeser secara perlahan saat kontrak-kontrak politik akhirnya diharapkan dapat terwujud dalam rangka naiknya Hendarji sebagai Gubernur DKI periode 2012-2017. Disini sangat terlihat pergeseran pemaknaan mereka akan kemiskinan yang pada kali ini seolah ditolak sebagai representasi dari kehidupan mereka. Terutama di daerah Muara Baru, masyarakat kemudian seolah mentransformasikan organisasi masyarakat yaitu RW17 sebagai institusi terhormat yang berperan menguasai kehidupan disekitarnya. Suatu penegasan yang memposisikan organisasi masyarakat ini selayaknya penguasa lokal yang memiliki kekuasaan besar dalam kehidupan. Mereka seolah memberi pemahaman kepada Hendarji bahwa kesepakatan dengan masyarakat harus melalui jalan yang dibangun dengan organisasi masyarakat ini. Pada bagian ini kehadiran organisasi masyarakat RW 17 berperan layaknya perantara (*middleman*) yang mapan dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Semua hal ini dilakukan untuk menegaskan posisi masyarakat yang kuat dan penting, dimana mereka mengharapkan Hendarjie mau menghormatinya. Masyarakat Penjaringan jelas mengharapkan ada kontrak politik yang jelas menguntungkan bagi mereka dalam kehidupan. Dimana hal ini mewujudkan sebagai resistensi karena kesepakatan – kesepakatan dalam kontrak politik memang sangat diusahakan mendukung keberlangsungan kehidupan mereka. Seperti contoh status tanah mereka semua yang ilegal dan beberapa tanah yang bersengketa.

Wilayah Penjaringan dalam setiap masa kesemuanya memperlihatkan bagaimana hegemoni kekuasaan memberi penetapannya (pemaknaan akan nilai-nilai baru) masing-masing, namun tak lepas juga dipengaruhi oleh satu bentuk negosiasi kultural masyarakat. Kesemua hal ini kemudian menyebabkan kekuasaan tidak pernah terpampang secara absolut di wilayah Penjaringan. Keadaan tersebut juga seakan merepresentasikan bagaimana nilai-nilai baru yang dibawa oleh satu kekuasaan yang berupa penaklukan selalu dimaknai berbeda dari masing-masing manusia. Kembali pada dikotomi *culture* dan *nature* dari Levi Strauss, maka apa yang disebut *nature* oleh satu pihak, dan oleh karenanya boleh dieksplorasi dan dieksploitasi, sesungguhnya oleh kelompok lain ditanggapi sebagai *culture*-nya. Kekuasaan bisa dikatakan terbentuk secara ketat dan kaku namun dalam kenyataannya menjadi cair dalam pemaknaan manusia-manusia di dalam wilayah Penjaringan. Kesemua hal ini terjadi, dikarenakan masih adanya ruang dan waktu untuk selalu dinegosiasikan. Ini semua merupakan satu bukti yang menjelaskan bahwa ruang dan waktu wilayah Penjaringan adalah simbol pemaknaan yang tak pernah mendapat kata akhir, satu bentuk wacana yang selalu meng-koma dan tak pernah mencapai kata titik -“*it's a never ending discourse*”-.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyasekere, Susan. *Jakarta a History*. Singapore: Oxford University Press.1989.
- Alamsyah, Rahman, Andi. *Islam, Jawara dan Demokrasi (Geliat Politik Banten Pasca-Orde Baru)*. Jakarta: Dian Rakyat.2009.
- Barth, Fredrik,ed. "Introduction",in *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little, Brown.1969.
- Bauman and Gingrich. *Grammars of Identity/Alterity a Struktural Approach*. Canada:Berghahn Books.2004.
- Bruner. E.M. *The Expression of Ethnicity in Indonesia*,ed Abner Cohen. *Urban Ethnicity*. A.S.A. Monograph (12) London: Tavistock.
- Burger, D.H. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradjanparamita.1962.
- Castles, Lance. *Profil Etnik Jakarta*. Jakarta: Masup Jakarta,2007.
- Durkheim, Emile and Marcel Mauss. *Primitive Classification*. Chicago: The University of Chicago Press,1963.
- Djajadiningrat, Hoesin. *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten*. Jakarta: Djambatan, 1983.
- F.de Haan, *Oud Batavia*.Bandoeng: A.C.Nix&co. 19930.
- Geertz, Clifford. 'The Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture', *The Interpretation of Culture*. New York Basic Books,1973a.
- _____ 'The Integrative Revolution: Primordial Sentimen and Civil Politics in the New States', *The Interpretation of Culture*. New York Basic Books,1973b.
- Giddens, Anthony."The Constitution of Society.Berkeley:Univ of California,1984.
- Hall, Stuart. 'Introduction: Who Needs Identity?', *Questions of Cultural Identity*. S. Hall and P Gay, eds. Londo: Sage, 1996.

- Hanna, Willard. *Hikayat Jakarta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Hanneman, Samuel. *Emile Durkheim*. Depok : Kepik Ungu, 2010.
- Heuken, S.J.A, *History Sites of Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1982.
- Hong, Tek, Tio. *Keadaan Jakarta Tempo Doeloe (Sebuah Kenangan 1882-1959)*. Jakarta: Jakarta Masup, 2007.
- Hudaeri, Mohamad, M. Ag. “Tasbih dan golok: Studi tentang Kedudukan, Peran dan Jaringan Kiyai dan Jawara di Banten”, *Laporan akhir penelitian Kompetitif PTAI Tahun Anggaran 2002*, Serang: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2002
- Jenkins, R. *Rethinking Ethnicity: Argument and Explanation*. London: Sage.
- Levi-Strauss, Claude. *The Savage Mind*. London, 1966.
- Leirissa, Z. R. *Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutra (kumpulan makalah diskusi)*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Lohanda, Mona. *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Jakarta: Masup Jakarta, 2007.
- Lubis, Nina H. *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mohamad, Goenawan. *Indonesia/proses*. Jakarta: Tempo, 2010.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris, 2006.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981.
- Rudyansjah, Tony. *Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suparlan, Parsudi. *Suku Bangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: YPKIK., 2004.

Tilhami, M.A. “Kyai dan Jawara di Banten: Studi tentang Agama, Magi , dan Kepemimpinan di Desa Pesangrahan, Serang, Banten”, tesis, Depok: Program Studi Antropologi, Program Pasca –sarjana Universitas Indonesia,1992.

Tuner, Terence. *Ethno-ethno History: Myth and History in Native South American Representation of Contact with Western Society*. Unpublished manuscript.1985.

